

DASAR-DASAR ILMU PENDIDIKAN

BAHAN AJAR

**Ikhtisar/Butir-butir Bahan Diskusi Untuk Mahasiswa Strata Satu
Pada Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah “Nurul Hikmah”
Cianjur**

Dihimpun Oleh :

Drs. DJUNAEDI SAJIDIMAN, MM, M.Pd.

**SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH
“NURUL HIKMAH”
CIANJUR**

-2012-

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrohmaanirrohiim.

Memenuhi tugas yang diberikan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah “Nurul Hikmah” Cianjur pada Program Studi Pendidikan Agama Islam untuk memfasilitasi mata kuliah Ilmu Pendidikan kepada para mahasiswa, penulis mencoba menyusun bahan ajar berupa ikhtisar sebagai butir-butir bahan diskusi untuk memudahkan dalam proses perkuliahan.

Bahannya penulis ambil dari beberapa buku sumber yang disusun oleh para pakar pendidikan. Untuk pengayaannya penulis menganjurkan kepada para mahasiswa untuk mendalami lebih lanjut buku-buku sumber dimaksud, yang juga penulis cantumkan dalam daftar kepustakaan.

Semoga kiranya ada manfaatnya.

Cianjur, Ultimo Januari 2013.

Penulis.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENGERTIAN, TUJUAN, FUNGSI, DAN PROSES PENDIDIKAN	1
A. PENGERTIAN PENDIDIKAN	1
B. TUJUAN PENDIDIKAN	6
C. FUNGSI PENDIDIKAN	11
D. PROSES PENDIDIKAN	13
BAB II. LEMBAGA DAN SISTEM PENDIDIKAN	19
A. LEMBAGA PENDIDIKAN	19
B. SISTEM PENDIDIKAN	34
BAB III. PENDIDIKAN SEUMUR HIDUP DAN BERBAGAI IMPLIKASINYA	51
A. KONSEP PENDIDIKAN SEUMUR HIDUP	51
B. TUJUAN DAN DASAR PEMIKIRAN PENTINGNYA PENDIDIKAN SEUMUR HIDUP	54
C. IMPLIKASI KONSEP PENDIDIKAN SEUMUR HIDUP PADA PROGRAM PENDIDIKAN	58
D. STRATEGI PENDIDIKAN SEUMUR HIDUP	61
BAB IV. PERANAN KELUARGA DAN MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN	64
A. PERANAN KELUARGA DALAM PENDIDIKAN	64
B. KERJASAMA ANTARA KELUARGA DENGAN SEKOLAH	65
C. PERANAN MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN	68
D. HUBUNGAN MASYARAKAT DENGAN SEKOLAH	70
BAB V. PENGARUH TIMBAL BALIK ANTARA KELUARGA, SEKOLAH, DAN MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN	73
A. PERGAULAN DALAM KELUARGA, SEKOLAH, DAN MASYARAKAT	73
B. PENGARUH SEKOLAH TERHADAP MASYARAKAT	76
C. PENGARUH MASYARAKAT TERHADAP SEKOLAH	80
BAB VI. PENDIDIKAN AGAMA DI INDONESIA	83
A. PENERAPAN SISTEM NILAI DAN ORAL AGAMA DALAM PROSES PENDIDIKAN	83
B. SEJARAH PERGURUAN AGAMA ISLAM	84
C. PENDIDIKAN AGAMA DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL	96
D. IMPLEMENTASI NILAI-NILAI AGAMA DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL	102
BAB VII. INOVASI PENDIDIKAN	106
A. PENGERTIAN INOVASI PENDIDIKAN	106

B. TUJUAN INOVASI PENDIDIKAN	107
C. MASALAH-MASALAH YANG MENUNTUT INOVASI PENDIDIKAN	108
D. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INOVASI PENDIDIKAN	110
E. PEMECAHAN MASALAH INOVASI PENDIDIKAN DAN CARA PENCA- PAIANNYA	113
F. BEBERAPA CONTOH PELAKSANAAN INOVASI PENDIDIKAN	116
BAB VIII. DEMOKRASI PENDIDIKAN	140
A. PENGERTIAN DAN PERLUNYA DEMOKRASI PENDIDIKAN	140
B. PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI DALAM PENDIDIKAN	143
C. PELAKSANAAN DEMOKRASI PENDIDIKAN DI INDONESIA	144
D. DASAR-DASAR DEMOKRASI PENDIDIKAN MENURUT ISLAM	146
E. TOKOH-TOKOH PENDIDIKAN INDONESIA	149
DAFTAR KEPUSTAKAAN	150

BAB I

PENGERTIAN, TUJUAN, FUNGSI, DAN PROSES PENDIDIKAN

A. PENGERTIAN PENDIDIKAN

Sifat dan sasaran pendidikan adalah manusia yang mengandung banyak aspek dan sangat kompleks. Karena sifatnya yang kompleks itu, maka tidak ada batasan yang dianggap memadai untuk menjelaskan arti pendidikan secara lengkap. Itulah sebabnya definisi yang dibuat oleh para ahli beraneka ragam, dan kandungannya satu sama lain berbeda. Bisa jadi perbedaan itu terletak pada orientasinya, konsep dasarnya, falsafah yang melandasinya, dan fungsi atau aspek penekanannya.

Beberapa definisi pendidikan yang berbeda berdasarkan fungsinya dapat dikemukakan di bawah ini.

1. Pendidikan sebagai Proses Transformasi Budaya.

Dalam hal ini pendidikan didefinisikan sebagai kegiatan pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Misalnya, tatkala seorang bayi dilahirkan di lingkungan masyarakat tertentu, di dalamnya sudah ada nilai-nilai kebudayaan seperti kebiasaan-kebiasaan, perintah, anjuran, ajakan, dan larangan-larangan tertentu yang dikehendaki masyarakat. Demikian juga mengenai banyak hal seperti agama, bahasa, makanan, pekerjaan, perkawinan, cara menerima tamu, bercocok tanam dsb. Nilai-nilai budaya ini mengalami transformasi dari generasi tua ke generasi muda. Bentuk transformasi ini ada tiga macam, yaitu, nilai-nilai yang dianggap masih cocok diteruskan seperti kejujuran, rasa tanggung jawab, kepedulian, kesabaran, disiplin, dll., yang kurang cocok diperbaiki, seperti tata cara pesta perkawinan/ulang tahun, dan yang tidak cocok diganti, seperti pendidikan seks yang dahulu ditabukan diganti dengan pendidikan seks melalui pendidikan formal.

2. Pendidikan sebagai Proses Pembentukan Pribadi.

Dalam hal ini pendidikan didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang sistematis dan sistemik terarah pada terbentuknya kepribadian peserta didik. Sistematis karena

berlangsung melalui tahap-tahap yang berkesinambungan, dan sistemik karena berlangsung dalam semua situasi dan kondisi di semua lingkungan yang saling mengisi (rumah, sekolah, dan masyarakat). Proses pembentukan pribadi meliputi dua sasaran, yaitu bagi mereka yang belum dewasa oleh mereka yang sudah dewasa, dan bagi yang sudah dewasa atas usaha sendiri. Pembentukan pribadi atas usaha sendiri ini disebut *zelf vorming*.

Seorang bayi kepribadiannya belum terbentuk, maka dalam proses pembentukan kepribadian ini diperlukan bimbingan, latihan-latihan, dan pengalaman melalui pergaulan dalam lingkungannya, khususnya lingkungan pendidikan. Bagi yang sudah dewasa, pengembangan diri agar meningkat dan lebih berkualitas dipicu oleh tantangan hidup yang selalu berubah. Pembentukan pribadi ini mencakup pembentukan cipta, rasa, dan karsa (kognitif, afektif, psikomotor) yang sejalan dengan perkembangan fisik. Inilah yang disebut *long life educations* (pendidikan sepanjang hayat).

3. Pendidikan sebagai Proses Penyiapan Warga.

Dalam hal ini pendidikan didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang terencana untuk membekali peserta didik agar menjadi warga negara yang baik. Tentu saja istilah warga negara yang baik itu relatif, bergantung kepada falsafah negara dan tujuan nasional masing-masing yang berbeda. Bagi Indonesia, tentu saja yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jabaran selanjutnya terdapat dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional beserta aturan-aturan pelaksanaannya.

4. Pendidikan sebagai Penyiapan Tenaga Kerja.

Dalam hal ini pendidikan didefinisikan sebagai kegiatan membimbing peserta didik sehingga memiliki bekal dasar untuk bekerja. Pembekalan dasar ini berupa pembentukan sikap, pengetahuan, dan keterampilan kerja. Hal ini sangat penting karena bekerja adalah kebutuhan pokok manusia untuk mencari nafkah sehingga menjadi penopang kehidupan diri dan keluarganya, tidak bergantung kepada dan mengganggu orang lain.

Redja Mudyahardjo (2001:3-12) mengemukakan tiga definisi tentang pendidikan, yaitu definisi maha luas, definisi sempit, dan definisi alternatif atau luas terbatas.

1. Definisi Maha Luas :

Pendidikan adalah hidup. Pendidikan adalah segala peng-alaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup. Pendidikan adalah segala situasi hidup yang mempengaruhi pertumbuhan individu. Karakteristik khususnya, masa pendidikan berlangsung seumur hidup dalam setiap saat selama ada pengaruh lingkungan. Lingkungan pendidikannya adalah segala lingkungan hidup baik yang khusus diciptakan untuk kepentingan pendidikan maupun yang ada dengan sendirinya. Bentuk kegiatannya terentang dari bentuk-bentuk yang misterius atau tak disengaja sampai dengan yang terprogram, dan berlangsung dalam aneka ragam bentuk, pola, dan lembaga. Tujuannya terkandung dalam setiap pengalaman belajar, tidak ditentukan dari luar, yaitu pertumbuhan, tidak terbatas. Dengan demikian tujuan pendidikan sama dengan tujuan hidup.

2. Definisi Sempit :

Pendidikan adalah sekolah, yaitu pengajaran yang diselenggarakan di sekolah sebagai lembaga pendidikan formal. Pendidikan adalah segala pengaruh yang diupayakan sekolah terhadap anak dan remaja yang diserahkan kepadanya agar mempunyai kemampuan yang sempurna dan kesadaran penuh terhadap hubungan-hubungan dan tugas-tugas sosial mereka. Karakteristik khususnya, masa pendidikan berlangsung dalam waktu terbatas, yaitu masa kanak-kanak dan remaja. Lingkungan pendidikannya diciptakan khusus untuk penyelenggaraan pendidikan, dan secara teknis berlangsung di kelas. Bentuk dan isi kegiatannya tersusun secara terprogram dalam bentuk kurikulum. Kegiatan ini lebih berorientasi pada kegiatan guru sehingga guru mempunyai peranan yang sentral dan menentukan. Tujuan pendidikannya ditentukan dari luar dan terbatas pada pengembangan kemampuan-kemampuan tertentu untuk mempersiapkan hidup.

3. Definisi Alternatif atau Luas Terbatas :

Pendidikan adalah usaha sadar yang dilakuk-kan oleh keluarga, masyarakat, dan pe-

merintah, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan/atau pelatihan, yang berlangsung di sekolah dan di luar sekolah sepanjang hayat, untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peranan dalam berbagai lingkungan hidup secara tepat di masa yang akan datang. Pendidikan adalah pengalaman-pengalaman belajar terprogram dalam bentuk pendidikan formal, nonformal, dan informal di sekolah, dan luar sekolah yang berlangsung seumur hidup dan bertujuan optimalisasi pertimbangan kemampuan-kemampuan individu, agar di kemudian hari dapat memainkan peranan hidup secara tepat. Karakteristik khususnya, masa pendidikan berlangsung seumur hidup, yang kegiatan-kegiatannya tidak berlangsung sembarang, tetapi pada saat-saat tertentu. Lingkungan pendidikannya dalam sebagian lingkungan dari hidup, tidak berlangsung dalam lingkungan hidup yang tergelar dengan sendirinya. Pendidikan hanya berlangsung dalam lingkungan hidup kultural. Kegiatannya dapat berbentuk pendidikan formal, nonformal, dan informal, dan dapat berupa bimbingan, pengajaran, dan/atau pelatihan.

Sementara itu definisi pendidikan dan pendidikan nasional menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah :

1. Pendidikan.

Adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

2. Pendidikan Nasional.

Adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

Berkaitan dengan sistem pendidikan yang dilaksanakan di Indonesia, sekaligus saja di bawah ini dikemukakan beberapa pengertian (Pasal 1 UU No. 20/2003) :

1. Sistem Pendidikan Nasional.

Adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan nasional.

2. Peserta Didik.

Adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

3. Tenaga Kependidikan.

Adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

4. Pendidik.

Adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

5. Jalur Pendidikan.

Adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.

6. Jenjang Pendidikan.

Adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.

7. Jenis Pendidikan.

Adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.

8. Satuan Pendidikan.

Adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada ja-

lur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

9. Pendidikan Formal.

Adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

10. Pendidikan Nonformal.

Adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

11. Pendidikan Informal.

Adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

12. Pendidikan Anak Usia Dini.

Adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

B. TUJUAN PENDIDIKAN

Paulo Freire (1984) dalam Made Pidarta (1997:17-18) mengemukakan pandangan tentang tujuan pendidikan, bahwa pendidikan hendaklah membuat manusia menjadi transitif, yaitu suatu kemampuan menangkap dan menanggapi masalah-masalah lingkungan serta kemampuan berdialog tidak hanya dengan sesama, tetapi juga dengan dunia beserta segenap isinya. Dalam pada itu Alvin Toffler (1987) menyoroti tujuan pendidikan dikaitkan dengan kemajuan teknologi di masa depan. Teknologi masa depan akan menangani arus materi fisik, sementara itu manusia akan menangani arus informasi dan wawasan. Karenanya kegiatan manusia akan semakin terarah kepada tugas intelektual sebagai pemikir dan kreatif, bukan hanya melayani mesin-mesin. Sementara itu Samuel Smith (1986) membuat kesimpulan dari pandangan para ahli tentang tujuan pendidikan mutakhir. Kesimpulannya cukup beragam, mulai dari

usaha memberikan pengalaman hidup bagi para peserta didik dan warga belajar, kegiatan ilmiah, pelayanan terhadap pengembangan kemampuan dan minat, metode belajar yang baik, kebebasan individu, cinta kasih terhadap sesama, sampai dengan pentingnya hubungan antara guru dengan peserta didik dan warga belajar.

Tujuan pendidikan memuat *nilai-nilai yang baik, luhur, pantas, benar, dan indah* untuk kehidupan. Oleh karenanya tujuan pendidikan memiliki dua fungsi, yaitu pertama, *memberi arah kepada segenap kegiatan pendidikan*, dan kedua, *merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh segenap kegiatan pendidikan*.

Sebagai salah satu komponen pendidikan, tujuan pendidikan menduduki posisi penting di antara komponen-komponen pendidikan lainnya. Justru segenap komponen dari seluruh kegiatan pendidikan itu dilakukan semata-mata terarah pada dan ditujukan untuk pencapaian tujuan pendidikan tersebut. Demikianlah, maka kegiatan-kegiatan yang tidak relevan dengan tujuan pendidikan dimaksud, dianggap menyimpang, tidak fungsional, bahkan salah, sehingga harus dicegah jangan sampai terjadi. Dengan demikian jelas terlihat bahwa tujuan pendidikan bersifat normatif, yaitu mengandung kaidah yang bersifat memaksa, tetapi tidak bertentangan dengan hakikat perkembangan peserta didik, serta dapat diterima oleh masyarakat sebagai nilai kehidupan yang baik.

Demikian pentingnya tujuan dan fungsi pendidikan, maka menjadi keharusan bagi kalangan pendidikan untuk memahaminya. Kekurangfahaman terhadap tujuan dan fungsi pendidikan menurut Langeveld (1955), akan berakibat kesalahan/kekeliruan dalam melaksanakan proses pendidikan. Tujuan pendidikan pun bersifat abstrak karena memuat nilai-nilai yang juga sifatnya abstrak. Tujuan yang demikian, sifatnya umum, ideal, dan kandungannya sangat luas sehingga sangat sulit pelaksanaannya di dalam praktek. Padahal pendidikan harus berupa tindakan nyata yang ditujukan pada peserta didik dalam kondisi tertentu, tempat tertentu, waktu tertentu, dan menggunakan alat tertentu. Jadi, dalam pelaksanaannya harus dibuat jelas secara eksplisit, konkrit, dalam lingkup kandungan terbatas. Di sinilah perlunya memerinci tujuan umum sehingga menjadi tujuan yang bersifat khusus dan terbatas, agar mudah dilaksanakan dalam praktek. Itulah sebabnya tujuan pendidikan diurai menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. Umar Tirtarahardja dan S.L. La Sulo (2003:38) memberikan

contoh perbandingan tiga macam tujuan pendidikan.

1. Membimbing peserta didik agar menjadi manusia berjiwa Pancasila. (Sangat abstrak, umum, luas, dan sulit direalisasikan).
2. Menumbuhkan jiwa demokratis pada diri peserta didik. (Masih bersifat umum, belum mudah untuk direalisasikan).
3. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengajukan pendapat. (Lingkupnya terbatas dan mudah dilaksanakan).

Selanjutnya menurut Umar Tirtarahardja, beberapa hal yang menyebabkan perlunya tujuan khusus dalam pendidikan antara lain :

1. Pengkhususan tujuan memungkinkan dilaksanakannya tujuan umum melalui proses pendidikan.
2. Adanya kekhususan dari peserta didik, yaitu yang berkenaan dengan jenis kelamin, pembawaan dan minat, kemampuan orang tua/wali, lingkungan masyarakat.
3. Kepribadian yang menjadi sasaran untuk dan dikembangkan bersifat kompleks sehingga perlu dirinci dan dikhususkan, aspek apa yang dikembangkan.
4. Adanya tahap-tahap perkembangan pendidikan. Dalam hal ini jika proses dari satu tahap pendidikan tercapai, maka disebut tujuan sementara telah tercapai, dan disambung untuk tahap pendidikan berikutnya. Contohnya : Tujuan SD, tujuan SMP, tujuan SMA, dst.
5. Adanya kekhususan masing-masing lembaga penyelenggara pendidikan seperti pendidikan kesehatan, pertanian, olah raga, dsb. atau pun jalur pendidikan seperti jalur pendidikan sekolah dan luar sekolah.
6. Adanya tuntutan persyaratan pekerjaan di lapangan yang harus dipenuhi oleh peserta didik sebagai pilihannya.
7. Diperlukan teknik tertentu yang menunjang pencapaian tujuan lebih lanjut, misalnya membaca dan menulis dalam waktu yang relatif pendek. Tujuan khusus yang berhubungan dengan ini bersifat teknis yang berfungsi sebagai tujuan antara. Karena sifatnya teknis (tidak ideologis), maka bisa berlaku dalam pendidikan yang berbeda ideologinya.
8. Adanya kondisi situasional, yaitu peristiwa-peristiwa yang secara kebetulan muncul tanpa direncanakan. Dalam hal ini jika dipandang perlu, pendidik dapat bertindak

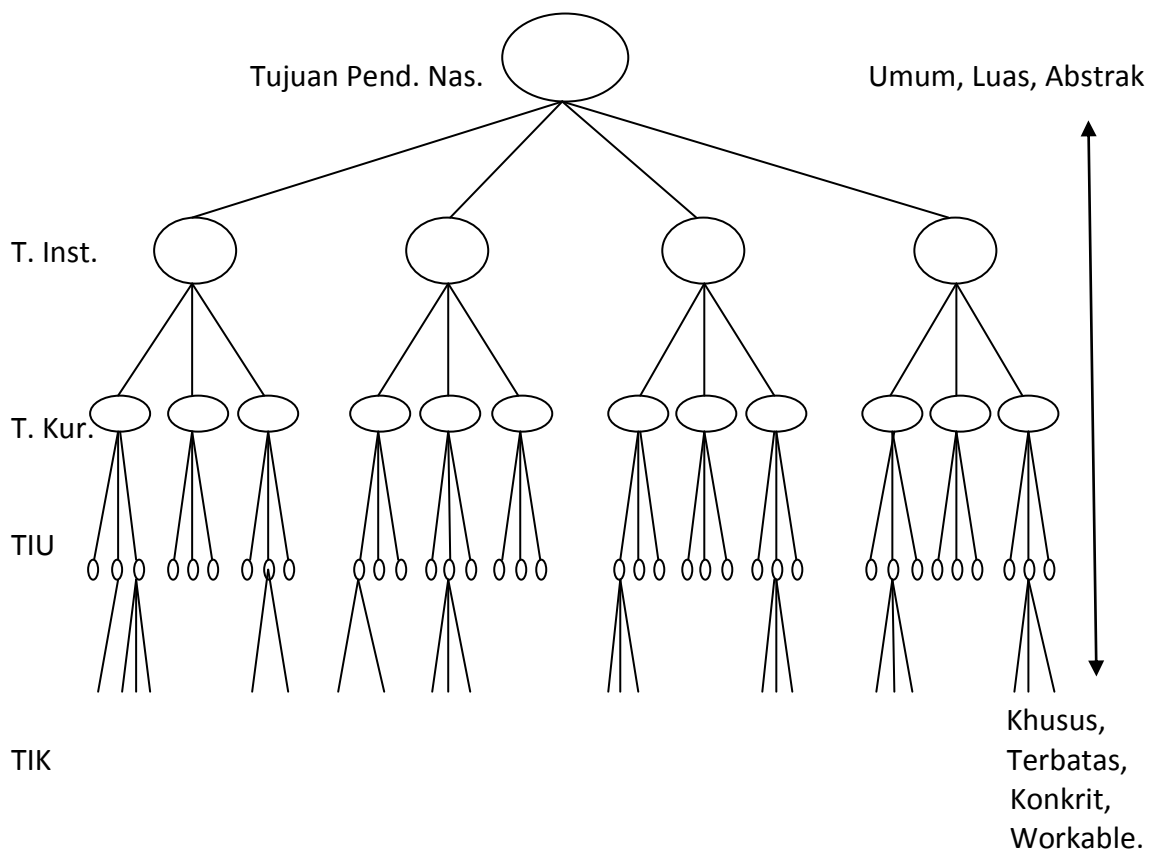
dengan maksud/tujuan tertentu. Contohnya, ada murid yang berprestasi, guru lalu memberi pujian dengan maksud murid terdorong untuk belajar lebih giat (*reinforcement*).

9. Kemampuan yang ada pada pendidik sendiri.

Dalam praktek, terutama pada sistem persekolahan, di dalam rentang antara tujuan umum dengan tujuan khusus, terdapat sejumlah *tujuan antara*. Tujuan antara ini berfungsi untuk menjembatani pencapaian tujuan umum dari selumlah tujuan khusus. Umumnya ada empat jenjang tujuan yang di dalamnya terdapat tujuan antara, yaitu : *Tujuan umum, tujuan institusional, tujuan kurikuler, dan tujuan instruksional*.

1. *Tujuan Umum Pendidikan Nasional Indonesia* ialah manusia Pancasila.
2. *Tujuan Instansional* adalah tujuan yang menjadi tugas dari lembaga pendidikan tertentu untuk mencapainya. Contohnya, tujuan pendidikan SD berbeda dengan tujuan tingkat menengah, dsb. tujuan pendidikan kesehatan tidak sama dengan tujuan pendidikan pertanian, teknik, dsb. Jika semua lembaga pendidikan dapat mencapai tujuannya, berarti tujuan nasional tercapai, yaitu terwujudnya manusia *Pancasilais* yang memiliki bekal khusus sesuai dengan misi lembaga pendidikan di mana seseorang menggembeleng diri.
3. *Tujuan Kurikuler*, yaitu tujuan bidang studi atau tujuan mata pelajaran/perkuliahan. Contohnya, tujuan IPA, IPS, bahasa, matematika, dsb. Setiap lembaga pendidikan dalam rangka mencapai tujuan instansionalnya menggunakan kurikulum. Nah, tujuan kurikulum ini disebut tujuan kurikuler.
4. *Tujuan Instruksional*, yaitu tujuan pokok bahasan dan subpokok bahasan dalam materi kurikulum bidang studi. Tujuan instruksional ini adalah penguasaan materi pokok bahasan/subpokok bahasan, yang disebut *Tujuan Instruksional Umum (TIU)* atau sekarang disebut *Tujuan Pembelajaran Umum (TPU)*, dan *Tujuan Instruksional Khusus (TIK)* atau *Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK)*. TIK/TPK merupakan tujuan yang terletak pada jenjang terbawah dan paling terbatas ruang lingkupnya, serta bersifat operasional dan terkerjakan (*workable*).

Macam-macam tujuan pendidikan tersebut di atas dapat digambarkan sebagai berikut :



Sumber : Umar T. dan S.L. La Sulo (2005:40).

Membicarakan tujuan pendidikan akan menyangkut sistem nilai dan norma-norma dalam konteks kebudayaan, baik dalam mitos, kepercayaan dan religi, filsafat, ideologi, dsb. Karena itu dalam menentukan tujuan pendidikan, menurut Hummel (1977) dalam Uyoh Sadulloh (2003:58-59), terdapat tiga nilai yang harus diperhatikan, yaitu :

1. *Otonomi (autonomy)*, yaitu memberi kesadaran, pengetahuan, dan kemampuan secara maksimum kepada individu maupun kelompok untuk dapat hidup mandiri dan hidup bersama dalam kehidupan yang lebih baik.
2. *Keadilan (equity)*, yaitu bahwa tujuan pendidikan harus memberi kesempatan kepada seluruh warga masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam kehidupan berbudaya dan kehidupan ekonomi, dengan memberi pendidikan dasar yang sama.
3. *Perjuangan bertahan hidup (survival)*, yang berarti dengan pendidikan akan menjamin pewarisan kebudayaan dari satu generasi kepada generasi berikutnya.

Sementara itu tujuan pendidikan berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional, adalah *“untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”*

C. FUNGSI PENDIDIKAN

Fungsi pendidikan dalam arti sempit (mikro), menurut Fuad Ihsan (1996:11) adalah membantu (secara sadar) perkembangan jasmani dan rohani peserta didik. Sedangkan secara luas (makro) adalah sebagai alat :

1. Pengembangan pribadi.
2. Pengembangan warga negara.
3. Pengembangan kebudayaan.
4. Pengembangan bangsa.

Sementara itu fungsi dasar pendidikan menurut Oteng Sutisna (1989:52-53) adalah :

1. Pengembangan individu (aspek-aspek hidup pribadi) : Etis, estetis, emosional, fisis.
2. Pengembangan cara berpikir dan teknik memeriksa : Kecerdasan yang terlatih.
3. Penyebaran warisan budaya : Nilai-nilai sivik dan moral bangsa.
4. Pemenuhan kebutuhan sosial yang vital, yang menyumbang kepada kesejahteraan ekonomi, sosial, dan politik (lapangan teknik).

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan berfungsi *“mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.”*

Lebih luas lagi bahwa fungsi pendidikan secara nasional adalah untuk memperbaiki segala kekurangan, keterbelakangan, kebodohan, dan memantapkan ketahanan nasional serta meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan berdasarkan kebudayaan bangsa dan kebhinnekatunggalikaan. (Soebagio Atmodiwirio, 2000:30).

Mengenai fungsi sistem pendidikan nasional, H.A.R. Tilaar, (1992) dalam Soeba-

gio, (2000:30-31), membaginya dalam dua bagian, yaitu :

1. Fungsi Umum, meliputi :

- a. *Kategori politik*, yang menekankan pada pertumbuhan nasionalisme yang sehat pada setiap sikap dan cara berpikir anak Indonesia;
- b. *Kategori kebudayaan*, yang menekankan pembudayaan nilai-nilai nasional termasuk inti kebudayaan daerah.

2. Fungsi Khusus, meliputi dua dimensi :

- a. *Dimensi teknis*, meliputi hal-hal yang berkaitan dengan anak luar biasa, anak cerdas, pendidikan keluarga, hak-hak peserta didik (bakat dan minat), anak cacat, dan pentingnya bahasa daerah bagi pembentukan intelektual dan kepribadian peserta didik;
- b. *Dimensi pembangunan*, yaitu kaitan pendidikan dengan lingkungan sosial, pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, biaya ditanggung bersama antara pemerintah dan masyarakat, hari libur sesuai dengan kondisi sosial-budaya, fungsi bahasa daerah sebagai bahasa komunikasi dan memperkaya bahasa nasional, peran masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.

Karenanya, dengan mengacu kepada kategorisasi Jeane Bellatien (Soebagio, 2000:31), fungsi sisdiknas dapat dikategorikan dalam :

1. *Fungsi sosial*, memerangi segala keterbelakangan dan kebodohan.
2. *Fungsi pembaharuan dan inovasi*, meningkatkan kehidupan dan martabat manusia.
3. *Fungsi pengembangan sosial dan pribadi*, meningkatkan ketahanan nasional serta rasa persatuan dan kesatuan berdasarkan kebudayaan bangsa.
4. *Fungsi seleksi*, mengembangkan kemampuan (kompetensi) manusia Indonesia.

Dalam pada itu tujuan dan fungsi pendidikan dalam masyarakat di semua negara sifatnya hampir universal (umum), tetapi cara mencapainya sangat beragam, bahkan di antara kelompok atau kelas sosial dalam masyarakat sendiri bisa berbeda. Hal ini dipengaruhi juga oleh tingkat industrialisasi, demikian juga sistem politik yang ada di negara bersangkutan.

D. PROSES PENDIDIKAN

Proses pendidikan merupakan kegiatan memobilisasi segenap komponen pendidikan oleh pendidik yang terarah kepada pencapaian tujuan pendidikan. Proses pendidikan ini sangat menentukan kualitas hasil pencapaian tujuan pendidikan. Kualitas proses pendidikan meliputi dua segi, yaitu *kualitas komponen* dan *kualitas pengelolaannya*. Dua segi kualitas proses ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain, atau dengan kata lain saling bergantung membentuk sistem. Dengan demikian, kendati komponen-komponennya seperti prasarana dan sarana serta biayanya cukup baik, tetapi jika tidak ditunjang dengan pengelolaan yang handal, maka capaian tujuan tidak akan optimal. Sebaliknya, jika pengelolaannya cukup baik tetapi dalam kondisi serba kekurangan, hasil capaian juga tidak akan optimal.

Pengelolaan proses pendidikan ini meliputi ruang lingkup *makro*, *meso*, dan *mikro*. Lingkup *makro* adalah berupa kebijakan-kebijakan pemerintah yang lazimnya dituangkan dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan atau Keputusan Menteri Pendidikan, Keputusan atau Edaran Direktorat Jenderal di lingkungan Kementerian Pendidikan, serta dokumen-dokumen pemerintah di sektor pendidikan tingkat nasional. Lingkup *meso* merupakan implikasi kebijakan-kebijakan nasional ke dalam kebijakan operasional dalam ruang lingkup wilayah di bawah tanggung jawab Gubernur dan Bupati/Walikota cq. Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sedangkan lingkup *mikro* merupakan aplikasi kebijakan-kebijakan pendidikan yang berlangsung dalam lingkungan sekolah, kelas, sanggar-sanggar belajar, dan satuan-satuan pendidikan lainnya dalam masyarakat.

Dalam ruang lingkup mikro, kepala sekolah, guru, tutor, dan tenaga-tenaga kependidikan lainnya memegang peranan penting di dalam pengelolaan pendidikan untuk menciptakan kualitas proses dan capaian hasil pendidikan. Contohnya, seorang guru wajib menguasai pengelolaan kegiatan belajar-mengajar, termasuk di dalamnya pengelolaan siswa dan kelas.

Tujuan utama dari pengelolaan proses pendidikan adalah terjadinya *proses belajar* dan *pengalaman belajar* peserta didik yang optimal. Berkembangnya tingkah laku peserta didik sebagai tujuan belajar, justru hanya dimungkinkan karena adanya

proses belajar dan pengalaman belajar yang optimal itu. Dalam hal ini pemanfaatan/pendayagunaan teknologi pendidikan sangat memegang peranan penting. Itulah sebabnya pengelolaan proses pendidikan mesti memperhitungkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Setiap tenaga kependidikan (kepala sekolah, guru, tutor, dsb.) menjadi wajib mengikuti dengan seksama inovasi-inovasi pendidikan terutama yang didiseminasikan secara meluas oleh pemerintah seperti belajar tuntas (*mastery learning*), pendekatan CBSA (Cara Belajar Siswa Aktif), keterampilan proses, muatan lokal, dan kurikulum, dll. agar dapat mengambil manfaatnya.

Selanjutnya berkaitan dengan proses pendidikan, terdapat konsep *pendidikan sepanjang hayat (PSH)* atau *pendidikan sepanjang raga*, atau juga *pendidikan seumur hidup (long life education)*. Sebenarnya hal ini bukan hal baru, sebab 14 abad yang lalu, Nabi Besar Muhammad Saw. telah mencanangkan dengan haditsnya “*tuntutlah ilmu sejak dalam buaian hingga ke liang lahat.*” (*utlubul ilma minal mahdi ilallahdi*). Itu artinya, pendidikan harus dimulai sejak anak baru dilahirkan hingga ia mati kelak. Konsep ini bermakna pula bahwa tujuan pendidikan untuk membuat persiapan yang berguna di akhirat nanti setelah usai kehidupan di alam fana. Dunia ini adalah buku yang paling besar dan lengkap yang tidak akan habis dikaji untuk difahami dan diambil manfaatnya sepanjang hayat. Itulah pula kiranya wahyu pertama yang diterima Nabi untuk membaca/iqro (= belajar). Belajar di sini sangat luas cakupannya, yaitu mempelajari ayat-ayat Alloh berupa Al-Qur’an, dan kauniah berupa alam semesta (jagat raya) dengan segala isi dan permasalahannya.

Yang harus dicatat, bahwa pendidikan itu tidak identik dengan persekolahan saja, sehingga PSH merupakan proses yang berlangsung sepanjang hidup melalui berbagai cara sehingga menembus batas-batas kelembagaan, pengelolaan, dan program yang telah berabad-abad mendesakkan diri pada sistem pendidikan. Cropley (1967) mendefinisikan pendidikan sepanjang hayat sebagai “*tujuan atau ide formal untuk pengorganisasian dan penstrukturan pengalaman pendidikan. Pengorganisasiannya dan penstrukturan ini diperluas mengikuti seluruh rentangan usia, dari manusia yang paling muda sampai paling tua.*” Jadi, PSH bukan suatu sistem pendidikan yang berstruktur, melainkan suatu prinsip yang menjadi dasar yang menjiwai seluruh organisasi sistem pendidikan yang ada. John Dewey, seorang ahli

filsafat dan pendidikan dari Amerika Serikat (1859-1952), menaruh keyakinan bahwa yang pokok dalam pendidikan adalah kegiatan anak itu sendiri. Kegiatan itu merupakan manifestasi dari kehidupan. Tidak ada kehidupan tanpa kegiatan!

Ciri-ciri PSH dapat dikemukakan sebagai berikut (Umar T., 2005:48-49) :

1. Menghilangkan tembok pemisah antara sekolah dengan lingkungan kehidupan nyata di luar sekolah.
2. Menempatkan kegiatan belajar sebagai bagian terpadu dari proses hidup yang berkesinambungan, sedangkan “bersekolah” hanya merupakan sebagian kecil dari keseluruhan proses belajar yang dialami seseorang semasa hidupnya.
3. Lebih mengutamakan pembekalan sikap dan metode daripada isi pendidikan. Jadi, bukan masalah apa yang harus dipecahkan, melainkan bekal dasar apa, dan cara pemecahan yang bagaimana yang harus disiapkan.
4. Menempatkan peserta didik sebagai individu yang menjadi pelaku utama di dalam proses pendidikan, yang mengarah pada pendidikan diri sendiri (*self education*), autodidak yang aktif kreatif, tekun, bebas dan bertanggung jawab, tabah, tahan bantingan, dan yang sejalan dengan penciptaan masyarakat gemar belajar (*learning*).

Di samping ciri-ciri tersebut di atas, PSH perlu digalakkan, karena :

1. Pada hakikatnya belajar berlangsung sepanjang hidup.
2. Sekolah tradisional tidak dapat memberikan bekal kerja yang coraknya semakin tidak menentu dan cepat berubah.
3. Pendidikan masa balita (di bawah lima tahun) punya peranan penting sebagai fondasi pembentukan kepribadian dan bagi aktualisasi diri. Sekolah tidak dapat mengisi pendidikan di masa balita ini. Catatan : Sekarang ada PAUD (Pendidikan Usia Dini) yang pesertanya boleh di bawah umur lima tahun.
4. Sekolah tradisional mengganggu pemerataan keadilan untuk memperoleh kesempatan berpendidikan.
5. Biaya penyelenggaraan sekolah tradisional sangat mahal.

Pengelolaan termasuk di dalamnya penyelenggaraan. Berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan, prinsipnya menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 adalah :

1. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
2. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
3. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
4. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
5. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung (calistung) bagi segenap warga masyarakat.

Proses pendidikan melibatkan banyak hal yang meliputi unsur-unsur pendidikan, yaitu :

1. Subyek yang dibimbing (*peserta didik*).
2. Orang yang membimbing (*pendidik*).
3. Interaksi antara peserta didik dengan pendidik (*interaksi edukatif*).
4. Ke arah mana bimbingan ditujukan (*tujuan pendidikan*).
5. Pengaruh yang diberikan dalam bimbingan (*materi pendidikan*).
6. Cara yang digunakan dalam bimbingan (*alat dan metode*).
7. Tempat di mana peristiwa bimbingan berlangsung (*lingkungan pendidikan*).

Berkaitan dengan *peserta didik* dan *pendidik*, di bawah ini dijelaskan sebagai berikut :

1. Peserta Didik :

Peserta didik berstatus sebagai subyek didik, dan tanpa memandang usia. Sebagai subyek, dia adalah pribadi yang mempunyai ciri khas dan otonom yang ingin diakui eksistensinya (keberadaannya). Dia ingin mengembangkan diri secara terus-menerus guna memecahkan masalah-masalah hidup yang dijumpai sepanjang hidupnya. Peserta didik mengalami pendidikannya dalam tiga lingkungan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Karena itu yang bertanggung jawab terhadap pendidikan adalah orang tua, guru, pemimpin program pembelajaran dan pelatihan,

serta masyarakat/organisasi. Ciri khas peserta didik yang perlu difahami oleh pendidik adalah :

- a. Individu yang memiliki potensi fisik dan psikis yang khas, sehingga merupakan insan yang unik.
- b. Individu yang sedang berkembang.
- c. Individu yang membutuhkan bimbingan individual dan perlakuan manusiawi.
- d. Individu yang memiliki kemampuan untuk mandiri.

2. Pendidik :

Pendidik adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dengan sasaran peserta didik. Hal yang perlu mendapat perhatian dari pendidik adalah soal *kewibawaan*. Kewibawaan adalah suatu pancaran batin atau kekuasaan batin mendidik, bukan penggunaan kekuasaan lahir yang semata-mata didasarkan pada unsur wewenang jabatan. Kewibawaan akan menimbulkan pada pihak lain (peserta didik) sikap mengakui, menerima, dan menuruti dengan penuh pengertian atas kekuasaan tersebut.

Kewibawaan mendidik ini hanya dimiliki oleh mereka yang sudah “dewasa”. Sengaja kata dewasa memakai tanda trema karena bukan hanya dilihat dari aspek usia. Dewasa di sini maksudnya rohani yang ditopang oleh jasmani. Kedewasaan rohani tercapai jika individu telah memiliki cita-cita dan pandangan hidup yang tetap. Cita-cita dan pandangan hidup ini terjalin di dalam dirinya untuk selanjutnya diwujudkan dalam bentuk tingkah laku dan perbuatan. Kedewasaan jasmani tercapai jika individu mencapai puncak perkembangan fisik yang optimal, atau telah mencapai proporsi yang sudah mantap.

Sebagai pendidik, realisasi cita-cita dan pandangan hidupnya itu secara nyata berlangsung melalui aktivitas statusnya sebagai orang tua maupun pendidik. Jadi, dia adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan segenap aktivitas yang bertalian dengan statusnya. Bertanggung jawab, maksudnya mampu untuk menyatakan diri dengan norma-norma hidup serta mendukungnya. Pendidik mempunyai tugas untuk mentransformasikan norma-norma itu kepada peserta didik. Pendidik akan memiliki kewibawaan di mata peserta didik jika yang dibutuhkan peserta didik,

antara lain perlindungan, bantuan, bimbingan, dan rasa kasih sayang yang ikhlas, terpenuhi.

Kewibawaan pendidik itu harus dibina dan dirawat karena bisa saja memudar. Menurut Langeveld (1955:42-44), pembinaan kewibawaan itu meliputi *kepercayaan*, *kasih sayang*, dan *kemampuan*. Kepercayaan di sini maksudnya pendidik harus percaya dirinya bisa mendidik dan harus percaya pula bahwa peserta didik dapat dididik. Sedangkan kasih sayang mengandung dua makna, yaitu *penyerahan diri* kepada yang disayangi, dan *pengendalian* terhadap yang disayangi. Dengan penyerahan diri, maka akan timbul kesediaan berkorban yang bentuk konkritnya berupa “pengabdian” dalam bekerja. Dan dengan pengendalian terhadap yang disayangi, maka peserta didik tidak akan berbuat yang merugikan dirinya. Sementara kemampuan mendidik dapat dikembangkan melalui berbagai cara, antara lain pengkajian terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi terutama yang berkaitan dengan kependidikan, mengikuti pelatihan, sarasehan atau seminar pendidikan, mengambil manfaat dari pengalaman kerja, dll.

BAB II

LEMBAGA DAN SISTEM PENDIDIKAN

A. LEMBAGA PENDIDIKAN

1. Tiga Lembaga Pendidikan.

Berbicara mengenai lembaga pendidikan sebagai wadah berlangsungnya proses pendidikan, maka akan menyangkut masalah lingkungan di mana pendidikan itu dilaksanakan. Lingkungan dimaksud tidak lain adalah keluarga, sekolah, dan masyarakat. Tokoh dan pejuang pendidikan, yaitu Suryadi Suryaningrat yang lebih dikenal dengan Ki Hajar Dewantoro (Hasbullah, 1997: 37) menganggap ketiga lembaga itu (keluarga, sekolah, dan masyarakat) sebagai “Tri Pusat Pendidikan”, maksudnya, tiga pusat pendidikan yang secara bertahap dan terpadu mengemban suatu tanggung jawab pendidikan bagi generasi mudanya. Ketiga penanggung jawab pendidikan dimaksud dituntut melaksanakan kerjasama baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan saling menopang kegiatan yang sama secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Oleh karenanya perbuatan mendidik yang dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya, juga harus diperkuat oleh sekolah, dan dikontrol oleh masyarakat sebagai lingkungan sosial anak.

a. *Lembaga Pendidikan Keluarga.*

Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama, karena dalam keluarga inilah anak pertama-tama mendapatkan pendidikan dan bimbingan. Keluarga disebut juga lingkungan yang utama, mengingat sebagian besar dari kehidupan anak adalah di dalam keluarga, sehingga pendidikan yang paling banyak diterima oleh anak-anak juga di dalam keluarga. Tugas utama keluarga dalam pendidikan adalah sebagai peletak dasar pendidikan akhlak (moral, budi pekerti) dan pandangan kehidupan keagamaan. Sifat dan tabiat anak sebagian besar mengikuti kedua orang tua atau anggota keluarga yang lain di rumah.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pun dinyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria

dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera, berdasarkan Ketuhanan YME. (Istilah ajaran Islam, keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah). Anak yang lahir dari perkawinan ini adalah anak yang sah dan menjadi hak serta tanggung jawab kedua orang tuanya memelihara dan mendidiknya dengan sebaik-baiknya. Kewajiban kedua orang tua mendidik anak ini terus berlanjut sampai dia dikawinkan atau dapat berdiri sendiri. Malahan jika perkawinan anak karena sesuatu dan lain hal putus, maka tanggung jawab pendidikannya kembali kepada orang tuanya sebagaimana Pasal 45 Ayat (2) UU dimaksud.

Keluarga merupakan wadah bagi anak dalam proses belajar untuk membentuk pribadi atau diri sendiri dan mengembangkan fungsi sosialnya, termasuk sikap untuk berbakti kepada Tuhan YME sebagai perwujudan nilai hidup yang tertinggi.

1) *Fungsi dan Peranan Pendidikan Keluarga :*

a) *Pengalaman Pertama Masa Kanak-kanak :*

- Lembaga pendidikan keluarga memberikan pengalaman pertama bagi anak mengenal hidupnya;
- Suasana pendidikan keluarga sangat penting diperhatikan, sebab dari sinilah pertumbuhan fisik dan perkembangan serta keseimbangan jiwa selanjutnya ditentukan;
- Kewajiban orang tua tidak hanya sekedar memelihara eksistensi anak, tetapi juga memberikan pendidikannya sebagai pribadi atau individu yang akan tumbuh dan berkembang. Dalam hal ini mengingat hubungan orang tua dengan anak bersifat alami dan kodrati;
- Seorang anak manusia dilahirkan suci tetapi dalam keadaan tidak berdaya, tidak mampu berbuat apa-apa, tidak dapat menolong dirinya sendiri, dan penuh ketergantungan dari bantuan orang lain (kedua orang tua dan orang lain). Bahkan dalam salah satu hadits Nabi Saw. dikatakan, "*Kullu mauludin yuuladu 'alal firoti, faabawaahu yuhawwidaanihi au yunashiraanihi au yumajjisaanihi*" (Setiap anak dilahirkan dalam keadaan

suci, maka orang tuanyalah yang dapat menjadikannya Yahudi, Nashrani, atau Majusi). Karena itu tanggung jawab orang tua sangat besar dan berat terhadap keberlangsungan pendidikan anak. Dalam kaitan ini terdapat istilah *tabularasa*, yaitu teori yang dikemukakan oleh John Lock, seorang tokoh aliran empirisme yang menyatakan bahwa anak dilahirkan dalam keadaan suci bagai meja lilin warna putih. Maka lingkunganlah yang akan menentukan ke mana anak itu dibawa.

- Dengan demikian terserah kepada orang tua untuk memberikan corak warna yang dikehendaki terhadap anaknya. Kehidupan anak benar-benar sangat bergantung pada kedua orang tuanya. Orang tua adalah tempat menggantungkan diri bagi anak secara wajar.

b) Menjamin Kehidupan Emosional Anak.

- Suasana di dalam keluarga merupakan suasana yang diliputi rasa cinta dan simpati yang sewajarnya, suasana yang aman dan tenteram, suasana saling percaya-mempercayai;
- Melalui pendidikan keluarga kehidupan emosional atau kebutuhan rasa kasih sayang dapat dipenuhi atau dapat berkembang dengan baik;
- Kehidupan emosional merupakan salah satu faktor yang terpenting dalam membentuk pribadi seseorang.
- Hasil penelitian membuktikan bahwa ketika rasa kasih sayang tidak didapatkan oleh anak, maka akan terjadi kelainan-kelainan dalam perkembangan kepribadiannya, seperti misalnya : Anak-anak yang hidup dalam suasana rumah tangga orang tuanya yang berantakan, anak-anak yang sejak kecil dipelihara di rumah yatim piatu, panti asuhan atau rumah sakit, dll. Tidak terpenuhinya kehangatan dan rasa kasih sayang ini mengakibatkan antara lain, anak menjadi pendiam, pemalu, rendah diri, tidak percaya diri, atau bisa juga menjadi agresif, nekad, dll. Jika tidak terkendali malahan bisa terjadi kenakalan remaja, tindak kejahatan/kriminal, dll.

c) Menanamkan Dasar Pendidikan Moral.

Dalam rangka menanamkan nilai-nilai, etika, moral, dan norma-norma,

hendaklah orang tua dalam berbicara, bersikap dan berperilaku memberikan contoh teladan kepada anak-anaknya, selain rasa cinta. Memang bicara, sikap, dan perilaku orang tua akan ditiru oleh anak, lebih-lebih ketika anak dan remaja masih berproses dalam mencari jati dirinya. Ki Hajar Dewantoro pernah menyatakan bahwa rasa cinta, rasa bersatu, dan lain-lain perasaan dan keadaan jiwa pada umumnya, sangat berfaedah untuk berlangsungnya pendidikan, teristimewa pendidikan budi pekerti, terdapatlah di dalam hidup keluarga dalam sifat yang kuat dan murni, sehingga tak dapat pusat-pusat pendidikan lainnya menyamainya. (Soewarno, 1985: 69).

Berbicara, tingkah laku, dan cara berbuat orang tua akan ditiru oleh anak. Teladan ini melahirkan gejala identifikasi positif, yakni penyamaan diri dengan orang yang ditiru, dan hal ini penting sekali dalam rangka pembentukan kepribadian. Segala nilai yang dikenal anak akan melekat pada orang-orang yang disenangi dan dikaguminya, atau dijadikan idola. Melalui proses inilah anak akan mengenal nilai dan moral.

d) Memberikan Dasar Pendidikan Sosial.

Keluarga adalah basis yang sangat penting dalam meletakkan dasar-dasar pendidikan sosial anak. Keluarga merupakan lembaga sosial resmi yang terkecil, yang paling tidak terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Lewat kehidupan keluarga yang kompak, saling bantu dan tolong-menolong di antara anggota keluarga maupun dengan tetangga dekat, akan menanamkan kesadaran sosial, dan benih-benih kesadaran ini perlu dipupuk sedini mungkin. Aktivitas yang dilakukan antara lain menjaga kedamaian, ketertiban, kebersihan, dan keserasian dalam segala hal di lingkungan rumah.

e) Meletakkan Dasar-dasar Keagamaan.

Keluarga sebagai lembaga pendidikan pertama dan utama, di samping menentukan dalam menanamkan dasar-dasar nilai dan moralitas, juga berperan besar dalam proses transformasi dan internalisasi nilai-nilai keagamaan ke dalam pribadi anak. Masa anak-anak yang sedang tumbuh dan berkembang mencari jati diri, adalah masa yang paling baik untuk me-

resapkan dasar-dasar hidup beragama dalam keluarga. Anak-anak harus dibiasakan mengikuti peribadatan di masjid, mendengarkan khutbah, ceramah-ceramah atau pengajian. Demikian pula keterlibatan dalam aktivitas lain seperti pada acara-acara peringatan hari-hari besar keagamaan khususnya Islam (PHBI). Kehidupan dalam keluarga hendaknya memberikan kondisi kepada anak-anak untuk mengalami suasana kehidupan keagamaan. Kegiatan di kampung-kampung dulu, yaitu maghrib mengaji, atau mengikuti sekolah-sekolah agama siang/sore hari bagi anak-anak yang bersekolah di sekolah umum, adalah kegiatan orang tua yang sangat bijak. Demikian juga memasukkan anak-anak di PAUD atau TK yang berbasis agama, misalnya Taman Pendidikan A-Qur'an sebelum ke SD. Atau mungkin juga belajar di sekolah umum sambil mengaji di pesantren atau tempat pengajian yang dekat. Bisa juga belajarnya di pesantren terpadu yang pelajaran agama dan pelajaran umumnya seimbang seperti di Madrosah Diniah (MD), atau Madrosah Ibtida'iyah (MI), dan seterusnya ke Madrosah Tsanawiyah (MTs), Madrosah Aliyah (MA) atau Mu'alimin, dll.

2) *Tanggung Jawab Keluarga.*

Tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan anak-anaknya meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a) Motivasi atau dorongan cinta kasih yang menjiwai hubungan orang tua-anak. Kasih sayang dan kehangatan orang tua yang ikhlas dan murni akan mendorong sikap dan tindakan rela menerima tanggung jawab mengorbankan hidupnya dalam memberikan bantuan kepada anak;
- b) Tanggung jawab moral meliputi nilai-nilai agama atau spiritualitas. Hal ini dilakukan dimulai dengan pengenalan dan pembiasaan, yang terus berlanjut sampai internalisasinya. Pada usia anak antara 3 – 6 tahun, seorang anak akan memiliki pengalaman agama yang asli dan terus akan diingat selamanya;
- c) Tanggung jawab sosial yang merupakan perwujudan kesadaran tanggung jawab kekeluargaan yang dibina oleh darah, keturunan, dan kesatuan keya-

kinan. Hal ini akan berlanjut akan menjadi tanggung jawab masyarakat, bangsa, dan negara;

- d) Memelihara dan membesarkan anak. Tanggung jawab ini merupakan dorongan alami karena anak memerlukan makanan, minuman, perawatan kesehatan, dll. sehingga secara jasmaniah tumbuh dengan baik;
- e) Memberikan pendidikan dan pembinaan dengan berbagai pengajaran ilmu pengetahuan dan latihan keterampilan yang berguna bagi perkembangan kehidupan anak kelak, sehingga manakala dewasa akan mampu mandiri.

b. Lembaga Pendidikan Sekolah.

Lembaga pendidikan sekolah adalah kelanjutan dari pendidikan keluarga. Kehidupan di sekolah merupakan jembatan bagi anak yang menghubungkan kehidupan dalam keluarga dengan kehidupan dalam masyarakat kelak. Pendidikan sekolah adalah pendidikan yang diperoleh seseorang di sekolah secara teratur, sistematis, berjenjang, dan dengan mengikuti syarat-syarat yang jelas dan ketat. Beberapa karakteristik proses pendidikan yang berlangsung di sekolah menurut Wens Tanlain, dkk. (1989:44), adalah :

- 1) Diselenggarakan secara khusus dan dibagi atas jenjang yang memiliki hubungan hierarkis;
- 2) Usia anak didik di suatu jenjang pendidikan relatif homogen;
- 3) Waktu pendidikan relatif lama sesuai dengan program pendidikan yang harus diselesaikan;
- 4) Materi atau materi pendidikan lebih banyak bersifat akademis dan umum;
- 5) Adanya penekanan tentang kualitas pendidikan sebagai jawaban terhadap kebutuhan di masa yang akan datang.

Sebagai lembaga pendidikan formal, sekolah yang lahir dan berkembang secara efektif dan efisien dari dan oleh masyarakat, merupakan perangkat yang wajib memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam mendidik warga negara, sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

1) *Tanggung Jawab Sekolah.*

- a) Tanggung jawab formal kelembagaan sesuai dengan fungsi dan tujuan yang ditetapkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dengan seluruh aturan pelaksanaannya);
- b) Tanggung jawab keilmuan berdasarkan bentuk, isi, tujuan, dan tingkat pendidikan yang dipercayakan oleh masyarakat kepadanya;
- c) Tanggung jawab fungsional, ialah tanggung jawab profesional pengelola dan pelaksana pendidikan sesuai dengan jabatannya. Tanggung jawab ini merupakan pelimpahan tanggung jawab dan kepercayaan orang tua/masyarakat kepada sekolah dan para guru.

2) *Sifat Lembaga Pendidikan Sekolah.*

- a) Adalah pendidikan kedua setelah keluarga. Dalam sebuah keluarga tidak selamanya tersedia kesempatan dan kesanggupan memberikan kepada anaknya mengingat keterbatasan-keterbatasan a.l. sarana prasarana, waktu, keahlian, dll. sehingga keluarga menyerahkan tanggung jawabnya kepada sekolah. Di sekolah anak-anak akan memperoleh kecakapan-kecakapan seperti membaca, menulis, berhitung, menggambar, serta ilmu-ilmu lainnya. Tentu saja termasuk di dalamnya hal-hal yang menyangkut pembentukan kepribadian melalui pelajaran agama, budi pekerti, pendidikan moral Pancasila, dan sekarang tengah hangat dibicarakan pendidikan karakter.
- b) Lembaga pendidikan formal. Dalam hal ini karena sekolah memiliki bentuk yang jelas, artinya terdapat program yang telah direncanakan secara teratur dan sistematis, misalnya secara resmi ditetapkan oleh pemerintah, ada kurikulumnya, waktu belajarnya, dll.
- c) Lembaga pendidikan yang tidak bersifat kodrati, karena didirikan tidak karena adanya hubungan darah antara guru dengan siswa seperti halnya di keluarga, tetapi berdasarkan hubungan yang bersifat kedinasan.

3) *Peranan dan Fungsi Sekolah.*

Peranan sekolah sebagai lembaga yang membantu keluarga, adalah mendidik dan mengajar siswa. Mendidik dalam arti memperbaiki dan memperhalus bahasa dan tingkah laku siswa yang dibawa dari keluarganya, sedangkan mengajar adalah transfer atau proses pemberian ilmu pengetahuannya. Melalui kurikulum, peranan sekolah antara lain :

- a) Siswa atau anak didik belajar bergaul sesama teman-temannya, antara guru dengan anak didik, dan antara anak didik dengan orang-orang yang bukan guru, misalnya petugas tata usaha, dll.
- b) Siswa belajar menaati peraturan-peraturan sekolah;
- c) Mempersiapkan siswa menjadi anggota masyarakat yang berguna bagi bangsa dan negara, dll.

Jadi, dapat dikatakan bahwa sebagian besar pembentukan kecerdasan pikiran (kognitif), sikap dan tingkah laku (afektif), dan keterampilan teknis (psikomotorik) dilaksanakan di sekolah. Demikianlah, maka pengaruh pendidikan di sekolah sangat penting.

Fungsi sekolah menurut Suwarno (1981:69) adalah sebagai berikut :

- a) Mengembangkan kecerdasan pikiran dan memberikan pengetahuan.

Fungsi ini adalah pendidikan intelektual, di samping tentu saja tidak terlepas dengan pengembangan kepribadian peserta didik. Fungsi sekolah ini dapat disamakan dengan fungsi keluarga dalam pendidikan moral;

- b) Spesialisasi.

Dengan semakin meningkatnya kemajuan masyarakat, maka terjadi diferensiasi dalam tugas kemasyarakatan dan lembaga sosial. Dalam hal ini sekolah berfungsi sebagai lembaga sosial yang spesialisasinya dalam bidang pendidikan dan pengajaran;

- c) Efisiensi.

Sekolah sebagai lembaga sosial yang spesialisasinya di bidang pendidikan dan pengajaran, maka pelaksanaan pendidikan dan pengajaran dalam masyarakat menjadi efisien, karena :

- Jika tidak ada sekolah, dan tugas pendidikan harus dilaksanakan oleh

orang tua, tidak akan efisien mengingat orang tua terlalu sibuk padahal tugas lainnya cukup banyak, di samping banyak di antaranya yang tidak akan mampu melaksanakan pendidikan dimaksud;

- Pendidikan di sekolah dilaksanakan dalam program tertentu dan sistematis;
- Sekolah dapat mendidik anak-anak dalam jumlah yang banyak sekaligus.

d) Sosialisasi.

Sekolah mempunyai peranan yang penting dalam proses sosialisasi, yaitu membantu perkembangan individu menjadi makhluk sosial yang dapat beradaptasi dengan baik di dalam masyarakat. Pada akhirnya memang seseorang itu akan berada dalam masyarakat;

e) Konservasi dan transmisi kultural.

Sekolah mempunyai peranan memelihara (konservasi) warisan budaya yang hidup dalam masyarakat dengan jalan menyampaikan warisan kebudayaan tadi (transmisi cultural) kepada generasi muda, yang tidak lain anak didik;

f) Transisi dari rumah ke masyarakat.

Tatkala berada di lingkungan keluarga, kehidupan anak serba bergantung diri pada orang tua, maka dalam memasuki sekolah, anak mendapat kesempatan untuk berlatih mandiri dan tanggung jawab sebagai persiapan sebelum ke masyarakat.

4) *Macam-macam Sekolah.*

a) Ditinjau dari Segi Penyelenggara.

Ditinjau dari segi penyelenggara atau yang mengusahakannya, maka sekolah terdiri dari :

- *Sekolah Negeri*, yaitu yang diusahakan oleh pemerintah, baik dalam hal pengadaan fasilitas, pembiayaan, maupun tenaga kependidikannya. Penyelenggaraan pendidikan ini diamanatkan dalam Pasal 31 UUD 1945 yang dijabarkan lebih lanjut dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Pendidikan persekolahan dimaksud pada umumnya diseleng-

garakan oleh Departemen (sekarang Kementerian) Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk sekolah-sekolah umum, dan Kementerian Agama (Kemenag) untuk sekolah-sekolah yang berciri khas agama Islam. Namun untuk tingkat perguruan tinggi/akademi (PTN) diselenggarakan juga oleh Kementerian lain yang bersifat kedinasan untuk mempersiapkan staf atau tenaga/pegawai di kementeriannya, misalnya AKABRI oleh Kemenhan, AKPOL dan PTIK oleh Polri, AKPEL oleh Kemenhub, IPDN oleh Kemendagri, dsb.

- *Sekolah Swasta*, yaitu yang diusahakan oleh selain pemerintah, dalam hal ini badan-badan atau yayasan swasta. Dilihat dari statusnya, sekolah swasta ini terdiri dari yang *tercatat*, *terdaftar*, *diakui*, dan *disamakan*. Untuk pendidikan tinggi (PTS) menggunakan sistem akreditasi, sehingga memungkinkan PTS lebih leluasa mengembangkan lembaga pendidikannya dengan standar-standar yang telah diatur dalam ketentuan yang berlaku.

b) Ditinjau dari Segi Tingkatan.

Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Pendidikan Dasar, terdiri dari :

- Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
- SMP/MTs.

Pendidikan Menengah, terdiri dari :

- SMA dan MA;
- SMK dan MAK.

Pendidikan Tinggi, terdiri dari :

- Akademi;
- Institut;
- Sekolah Tinggi;
- Universitas.

Untuk mempersiapkan anak-anak memasuki pendidikan dasar, diselenggarakan juga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Tamak Kanak-kanak

(TK) atau Roudlotul Atfal.

c) Ditinjau dari Segi Sifatnya.

- *Sekolah Umum*, yaitu pendidikan yang belum mempersiapkan anak dalam spesialisasi pada bidang pekerjaan tertentu. Sekolah ini penekanannya adalah sebagai persiapan mengikuti pendidikan yang lebih tinggi tingkatannya. Termasuk dalam hal ini adalah SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA.
- *Sekolah Kejuruan*, yaitu pendidikan yang mempersiapkan anak untuk menguasai keahlian-keahlian tertentu, seperti : SMEA, STM, SPMA (sekarang SMK) dan MAK.

5) *Kontribusi (Sumbangan) Kas Sekolah sebagai Lembaga Pendidikan.*

Sebagaimana dimaklumi, bahwa sekolah merupakan lembaga pendidikan kedua setelah keluarga, yang tidak bersifat kodrati. Namun demikian, sekolah berperan besar dalam pengembangan berbagai aspek dari anak didik, lebih-lebih dengan kondisi seperti sekarang, yaitu dalam rangka pengembangan kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian, sekolah menjadi ujung tombak dan memiliki peran yang sangat strategis. Beberapa kontribusi sekolah bagi pendidikan anak di antaranya :

- a) Sekolah melaksanakan tugas mendidik, mengajar, dan memperbaiki, memperluas tingkah laku anak didik yang dibawa dari keluarga;
- b) Sekolah mendidik dan mengajar anak didik menjadi pribadi yang dewasa susila, sekaligus warga negara susila;
- c) Sekolah mendidik dan mengajar anak didik menerima dan memiliki kebudayaan bangsa;
- d) Lewat bidang pengajaran, sekolah membantu anak mengembangkan kemampuan intelektual dan keterampilan kerja, sehingga anak didik memiliki keahlian bekerja untuk bekal hidupnya, serta membangun negara dan bangsa.

c. Lembaga Pendidikan Masyarakat.

Masyarakat adalah sekumpulan orang yang menempati suatu daerah, diikat oleh pengalaman-pengalaman yang sama, memiliki sejumlah persesuaian dan sadar akan kesatuannya, serta dapat bertindak bersama untuk mencukupi krisis kehidupannya. (Hasbullah, 1997:55). Masyarakat juga dapat diartikan sebagai satu bentuk tata kehidupan sosial dengan tata nilai dan tata budaya sendiri. Dalam pengertian ini masyarakat adalah wadah dan wahana pendidikan, medan kehidupan manusia yang majemuk (suku, agama, kegiatan kerja, tingkat pendidikan, tingkat sosial-ekonomi, dsb.). (Moh. Nor Syam, 1988:15).

Dalam konteks pendidikan, masyarakat adalah lingkungan ketiga setelah keluarga dan sekolah. Setelah beberapa waktu lepas dari asuhan keluarga dan berada di luar pendidikan sekolah, maka pengaruh pendidikan di lingkungan masyarakat lebih luas. Corak ragam pendidikan yang dialami seseorang dalam masyarakat sangat banyak, meliputi segala bidang di antaranya pembentukan kebiasaan-kebiasaan, pengertian-pengertian (pengetahuan), sikap dan minat, serta pembentukan kepribadian (kesusilaan) dan keagamaan.

Pendidikan dalam masyarakat ini dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 disebut dengan jalur pendidikan nonformal, yang bersifat fungsional dan praktis, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerja peserta didik yang berguna dalam usaha perbaikan penghidupannya. Ciri-ciri pendidikan masyarakat ini adalah :

- 1) Diselenggarakan dengan sengaja di luar sekolah;
- 2) Peserta didik umumnya yang sudah tidak bersekolah (*drop out*);
- 3) Tidak mengenal jenjang, dan programnya untuk jangka waktu pendek;
- 4) Peserta didik tidak perlu homogen;
- 5) Ada waktu belajar dan metode formal, serta evaluasi yang sistematis;
- 6) Isi pendidikan bersifat praktis dan khusus;
- 7) Keterampilan kerja sangat ditekankan sebagai jawaban terhadap kebutuhan meningkatkan taraf hidup.

1) *Beberapa Istilah Jalur Pendidikan Luar Sekolah :*

a) Pendidikan Sosial.

Merupakan proses yang diusahakan dengan sengaja di dalam masyarakat untuk mendidik individu dalam lingkungan sosial, agar bebas dan bertanggung jawab menjadi pendorong ke arah perubahan dan kemajuan;

b) Pendidikan Masyarakat.

Merupakan pendidikan yang ditujukan kepada orang dewasa, termasuk remaja di luar batas usia tertinggi kewajiban belajar, dan dilakukan di luar lingkungan serta sistem persekolahan resmi;

c) Pendidikan Rakyat.

Adalah tindakan-tindakan atau pengaruh yang kadan mengenai seluruh rakyat, tetapi biasanya khusus mengenai rakyat lapisan bawah;

d) Pendidikan Luar Sekolah.

Disebut juga "*out of school education*", yaitu pendidikan yang dilakukan di luar sistem persekolahan biasa. Penekanannya pada pendidikan yang berlangsung di luar sekolah;

e) Mass Education.

Bahasa Indonesianya adalah pendidikan masyarakat, tetapi berbeda dengan yang no. 2) yang tujuannya memberikan kecakapan baca tulis dan pengetahuan umum untuk dapat mengikuti perkembangan dan kebutuhan hidup sekitar-nya. Samakah dengan PBH (Pemberantasan Buta Hurud) dulu?

f) Adult Education.

Pendidikan orang dewasa dengan mengambil batas usia tertinggi dari masa kewajiban belajar. Ini adalah mengacu pada anak-anak yang tidak tertampung di sekolah dasar yang telah berusia dewasa, dan untuk para drop out;

g) Extension Education.

Adalah salah satu bentuk dari adult education, yaitu pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah biasa, yang khusus dikelola oleh perguruan tinggi untuk menjawab hasrat masyarakat yang ingin masuk dunia univer-

sitas misalnya Universitas Terbuka;

h) Fundamental Education.

Adalah pendidikan yang bertujuan membantu masyarakat untuk mencapai kemajuan sosial-ekonomi, agar mereka dapat menempati posisi yang layak. Sasaran utama pendidikan ini adalah daerah dan masyarakat terpencil dan terbelakang dalam kehidupannya.

2) *Sasaran dan Program Pendidikan Nonformal.*

Dalam perspektif pendidikan seumur hidup (*long life education*), semua orang secara potensial merupakan anak didik dalam berbagai tahap dalam perkembangan hidupnya. Oleh sebab itu peserta didik yang dapat menjadi sasaran pendidikan jalur luar sekolah sangat luas dan bervariasi. Dalam konteks ini, mereka dapat diklasifikasikan ke dalam enam kategori, yang masing-masing berikut prioritas programnya adalah :

a) Buruh dan Petani.

Kaum buruh dan petani merupakan golongan terbesar dari masyarakat Indonesia yang umumnya tingkat pendidikannya sangat rendah bahkan ada yang tidak berpendidikan sama sekali. Pada umumnya mereka hidup dalam suasana tradisional dan kebiasaan hidup yang masih tertinggal. Mereka inilah yang sangat membutuhkan program baca tulis secara fungsional (*functional literacy*). Program pendidikan yang mesti diberikan kepada mereka adalah :

- Pendidikan yang bisa/mampu menolong meningkatkan produktivitas mereka dengan cara mengajarkan berbagai keterampilan dan metode baru seperti bertani, beternak, perikanan dan sejenisnya, yang diharapkan akan meningkatkan hasil pekerjaannya;
- Pendidikan yang memungkinkan mereka mampu memenuhi kewajibannya sebagai warga negara dan kepala keluarga yang baik, sehingga mereka menyadari bahwa pendidikan bagi anak-anak mereka sangat penting;
- Pendidikan yang bisa memanfaatkan waktu senggang mereka secara efektif

tif, terutama dengan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan serta produktif sehingga membawa dampak terhadap kehidupannya yang berarti.

b) Remaja Putus Sekolah.

Para remaja yang menganggur karena tidak mendapatkan pendidikan keterampilan (*under employed*), disebabkan kurangnya bakat dan kemampuannya, memerlukan pendidikan vokasional yang khusus. Dalam upaya mengembangkan kepribadiannya, mereka perlu diberi pendidikan cultural dan kegiatan-kegiatan yang rekreatif dan bersifat remedial. Pendidikan ini harus menarik, merangsang, dan relevan dengan kebutuhan hidupnya.

c) Pekerja yang Berketerampilan.

Program pendidikan untuk para pekerja yang berketerampilan agar mampu menghadapi berbagai tantangan di masa depan, hendaklah yang bersifat kejuruan dan teknik, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang telah mereka miliki. Program pendidikan dimaksud harus mengandung minimal dua tujuan, yaitu :

- Dapat menyelamatkan mereka dari bahaya kekurangan pengetahuan dan keterampilan yang mereka miliki;
- Dapat membuka jalan bagi mereka untuk naik jenjang atau promosi ke kedudukan yang lebih baik.

d) Teknisi dan Profesional.

Golongan teknisi dan profesional pada umumnya menduduki posisi-posisi penting dalam masyarakat, sehingga kemajuan masyarakat sangat bergantung kepada mereka. Agar mereka tetap berperan dan meningkat, maka mereka harus senantiasa memperbarui dan menambah pengetahuan serta keperampilannya;

e) Pemimpin Masyarakat.

Golongan ini termasuk para pemimpin politik (politisi), agama, sosial, dsb. Mereka dituntut mampu mensintesis pengetahuan dari berbagai macam profesi atau keahlian, dan selalu memperbarui sikap dan gagasan yang sesuai dengan kemajuan dan pembangunan. Hal ini mengingat pengetahuan dimaksud tidak didapatkan dari pendidikan formal atau jalur

sekolah;

f) Anggota Masyarakat yang Sudah Tua.

Berhubung dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada era globalisasi ini, bisa jadi banyak pengetahuan yang belum mereka ketahui pada saat masih muda. Oleh karenanya, pendidikan ini merupakan kesempatan yang sangat berharga bagi mereka, walaupun jika dilihat dari segi materi tidak terlalu menguntungkan. Jumlah mereka makin lama makin banyak seiring makin bertambahnya usia harapan hidup dengan derajat kesehatan yang meningkat.

B. SISTEM PENDIDIKAN

1. Pendidikan Sebagai Suatu Sistem.

Istilah sistem berasal dari bahasa Latin “systema” yang berarti sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan. (Fuad Ihsan, 2005:107). Pengertian lain dari sistem adalah keseluruhan yang terdiri dari komponen-komponen (unsur-unsur) yang masing-masing mempunyai fungsi sendiri-sendiri dan satu sama lain saling berhubungan dan bergantung (interdependensi) sehingga membentuk kesatuan yang terpadu. Menurut Depdikbud (1984/1985) dalam Fuad Ihsan (2005:108), setiap sistem mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Tujuan;
- b. Fungsi-fungsi;
- c. Komponen-komponen atau bagian-bagian;
- d. Interaksi atau saling hubungan;
- e. Penggabungan yang menimbulkan jalinan perpaduan;
- f. Proses transformasi;
- g. Umpan balik untuk koreksi;
- h. Daerah batasan dan lingkungan.

Pendidikan merupakan suatu usaha untuk mencapai tujuan pendidikan. Usaha

pendidikan menyangkut tiga unsur pokok, yaitu masukan (*input*), proses (*process*), dan keluaran atau hasil (*output*). Hubungan ketiga unsure tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :



Masukan usaha pendidikan adalah peserta didik (siswa/murid) dengan berbagai ciri-ciri yang ada pada diri mereka (bakat, minat, kemampuan, keadaan jasmani, dll.). Dalam proses pendidikan terkait berbagai hal, seperti tenaga kependidikan (guru, tata usaha, dll.), prasarana (tanah, jalan, gedung, dll.), sarana (meubelair, buku-buku, alat-alat peraga, dll.), pembiayaan, kurikulum, metode mengajar, dsb. Sedangkan hasil pendidikan dapat berupa hasil belajar berupa pengetahuan, sikap, dan keterampilan setelah selesai proses belajar-mengajar tertentu, yang ditandai dengan kelulusan siswa dari lembaga pendidikan atau sekolah tertentu.

Sebagai suatu sistem, pendidikan memiliki ciri-ciri seperti disebutkan di atas, dan lebih lanjut Depdikbud (1979) menjelaskan pula bahwa pendidikan merupakan suatu sistem yang mempunyai unsur-unsur tujuan/sasaran pendidikan, peserta didik, pengelola pendidikan, struktur/jenjang, kurikulum, pembiayaan, dan peralatan/fasilitas. Dijelaskan pula bahwa setiap unsur dalam sistem pendidikan ini saling berkaitan dan pengaruh-mempengaruhi. Kelemahan salah satu unsur dalam sistem tersebut akan mempengaruhi seluruh sistem pendidikan. Oleh karena itu dalam usaha mengembangkan sistem pendidikan, setiap unsur pokok dalam sistem pendidikan dimaksud harus mendapatkan perhatian dan pengembangan yang serius.

P.H. Combs (1982) dalam Fuad Ihsan (2005:111), mengemukakan 12 komponen pendidikan, yaitu :

a. *Tujuan dan Prioritas.*

Fungsi tujuan adalah mengarahkan kegiatan sistem, dan merupakan informasi tentang apa yang hendak dicapai oleh sistem pendidikan dan urutan pelaksanaannya. Contohnya, ada tujuan umum pendidikan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, yaitu tujuan pendidikan nasional, ada tujuan institusional (tujuan tingkat satuan/lembaga pendidikan dan tujuan pro-

gram) seperti S1, S2, S3, ada tujuan kurikuler (mata pelajaran/kuliah), dan tujuan instruksional (umum dan khusus).

b. *Peserta Didik.*

Fungsinya adalah belajar. Peserta didik diharapkan mengalami proses perubahan tingkah laku sesuai dengan tujuan sistem pendidikan. Contohnya, berapa usianya, berapa jumlahnya, bagaimana tingkat perkembangannya, bagaimana pembawaannya, bagaimana motivasinya untuk belajar, bagaimana keadaan sosial-ekonomi orang tuanya, dsb.

c. *Manajemen atau Pengelolaan.*

Fungsinya mengkoordinasikan, mengarahkan, dan menilai system pendidikan. Komponen ini bersumber pada sistem nilai dan cita-cita yang merupakan informasi mengenai pola kepemimpinan dalam pengelolaan sistem pendidikan. Contohnya, pemimpin yang mengelola sistem pendidikan itu bersifat otoriter, demokratis, atau *laissez faire*.

d. *Struktur dan Jadwal Waktu.*

Fungsinya mengatur pembagian waktu dan kegiatan. Contohnya, waktu belajar/perkuliah-an, waktu ujian, wisuda, seminar, KKN, program pengalaman lapangan, dll.

e. *Isi dan Bahan Ajar.*

Fungsinya untuk menggambarkan luas dan dalamnya bahan pelajaran/perkuliah-an yang harus dikuasai peserta didik. Juga mengarahkan dan mempolakan kegiatan-kegiatan dalam proses pendidikan. Contohnya, isi bahan ajar untuk setiap mata pelajaran/kuliah, dan untuk pengalaman lapangan.

f. *Guru dan Pelaksana.*

Fungsinya menyediakan bahan ajar dan menyelenggarakan proses belajar untuk peserta didik. Contohnya, pengalaman dalam mengajar, status resminya guru yang sudah diangkat atau tenaga sukarela, dan tingkat pendidikannya.

g. *Alat Bantu Belajar.*

Fungsinya untuk memungkinkan terjadinya proses pendidikan yang lebih menarik dan bervariasi. Contohnya, film, buku, papan tulis, peta, alat peraga, dsb.

h. *Fasilitas*.

Fungsinya untuk tempat terselenggaranya proses pendidikan. Contohnya, gedung dan laboratorium beserta perlengkapannya.

i. *Teknologi*.

Fungsinya untuk memperlancar dan meningkatkan hasilguna pendidikan. Teknologi di sini maksudnya semua teknik yang digunakan sehingga sistem pendidikan berjalan dengan efektif dan efisien. Contohnya, pola komunikasi satu arah, artinya guru menyampaikan pelajaran dengan berceramah dan peserta didik mendengarkan dan mencatat, atau pola komunikasi timbal balik (dua arah), artinya ada dialog antara guru dengan peserta didik. Pada pola komunikasi timbal balik, peserta didik mempunyai banyak kesempatan untuk bertanya, mengajukan pendapat, bahkan menyanggah, dsb. baik kepada guru maupun kepada sesama peserta didik yang mengadakan tanya jawab/berdiskusi. Di zaman modern sekarang ini guru dapat mengajar dengan menggunakan alat-alat seperti OHP, LCD Proyektor, dll.

j. *Pengawasan Mutu*.

Fungsinya melaksanakan peraturan-peraturan dan standar pendidikan. Contohnya, peraturan tentang penerimaan anak/peserta didik dan staf pengajar, peraturan tata tertib sekolah, ujian, dan penilaian, dsb.

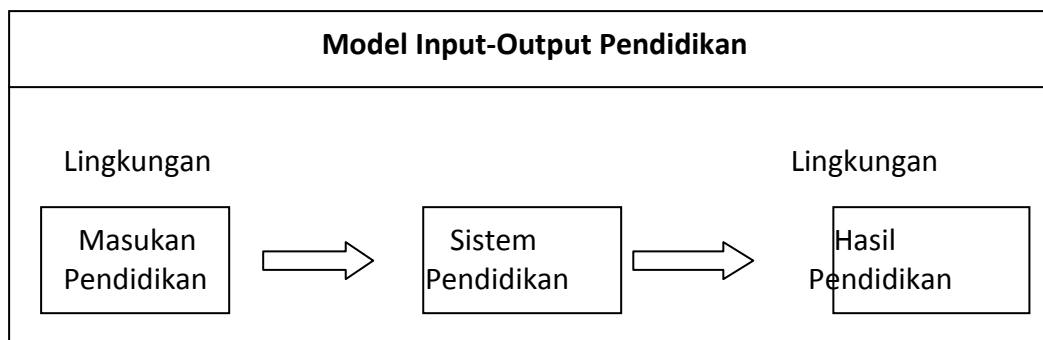
k. *Penelitian*.

Fungsinya untuk memperbaiki dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan kinerja (penampilan) sistem pendidikan. Contohnya, dulu bangsa Indonesia belum mampu membuat kapal terbang dan mobil, tetapi sekarang sudah pandai, a.l. melalui PT. PAL, PT. DI. Kemudian sebelum 1980-an kebanyakan perguruan tinggi belum melaksanakan sistem Satuan Kredit Semester (SKS), sekarang hampir seluruhnya sudah melaksanakan, dsb.

l. *Pembiayaan*.

Fungsinya melancarkan proses pendidikan dan menjadi petunjuk tentang tingkat efisiensi sistem pendidikan. Contohnya, sekarang biaya pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara keluarga (orang tua siswa), pemerintah, dan masyarakat.

Pendidikan sebagai suatu sistem dapat digambarkan dalam bentuk model dasar sebagai berikut.



Sumber : Fuad Ihsan (2005:114).

2. Pengertian Pendidikan Nasional.

Sunarya (1969) mengartikan pendidikan nasional adalah suatu sistem pendidikan yang berdiri di atas landasan dan dijiwai oleh falsafah hidup suatu bangsa dan tujuannya bersifat mengabdikan kepada kepentingan dan cita-cita nasional bangsa tersebut. Sementara Depdikbud (1976) merumuskan bahwa pendidikan nasional ialah suatu usaha untuk membimbing para warga negara Indonesia menjadi Pancasila, yang berpribadi, berdasar akan Ketuhanan berkesadaran masyarakat dan mampu membudayakan alam sekitar.

Adapun pengertian pendidikan nasional berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Sedangkan sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

3. Pendidikan Nasional sebagai Suatu Sistem.

Sebagai suatu sistem, pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Dasar atau landasan pendidikan nasional adalah Pancasila dan UUD 1945. Pendidik-

an nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dalam rangka mewujudkan dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional sebagai suatu sistem tersebut di atas, maka prinsip penyelenggaraannya adalah :

- a. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa;
- b. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna;
- c. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat;
- d. Pendidikan diselenggarakan dengan member keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran;
- e. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat;
- f. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peranserta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Zahar Idris (1987) mengemukakan bahwa pendidikan nasional sebagai suatu sistem adalah karya manusia yang terdiri dari komponen-komponen yang mempunyai hubungan fungsional dalam rangka membantu terjadinya proses transformasi atau perubahan tingkah laku seseorang sesuai dengan tujuan nasional seperti tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam rangka mencapai tujuan nasional itu, pendidikan merupakan salah satu sistem di samping sistem-sistem lainnya seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, pertahanan, keamanan dan agama. Sementara itu Reja Mudyahardjo dan Waini Rasyidin mengemukakan bahwa pendidikan nasional Indonesia merupakan sistem sosial dan salah satu sektor dalam

keseluruhan kehidupan bangsa yang sedang membangun. Dan menurut Katz dan Kahn, sistem sosial merupakan sebuah kesatuan peristiwa atau kejadian yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai suatu hasil yang diharapkan. Sebagai sistem sosial, pendidikan merupakan sistem terbuka, yaitu sistem yang memperoleh masukan dari lingkungan dan memberikan hasil transformasinya kepada lingkungan juga.

Pendidikan dengan sistem terbuka adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan (*multi entry-multi exit system*). Peserta didik dapat belajar sambil bekerja, atau mengambil program-program pendidikan pada jenis dan jalur pendidikan yang berbeda secara terpadu dan berkelanjutan melalui pembelajaran tatap muka atau jarak jauh. Pendidikan multi makna adalah proses pendidikan yang diselenggarakan dengan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, pembentukan watak dan kepribadian, serta berbagai kecakapan hidup.

C. SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

1. Dasar, Fungsi, dan Tujuan Pendidikan Nasional.

Berdasarkan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan bahwa :

- a. Dasar pendidikan nasional adalah Pancasila dan UUD 1945;
- b. Fungsi pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
- c. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

2. Pengelolaan Sistem Pendidikan Nasional.

Pengelolaan sistem pendidikan nasional adalah sebagai berikut :

- a. Pengelolaan sistem pendidikan nasional merupakan tanggung jawab Menteri (Mendikbud);
- b. Pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional;
- c. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional;
- d. Pemerintah Daerah Provinsi melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas daerah kabupaten/kota untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah;
- e. Pemerintah Kabupaten/Kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal;
- f. Perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya;
- g. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan pendidikan tersebut di atas (a s/d f), diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- h. Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah;
- i. Pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan;
- j. Ketentuan mengenai pengelolaan satuan pendidikan tersebut pada huruf h dan i diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah;
- k. Pengelolaan satuan pendidikan nonformal dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat;
- l. Ketentuan mengenai pengelolaan satuan pendidikan nonformal diatur dengan Peraturan Pemerintah.

3. Visi, Misi, dan Strategi Sistem Pendidikan Nasional.

Sistem pendidikan nasional dilakukan untuk memperbarui visi, misi, dan strategi

pembangunan pendidikan.

a. *Visi pendidikan nasional* adalah “terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan produktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah”. (Penjelasan Umum UU No. 20 Tahun 2003).

b. *Misi pendidikan nasional* adalah :

- 1) Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia;
- 2) Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar;
- 3) Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral;
- 4) Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global;
- 5) Memberdayakan peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

c. *Strategi pendidikan nasional* adalah :

- 1) Pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia;
- 2) Pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi;
- 3) Proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis;
- 4) Evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan;
- 5) Peningkatan keprofesionalan pendidik dan tenaga kependidikan;
- 6) Penyediaan sarana belajar yang mendidik;
- 7) Pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan;
- 8) Penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata;
- 9) Pelaksanaan wajib belajar;

- 10) Pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan;
- 11) Pemberdayaan peran masyarakat;
- 12) Pusat kebudayaan dan pembangunan masyarakat;
- 13) Pelaksanaan pengawasan dalam sistem pendidikan nasional.

4. Hak dan Kewajiban Warga Negara dan Pemerintah dalam Pendidikan.

Mengenai hak dan kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat, dan pemerintah disebutkan dalam Pasal 5 s/d 12 dalam UU nO. 20 Tahun 2003, yaitu :

a. Hak dan Kewajiban Warga Negara :

- 1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu;
- 2) Warga negara yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau social berhak memperoleh pendidikan khusus;
- 3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus;
- 4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus;
- 5) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat;
- 6) Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar;
- 7) Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan.

b. Hak dan Kewajiban Orang Tua :

- 1) Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya;
- 2) Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.

c. Hak dan Kewajiban Masyarakat :

- 1) Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan;

2) Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

d. Hak dan Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

- 1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga Negara tanpa diskriminasi;
- 3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

5. Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan.

Peranserta masyarakat dalam pendidikan meliputi peranserta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. Masyarakat dapat berperanserta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.

a. *Pendidikan berbasis masyarakat :*

- 1) Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat;
- 2) Penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta majemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- 3) Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis,

subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

b. *Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah :*

- 1) Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah;
- 2) Dewan Pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubungan hierarkis;
- 3) Komite Sekolah/Madrasah sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan;
- 4) Ketentuan tentang pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah diatur lebih lanjut dengan PP.

6. Pendidikan Lain-lain.

Selain pendidikan sekolah (formal) dan di luar sekolah (nonformal dan informal) seperti telah diuraikan di muka, dan pendidikan agama yang akan dibahas khusus dalam Bab VI, terdapat juga pendidikan anak usia dini, pendidikan kedisiplinan, pendidikan jarak jauh, serta pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah pendidikan yang diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar, yang penyelenggaraannya dapat dilakukan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal. Pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat. Pada jalur pendidikan nonformal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat. Pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan. Kesemuanya diatur lebih lanjut dengan Peraturan

Pemerintah (PP).

Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Departemen (sekarang Kementerian) atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian. Pendidikan ini berfungsi meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas tugas kedinasan bagi pegawai dan calon pegawai negeri suatu kementerian atau LPNK. Pendidikan kedinasan diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal dan nonformal, yang pengauran lebih lanjut diatur dengan PP.

Pendidikann jarak jauh dapat diselenggarakan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Pendidikan ini berfungsi memberikan layanan kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau reguler. Pendidikan ini diselenggarakan dalam berbagai bentuk, modus, dan cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan belajar serta system penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan standar nasional pendidikan. Ketentuan lebih lanjut pendidikan jarak jauh diatur dengan PP.

Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan tidak mampu dari segi ekonomi. Ketentuan tentang pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus diatur dengan PP.

7. Bahasa Pengantar.

Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan nasional. Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan jika diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu. Bahasa asing pun dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik. Sekarang ini penggunaan bahasa asing sudah mulai marak, baik di tingkat SD, SLTP, dan SLTA, misalnya dengan sekolah *bilingual*. Artinya, di sekolah bersangkutan diajarkan juga bahasa asing, yang umumnya bahasa Inggris. Bahkan

sudah ada juga program pemerintah yang mengkhususkannya yaitu RSBI atau SBI (Rintisan Sekolah Berbasis Internasional) atau Sekolah Berbasis Internasional dalam menjemput era globalisasi, sehingga mau tidak mau bahasa Inggris dijadikan bahasa pengantarnya.

8. Wajib Belajar.

Setiap warga negara yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar. Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Ketentuan tentang wajib belajar ini diatur lebih lanjut dengan PP.

9. Standar Nasional Pendidikan.

Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Standar nasional pendidikan ini digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan. Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standarisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan. Ketentuan lebih lanjut tentang standar nasional pendidikan ini diatur dengan PP.

10. Kurikulum.

Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi, daerah, dan peserta didik. Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka NKRI, dengan memperhatikan :

- a. Peningkatan iman dan takwa;
- b. Peningkatan akhlak mulia;

- c. Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik;
- d. Keragaman potensi daerah dan lingkungan;
- e. Tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
- f. Tuntutan dunia kerja;
- g. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- h. Agama;
- i. Dinamika perkembangan global;
- j. Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.

Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat :

- a. Pendidikan agama;
- b. Pendidikan kewarganegaraan;
- c. Bahasa;
- d. Matematika;
- e. Ilmu pengetahuan alam;
- f. Ilmu pengetahuan sosial;
- g. Seni dan budaya;
- h. Pendidikan jasmani dan olah raga;
- i. Keterampilan/kejuruan;
- j. Muatan lokal.

Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat :

- a. Pendidikan agama;
- b. Pendidikan kewarganegaraan;
- c. Bahasa.

Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh pemerintah. Dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar, dan Pemerintah Provinsi untuk pendidikan menengah.

Kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi. Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan

oleh perguruan tinggi bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi.

11. Pengembangan Kebudayaan.

Pendidikan nasional haruslah bersifat fungsional, yaitu berfungsi untuk kepentingan kelembagaan masyarakat menuju perkembangan kehidupan bangsa yang menyangkut pengembangan pribadi dan watak bangsa. Sebab keduanya merupakan criteria dasar dalam upaya mewujudkan suatu sistem pendidikan nasional. Kepentingan pengembangan bangsa tersebut dapat dilihat dan dipahami melalui proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia, sedangkan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 merupakan pandangan hidup, kepribadian, dan tujuan hidup nasional. Penjabaran secara konstitusionalnya dapat dilihat melalui UUD 1945 dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional. Semua itu hanya dapat diwujudkan secara nyata dengan usaha pembangunan nasional baik yang bersifat fisik-material maupun mental-spiritual yang multi dimensional, yang meliputi bidang ideologi politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.. Salah satu bidang pembangunan dimaksud, yaitu bidang sosial budaya, di antaranya adalah sektor pendidikan. Sektor pendidikan dianggap amat sangat penting dan utama karena merupakan investasi sumber daya manusia. Negara akan maju jika sumber daya manusianya berkualitas jasmani dan rohaninya, terutama dalam aspek intelektual, emosional, dan spiritualnya. Dalam konteks ini pengembangan sumber daya manusia pada hakekatnya adalah proses kebudayaan.

Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang meliputi aspek fisik, psikis, dan sosial, perlu diwujudkan dengan sebaik-baiknya sehingga oleh karenanya diperlukan pendekatan-pendekatan yang baik. Pendidikan nasional dalam rangka pengembangan kebudayaan adalah dengan pendekatan kultural, yaitu usaha-usaha mengadakan perubahan-perubahan menuju keadaan yang lebih baik dengan tetap menjaga keseimbangan hidup manusia baik sebagai individu (pribadi), sebagai anggota keluarga, sebagai anggota masyarakat, dan sebagai warga negara, yang dikaitkan dengan hubungannya dengan alam dan lingkungan sekitarnya, dengan bangsa-bangsa di dunia, dan dengan Tuhannya. Pendekatan kultural ini harus

memperhatikan sejarah dan peradaban/kemajuan bangsa, baik dalam ruang lingkup nasional, kawasan, maupun internasional.

Demikianlah, pengembangan kebudayaan harus diartikan secara luas sesuai dengan wujudnya yang meliputi *wujud ideal* yang abstrak, karena berupa hasil pemikiran manusia, *wujud sosial*, berupa aktivitas kehidupan manusia sehari-hari, dan *wujud fisik*, berupa hasil karya. Maka wujud pengembangan budaya ini hendaknya mencakup proses pemikiran manusia Indonesia yang diarahkan pada peningkatan wawasan pengetahuan untuk pembangunan manusia seutuhnya, aktivitas manusia Indonesia dalam berinteraksi dengan sesama dan lingkungan sekitar yang berpedoman pada nilai-nilai agama dan Pancasila, serta hasil karya manusia Indonesia yang disumbangkan demi kemajuan bangsa dan negara.

BAB III

PENDIDIKAN SEUMUR HIDUP DAN BERBAGAI IMPLIKASINYA

A. KONSEP PENDIDIKAN SEUMUR HIDUP

Pada prinsipnya pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan di dalam lingkungan rumah tangga atau keluarga, sekolah, dan masyarakat. Karena itu pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Konsep pendidikan seumur hidup atau pendidikan sepanjang hayat, merumuskan suatu asas bahwa pendidikan adalah suatu proses yang terus-menerus (*continue*) dari bayi sampai meninggal dunia. Konsep ini sesuai dengan konsep Islam sebagaimana hadits Nabi Besar Muhammad Saw., “*Utlubul ilma minal mahdi ilallahdi*” (Menuntut ilmu dari mulai buaian sampai ke liang lahat).

Ide atau gagasan pendidikan seumur hidup dalam sejarah pendidikan yang diawali dengan pernyataan Nabi Besar Muhammad Saw. tersebut telah lama, akan tetapi baru populer sejak terbitnya buku Paul Langrend yang berjudul “*An Introduction to Life Long Education*” sesudah Perang Dunia II, yang kemudian diambil alih oleh “International Commision on the Development of Education” PBB (UNESCO). Istilah pendidikan seumur hidup (*Life Long Integrated Education*) tidak dapat diganti dengan istilah-istilah lain sebab isi dan luasnya (*scope*) tidak persis sama, seperti *Out of School Education*, *Continuining Education*, *Adult Edecation*, *Further Edu-cation*, *Recurrent Education*), dsb.

Dalam sistem pendidikan di Indonesia, dikenal adanya pendidikan sekolah (pendidikan formal), dan pendidikan luar sekolah (pendidikan nonformal dan informal). Pendidikan luar sekolah dibagi dua, yaitu yang dilembagakan dan yang tidak dilembagakan.

Pendidikan sekolah adalah pendidikan yang diselenggarakan di sekolah, yang teratur, sistematis, mempunyai jenjang, dan pelaksanaannya dibagi dalam waktu-waktu tertentu yang berlangsung dari mulai taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Memang sekolah bukan satu-satunya tempat bagi setiap orang untuk belajar. Namun perlu disadari bahwa sekolah merupakan tempat dan periode yang sangat

strategis bagi pemerintah dan masyarakat dalam membina seseorang untuk menghadapi masa depannya.

Pendidikan luar sekolah yang dilembagakan adalah semua bentuk pendidikan yang diselenggarakan dengan sengaja, tertib, terarah dan berencana di luar kegiatan persekolahan. Di sini, tenaga pengajar, fasilitas, cara penyampaian materi atau bahan ajar, dan waktu yang dipakai, serta komponen-komponen lainnya disesuaikan dengan keadaan peserta didik agar mendapatkan hasil yang baik. Bagi masyarakat kita yang masih banyak dipengaruhi oleh proses belajar tradisional, maka pendidikan luar sekolah yang dilembagakan merupakan cara yang baik dan mudah, dan mendorong masyarakat mau belajar, karena proses pembelajarannya dapat disesuaikan dengan keadaan lingkungan dan kebutuhan peserta didik. Pendidikan luar sekolah yang dilembagakan bersifat fungsional dan praktis, serta pendekatannya lebih luwes (*fleksibel*). Calon peserta didiknya (*raw input*) adalah :

1. Penduduk usia sekolah yang tidak mendapat kesempatan bersekolah.
2. Orang dewasa yang tidak pernah bersekolah.
3. Siswa sekolah yang putus sekolah (*drop-out*), baik dari pendidikan tingkat dasar, menengah, atau pun tinggi.
4. Siswa yang telah lulus dalam satu jenjang dan jalur pendidikan sekolah, tetapi tidak dapat melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi.
5. Orang yang telah bekerja, dan ingin menambah keterampilan lain.

Lembaga pendidikan luar sekolah yang dilembagakan wujudnya adalah lembaga pendidikan nonformal. Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.

Pendidikan luar sekolah yang tidak dilembagakan dikenal dengan pendidikan informal. Kegiatan pendidikan informal dilakukan oleh keluarga dan lingkungan, berbentuk kegiatan belajar mandiri. Juga merupakan proses pendidikan yang diperoleh

seseorang dari pengalamannya sehari-hari dengan sadar atau tidak sadar, yang pada umumnya tidak teratur dan tidak sistematis, seperti di dalam keluarga (rumah tangga), tetangga, pekerjaan, hiburan, pasar, dll. Namun demikian, pengaruh dan peranannya sangat besar dalam kehidupan seseorang, karena :

1. Pendidikan dalam keluarga adalah pendidikan yang pertama dan utama bagi setiap orang. Setiap orang sejak anak-anak, remaja dan dewasa akan lebih banyak berada di rumah, dan pada masa itulah diletakkan dasar-dasar kepribadian seseorang.
2. Pendidikan di lingkungan masyarakat adalah pendidikan sekaligus tempat praktek dalam kehidupan yang sebenarnya, sehingga orang akan menimba pengalaman, pengetahuan, keterampilan, sehingga bermanfaat dalam kehidupannya.

Adapun perbedaan antara pendidikan sekolah dengan pendidikan luar sekolah yang dilembagakan dan yang tidak dilembagakan dapat dilihat dalam matrik di bawah ini.

No.	KETERANGAN	PENDIDIKAN SEKOLAH	PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH YANG DILEMBAGAKAN	PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH YANG TIDAK DILEMBAGAKAN
1	2	3	4	5
1.	Tempat berlangsung	Di gedung sekolah	Dapat di luar dan di dalam sekolah	Di mana saja seseorang berada
2.	Syarat untuk mengikuti	Usia dan tingkat pendidikan yang tertentu	Kadang ada, namun tidak memegang peranan penting	Tidak ada
3.	Jenjang pendidikan	Ada jenjang yang ketat	Biasanya tidak ada	Tidak ada
4.	Program	Ditentukan secara teliti untuk tiap jenjang dalam bentuk tertulis	Ada program tertentu	Tidak ada
5.	Bahan pelajaran	Akademis dan bersifat umum	Praktis dan khusus	Tidak ada yang ditentukan
6.	Lama pendidikan	Memakan waktu yang panjang	Relatif singkat	Sepanjang hidup
7.	Usia yang menjalani	Relatif berusia sama	Tidak perlu sama	Semua usia
8.	Penilaian	Ada ujian secara formal dengan pemberian ijazah	Ada juga, biasanya diberi ijazah atau surat keterangan	Tidak ada ujian atau penilaian sistematis

9.	Penyelenggaraan	Pemerintah atau swasta	Pemerintah atau swasta	Tidak ada badan tertentu
10.	Metode mengajar	Menurut metodologi tertentu	Dapat mengikuti metode tertentu, walaupun tak selalu	Tidak ada
11.	Tenaga pengajar	Harus mempunyai wewenang berdasarkan ijazah dan diangkat untuk itu	Tidak selalu mempunyai ijazah sebagai pengajar	Tidak ada
12.	Administrasi	Sistematis dan uniform untuk tiap tingkat sekolah	Ada, walaupun tidak begitu uniform	Tidak ada
13.	Ditinjau sejarah	Paling akhir	Lebih tua dari pendidikan formal	Sejak ada manusia di dunia ini

Sumber : Zahara Idris. 1992. Pengantar Pendidikan 2. hal. 116.

B. TUJUAN DAN DASAR PEMIKIRAN PENTINGNYA PENDIDIKAN SEUMUR HIDUP

1. Tujuan Pendidikan Seumur Hidup.

- Mengembangkan potensi kepribadian manusia sesuai dengan kodrat dan hakikatnya, yakni seluruh aspek pembaurannya seoptimal mungkin;
- Dengan mengingat proses pertumbuhan dan perkembangan kepribadian manusia bersifat hidup dinamis, maka pendidikan wajar berlangsung seumur hidup.

2. Dasar Pemikiran Pentingnya Pendidikan Seumur Hidup.

Pendidikan seumur hidup sangat penting ditinjau dari berbagai aspek, yaitu :

a. *Ideologis.*

Setiap manusia mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang memungkinkan dia memiliki kepribadian yang luhur, peningkatan ilmu pengetahuan dan keterampilan, serta pengembangan potensinya sesuai dengan kebutuhan hidupnya;

b. *Ekonomis.*

Manusia dalam hidupnya harus keluar dari “lingkaran setan kemiskinan” karena kebodohan yang menyebabkan kemiskinan, dan sebaliknya kemiskinan menyebabkan kebodohan. Pendidikan seumur hidup memungkinkan orang :

- 1) Meningkatkan produktivitasnya;

- 2) Memelihara dan mengembangkan sumber-sumber yang dimilikinya;
- 3) Memungkinkan hidup dalam lingkungan yang sehat dan menyenangkan;
- 4) Memiliki motivasi dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya secara tepat.

c. *Sosiologis.*

Pendidikan seumur hidup merupakan pemecahan masalah pendidikan, karena bukan hanya pendidikan formal tetapi juga pendidikan nonformal dan informal yang memungkinkan orang tua dan anak-anaknya mendapat kesempatan luas kendati tidak memperoleh pendidikan formal.

d. *Filosofis.*

Secara filosofis, pendidikan seumur hidup akan memberikan dasar bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

e. *Politis.*

Pendidikan seumur hidup menanamkan pentingnya sendi-sendi demokrasi, hak dan kewajiban negara/pemerintah dan rakyat, pelaksanaan pemerintahan dan penyelenggaraan pembangunan yang melibatkan seluruh rakyat, sehingga pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan perlu diberikan kepada setiap orang.

f. *Teknologis.*

Kemajuan zaman ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Hal ini menyebabkan manusia dan masyarakat harus terus mengikuti perkembangannya agar tidak ketinggalan. Bukan saja para ahli dan sarjana yang harus terus mengikuti perkembangan kemajuan ini, tetapi termasuk juga masyarakat umum. Maka pendidikan seumur hidup sangat diperlukan.

g. *Psikologis dan Pedagogis.*

Harus diakui bahwa perkembangan iptek yang sangat pesat berdampak terhadap berbagai konsep, teknik, dan metode pendidikan. Dengan semakin luas dan kompleksnya ilmu pengetahuan, maka tidak mungkin lagi diajarkan sepenuhnya kepada peserta didik di sekolah. Karena itu tugas utama sekolah adalah mengajarkan bagaimana cara belajar, menanamkan motivasi yang kuat dalam diri anak untuk belajar terus-menerus sepanjang hidupnya, memberikan keterampilan secara tetap dan cepat, dan mengembangkan daya adaptasi yang besar

dalam dirinya.

3. Kepentingan Pendidikan Seumur Hidup.

Pendidikan seumur hidup akan meningkatkan persamaan distribusi pelayanan pendidikan, memiliki implikasi ekonomi yang menyenangkan, alternatif dalam menghadapi struktur sosial yang cenderung selalu berubah, mengantarkan pada peningkatan kualitas hidup, dsb. Beberapa hal tentang pentingnya pendidikan seumur hidup dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Pertimbangan Ekonomi.

Dengan pesatnya perkembangan iptek, maka dunia pendidikan pun terus berkembang, yang mengakibatkan berkompetisinya lembaga-lembaga pendidikan terutama dalam kualitasnya. Munculah penggolongan lembaga pendidikan pavorit, unggulan, plus, dll. yang membawa dampak mahal biaya pendidikan. Hal ini berakibat keraguan pada masyarakat untuk mampu membiayai pendidikan anak-anaknya. Di negara-negara berkembang, tampaknya hal ini sudah sampai pada tahap yang memprihatinkan.

Terdapat pengakuan adanya hubungan erat antara pendidikan dengan pertumbuhan ekonomi serta kehidupan sosial. Karena itu perlu pemikiran perubahan radikal organisasi pendidikan. Sistem pendidikan berfungsi sebagai basis untuk memperoleh tipe baru yang secara ekonomis berharga dan menguntungkan masyarakat. Dalam hal ini kendati pendidikan seumur hidup tidak secara langsung dapat meningkatkan produktivitas pekerja dan keuntungan, tetapi yang lebih penting adalah meningkatkan kualitas hidup, memperbesar pemenuhan diri, melepaskan diri dari kebodohan, kemiskinan, dan eksploitasi.

b. Keadilan.

Tuntutan akan adanya persamaan serta kesempatan dalam memperoleh pendidikan, terus digaungkan oleh masyarakat, lebih-lebih hal tersebut tercantum dalam Pasal 31 Ayat (1) dan (2) UUD 1945, yaitu :

- (1) Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan.
- (2) Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Pendidikan di Indonesia merupakan warisan kolonial, sehingga dulu pendidikan itu diperuntukkan bagi memenuhi kebutuhan pemerintah yang tentu saja, membatasi perkembangan nasional dalam kesamaan hak untuk mendapat pendidikan. Yang diterima bersekolah hanya mereka yang berduit dan keturunan ningrat serta mau “kerjasama” dengan pemerintah. Menurut Hasbullah (2005: 77), di zaman sekarang ini pendidikan berjalan untuk mempertahankan status-quo, di mana siswa dididik untuk menyesuaikan diri dengan posisi sosial tertentu dan untuk melestarikan tatanan yang sudah ada. Tampaknya pengetahuan yang diberikan di sekolah tradisional tidak ubahnya seperti menyampaikan komoditas kepada konsumen, dan ketidaksamaan dipertahankan oleh pengaruh kontrol pendirian pendidikan yang ingin menyampaikan pengetahuan dengan cara yang cepat. Konteks ini berbeda dengan pendidikan seumur hidup yang pada prinsipnya bertujuan untuk mengeliminasi peranan sekolah sebagai alat untuk melestarikan ketidakadilan.

c. *Peranan Keluarga.*

Menurut Coleman (Hasbullah, *ibid*, hal. 78), keluarga berfungsi sebagai sentral sumber pendidikan pada waktu silam. Situasi sekarang telah berubah sehingga peranan keluarga dalam mendidik anak sedikit demi sedikit berkurang, yang dapat dilihat dalam bidang moral, afektif, dan pendidikan sosial. Pendidikan seumur hidup dapat memperlengkapi kerangka organisasi yang memungkinkan pendidikan mengambil alih tugas yang dulunya ditangani keluarga. Dengan demikian, pendidikan seumur hidup akan memperluas sistem pendidikan sehingga dapat menjangkau anak-anak awal dan orang dewasa.

d. *Perubahan Peranan Sosial.*

Pendidikan seumur hidup harus berisi elemen penting yang kuat dan memainkan peranan sosial yang sangat beragam untuk mempermudah individu melakukan penyesuaian terhadap perubahan hubungan antar masyarakat.

e. *Perubahan Teknologi.*

Pertumbuhan teknologi menyebabkan peningkatan penyediaan informasi yang berakibat pada meningkatnya usia harapan hidup dan menurunnya angka kematian. Semakin banyak ketersediaan kekayaan materi memunculkan materialis-

me, yang akibatnya mempengaruhi nilai-nilai budaya dan spiritual sehingga mengakibatkan kerenggangan dan keterasingan manusia satu dengan yang lainnya.

f. *Vokasional.*

Pendidikan vokasional diberikan untuk mempersiapkan tenaga kejuruan yang handal dan terampil untuk menghadapi tantangan masa depan.

g. *Kebutuhan Orang Dewasa.*

Akibat kemajuan iptek, orang dewasa mengalami pengaruh cepatnya perubahan keterampilan yang mereka miliki. Maka perlu diupayakan sistem pendidikan yang mampu mendidik orang dewasa sesuai dengan kebutuhan mereka. Dalam hal ini perlu pemikiran kapan seseorang harus disekolahkan dan sekolah apa yang dibutuhkan. Ini menjadi salah satu tugas pendidikan seumur hidup.

h. *Kebutuhan Anak-anak Awal.*

Masa anak-anak awal merupakan fase perkembangan yang mempunyai karakteristik tersendiri, bukan semata-mata penantian untuk memasuki periode masa remaja dan dewasa. Masa ini merupakan basis untuk perkembangan kejiwaan selanjutnya, meskipun dalam tingkat tertentu pengalaman-pengalaman yang datang belakangan dapat memodifikasi perkembangan yang pondasinya sudah diletakkan oleh pengalaman-pengalaman sebelumnya.

C. IMPLIKASI KONSEP PENDIDIKAN SEUMUR HIDUP PADA PROGRAM PENDIDIKAN

Implikasi di sini diartikan sebagai akibat langsung atau konsekuensi dari suatu kebijakan atau keputusan. Maksudnya adalah sesuatu yang merupakan tindak lanjut suatu kebijakan atau keputusan mengenai pelaksanaan pendidikan seumur hidup. Implikasi pendidikan seumur hidup pada program pendidikan, menurut W.P. Guruge (1970) dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori sebagai berikut :

1. Pendidikan Baca Tulis Fungsional.

Program ini penting baik dilihat dari relevansinya dengan kondisi yang ada pada negara-negara berkembang karena masih banyak yang buta huruf, melainkan juga

penting ditinjau dari implementasinya. Bahkan di negara-negara maju pun di mana radio, televisi, film, internet telah menentang ketergantungan orang akan bahan-bahan bacaan, tetapi membaca dan menulis masih tetap merupakan cara yang paling murah dan praktis untuk mendapatkan dan menyebarkan pengetahuan. Membaca adalah kunci bagi terbukanya ilmu pengetahuan dan buku sebagai gudangnya ilmu pengetahuan. Jadi, melek huruf fungsional itu di samping merupakan isi program, sekaligus juga merupakan sarana terlaksananya pendidikan seumur hidup. Kecakapan atau keterampilan baca tulis itu perlu ditunjang pula oleh kecakapan berhitung, sehingga menjadi “calistung” atau baca, tulis, hitung, ditambah dengan penyediaan bahan-bahan bacaan yang diperlukan untuk mengembangkan lebih lanjut kecakapan yang telah dimiliki oleh masyarakat.

2. Pendidikan Vokasional.

Pendidikan vokasional sebagai program pendidikan di luar sekolah bagi anak di luar batas usia sekolah, atau sebagai program pendidikan formal dan nonformal dalam rangka *apprentice ship training*, merupakan salah satu program penting dalam rangka pendidikan seumur hidup. Pendidikan vokasional diberikan untuk mempersiapkan tenaga kejuruan yang handal dan terampil untuk menghadapi tantangan masa depan.

3. Pendidikan Profesional.

Sebagai realisasi pendidikan seumur hidup, dalam tiap profesi hendaklah telah tercipta *built in mechanism* yang memungkinkan golongan profesional terus mengikuti berbagai kemajuan dan perubahan menyangkut metodologi, perlengkapan, terminologi, dan sikap profesionalnya. Apa yang berlaku bagi pekerja dan buruh berlaku pula bagi profesional mengingat tantangan bagi mereka semakin besar.

4. Pendidikan ke Arah Perubahan dan Pembangunan.

Bahwa era globalisasi dan informasi yang ditandai dengan pesatnya perkembangan iptek, telah mempengaruhi berbagai dimensi kehidupan masyarakat. Contohnya dari cara memasak yang sudah memanfaatkan alat-alat elektronik, sampai menerobos ruang angkasa, dll. membawa konsekuensi menuntut pendidikan yang berlang-

sung terus-menerus. Hal ini penting juga bagi anggota masyarakat dari berbagai golongan usia agar mereka mampu mengikuti perubahan sosial dan pembangunan, sebagai konsekuensi penting dari asas pendidikan seumur hidup.

5. Pendidikan Kewarganegaraan dan Kedewasaan Politik.

Di samping tuntutan penguasaan iptek, dalam kondisi sekarang di mana pola pikir masyarakat semakin maju dan kritis, baik rakyat biasa maupun pemimpin pemerintahan di negara demokratis seperti Indonesia diperlukan pendidikan kewarganegaraan dan kedewasaan politik bagi setiap warga negara. Dengan pendidikan kewarganegaraan, orang jadi mengetahui, menghayati, dan diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Hal ini merupakan bagian yang penting dari pendidikan seumur hidup.

6. Pendidikan Budaya dan Pengisian Waktu Luang.

Spesialisasi yang berlebihan dalam masyarakat yang telah dimulai sejak usia muda dalam program pendidikan formal di sekolah, membuat manusia menjadi berpandangan sempit pada bidangnya sendiri, sehingga buta atas kekayaan nilai-nilai budaya (kultur) bangsanya. Seseorang yang disebut "*educated man*" mestinya tidak hanya berkutat pada bidang spesialisasinya saja, tetapi dia harus memahami dan menghargai sejarah, kesusatraan, agama, filsafat hidup, seni, dll. Sebab itu pendidikan budaya dan pengisian waktu luang merupakan bagian penting dari pendidikan seumur hidup.

Implikasi konsep pendidikan seumur hidup pada sasaran pendidikan diklasifikasikan pada enam kategori, yaitu :

- a. Para buruh dan petani;
- b. Para remaja yang terganggu pendidikan sekolahnya;
- c. Para pekerja yang berketerampilan;
- d. Golongan teknisi dan profesional;
- e. Para pemimpin dalam masyarakat;
- f. Golongan masyarakat yang sudah tua.

Gelombang perubahan politik, sosial, dan ilmu pengetahuan merambah hampir

ke semua aspek kehidupan masyarakat. Dalam hal ini pendidikan seumur hidup menekankan kerjasama antara keluarga dan sekolah dalam menciptakan pengalaman pendidikan bersama.

D. STRATEGI PENDIDIKAN SEUMUR HIDUP

Cara berpikir menurut asas pendidikan seumur hidup akan mengubah pandangan kita mengenai status dan fungsi sekolah, bagaimana cara anak/peserta didik belajar, peranan guru sebagai pengajar sekaligus motivator, stimulator, dan petunjuk jalan bagi peserta didik dalam hal proses pembelajaran, dan sekolah sebagai pusat kegiatan belajar (*learning centre*) bagi masyarakat sekitarnya. Dengan demikian, dalam pandangan pendidikan seumur hidup, semua orang secara potensial merupakan peserta didik.

Pendidikan seumur hidup yang merupakan asas pendidikan dewasa, diamati di negara-negara maju maupun di negara-negara berkembang. Dalam konteks ini diperlukan adanya strategi dalam penerapan pendidikan seumur hidup sehingga pendidikan dapat diartikan secara tepat dan benar. Menurut Soelaeman Yoesoef (1992), strategi dalam rangka pendidikan seumur hidup meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Konsep Kunci Pendidikan Seumur Hidup.

Terdapat empat macam konsep kunci, yaitu :

- a. *Konsep pendidikan seumur hidup itu sendiri*, yang diartikan sebagai tujuan atau ide formal untuk pengorganisasian dan penstrukturan pengalaman-pengalaman pendidikan. Ini berarti, pendidikan akan mencakup seluruh rentangan usia, dari yang paling muda sampai yang paling tua, dan adanya basis institusi yang berbeda dengan basis yang mendasari persekolahan konvensional;
- b. *Konsep belajar seumur hidup*, berarti peserta didik belajar karena respons terhadap keinginan atau angan-angan pendidikan menyediakan kondisi-kondisi yang membantu proses belajar;
- c. *Konsep metode belajar seumur hidup*, sebagai cara yang logis untuk mengatasi problema dan sangat terdorong untuk belajar di seluruh tingkat usia, serta

menerima tantangan dan perubahan seumur hidup. Dalam keadaan demikian, perlu adanya sistem pendidikan yang bertujuan membantu perkembangan orang-orang secara sadar dan sistematis merespons untuk beradaptasi dengan lingkungan mereka seumur hidup;

- d. *Kurikulum yang membantu pendidikan seumur hidup*, yang didesain atas dasar prinsip pendidikan seumur hidup dan secara berurutan melaksanakan proses belajar seumur hidup. Kurikulumnya praktis untuk mencapai tujuan pendidikan dan mengimplementasikan prinsip-prinsip pendidikan seumur hidup.

2. Arah Pendidikan Seumur Hidup.

Pendidikan seumur hidup diarahkan pada orang-orang dewasa dan anak-anak dalam rangka penambahan pengetahuan dan keterampilan yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka.

- a. *Pendidikan seumur hidup kepada orang dewasa*. Sebagai generasi penerus, para remaja ataupun dewasa membutuhkan pendidikan dalam rangka pemenuhan “*self interest*” yang merupakan tuntutan hidup mereka sepanjang masa. Di antara self interest itu adalah kebutuhan akan baca tulis untuk umum, dan latihan keterampilan untuk pekerja/buruh, yang sangat membantu dalam menghadapi situasi dan persoalan-persoalan penting sebagai kunci keberhasilan. Program kegiatan, pembiayaan, dan administrasi penyelenggaraan, sebagian kecil ditangani masyarakat sendiri, tetapi sebagian besar oleh pemerintah, misalnya bantuan dari lembaga pendidikan tinggi, pemerintah daerah, atau dari proyek tertentu. Tempat dan alat-alat pendidikan diserahkan kepada masyarakat yang keadaannya bervariasi, dari yang sederhana sampai yang memenuhi standar.
- b. *Pendidikan seumur hidup bagi anak*. Pendidikan seumur hidup bagi anak perlu mendapat perhatian serta pemenuhannya, mengingat anak akan menjadi “tempat awal” bagi orang dewasa nantinya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Pengetahuan dan kemampuan anak akan memberi peluang yang besar bagi pembangunan masa dewasa, sehingga akan menanggung beban yang lebih ringan. Proses pendidikannya menekankan pada metodologi mengajar,

karena pada dasarnya pada diri anak harus tertanam kunci belajar, motivasi belajar, dan kepribadian yang kuat. Program kegiatannya disusun mulai pada peningkatan baca tulis, keterampilan dasar, dan mempertinggi daya pikir anak, sehingga memungkinkan mereka terbiasa untuk belajar, berpikir kritis, dan mempunyai pandangan kehidupan yang dicita-citakan pada masa mendatang.

BAB IV

PERANAN KELUARGA DAN MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN

A. PERANAN KELUARGA DALAM PENDIDIKAN

Ditinjau dari aspek pendidikan, keluarga merupakan satu kesatuan hidup bersama (sistem sosial) dan penyedia situasi belajar. Sebagai sistem sosial, keluarga terdiri dari ayah, ibu dan anak. Ikatan kekeluargaan membantu anak mengembangkan sifat persahabatan, cinta kasih (kasih sayang), hubungan antarpribadi, kerjasama, disiplin, tingkah laku yang baik, serta pengakuan akan kewibawaan. Menurut Hasbullah, (2005:87), kewibawaan adalah pengakuan dan penerimaan secara sukarela terhadap pengaruh atau anjuran yang datang dari orang lain. Sebagai penyedia situasi belajar, dapat dilihat bahwa bayi dan anak-anak sangat bergantung kepada orang tua, baik keadaan jasmaniah, maupun kemampuan intelektual, sosial, dan moralnya. Bayi dan anak belajar menerima dan meniru apa yang diajarkan oleh orang tua.

Sumbangan keluarga bagi pendidikan anak adalah :

1. Cara orang tua melatih anak untuk menguasai cara-cara mengurus diri seperti makan, minum, buang air (besar/kecil), berbicara, berjalan, berdo'a, dll. sungguh-sungguh membekas dalam diri anak karena berkaitan erat dengan pertumbuhan dan perkembangan dirinya sebagai pribadi.
2. Sikap orang tua sangat mempengaruhi perkembangan anak. Sikap menerima atau menolak, kasih sayang, acuh tak acuh, sabar, tegesa-gesa, melindungi atau membiarkan, secara langsung mempengaruhi reaksi emosional anak.

Sangat wajar jika tanggung jawab pendidikan terletak di tangan kedua orang tua, dan tidak dibebankan kepada orang lain mengingat anak adalah darah-dagingnya, kecuali karena adanya keterbatasan-keterbatasan tertentu. Dalam hal keterbatasan dimaksud, maka tanggung jawab pendidikan dilimpahkan kepada pihak lain, yaitu sekolah. Tanggung jawab pendidikan yang perlu disadari dan dibina oleh kedua orang tua terhadap anak antara lain :

1. Memelihara dan membesarkannya sebagai dorongan alami, karena anak memerlukan makan, minum, pakaian, serta perawatan agar dia dapat hidup secara berke-

lanjutan.

2. Melindungi dan menjamin kesehatannya, baik jasmaniah maupun rohaniyah dari berbagai gangguan penyakit atau bahaya lingkungan yang dapat membahayakan diri anak.
3. Mengajarnya dengan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi kehidupannya kelak, sehingga jika dia telah dewasa mampu mandiri, dan dapat membantu orang lain.
4. Membahagiakan anak untuk dunia dan akhirat, dengan memberinya pendidikan agama dan budi pekerti sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah (bagi muslim-muslimah), dan moral Pancasila sebagai bangsa dan warga negara, dan norma-norma kemasyarakatan yang berlaku di lingkungannya.

Kesadaran akan tanggung jawab mendidik dan membina anak ini secara terus-menerus perlu dikembangkan, bahkan tidak lagi atas dasar kebiasaan, tetapi juga didasari oleh teori-teori pendidikan modern sesuai dengan perkembangan zaman yang ditandai oleh kemajuan iptek. Jadi, tugas utama keluarga dalam pendidikan anak adalah sebagai peletak dasar pendidikan akhlak dan pandangan hidup keagamaan, serta nilai-nilai moral dan norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

B. KERJASAMA ANTARA KELUARGA DENGAN SEKOLAH

Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Sekolah hanyalah sebagai pembantu kelanjutan pendidikan dalam keluarga. Karena itu, peralihan bentuk pendidikan keluarga (informal) ke jalur pendidikan sekolah (formal) memerlukan kerjasama antara orang tua dengan sekolah. Dalam hal ini yang perlu menjadi perhatian dan disadari oleh pihak sekolah (pendidik) adalah apa-apa yang dibawa anak didik dari keluarganya tidak mudah mengubahnya.

Pada dasarnya cukup banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjalin kerjasama antara keluarga dengan sekolah. Beberapa contoh di antaranya adalah :

1. Kunjungan Pihak Sekolah ke Rumah Anak Didik.

Dampak positifnya antara lain :

- a. Kunjungan melahirkan perasaan pada anak didik, bahwa sekolahnya memperhatikan dan mengawasinya;
- b. Kunjungan memberikan kesempatan kepada pendidik melihat sendiri dan mengobservasi langsung cara anak didik belajar, latar belakang kehidupannya, dan tentang masalah-masalah yang dihadapinya dalam keluarga;
- c. Pendidik berkesempatan memberikan penerangan kepada orang tua anak tentang pendidikan yang baik, cara-cara menghadapi masalah yang sedang dialami anak, dsb.
- d. Hubungan antara orang tua dengan sekolah akan bertambah erat;
- e. Dapat memberikan motivasi kepada orang tua anak untuk lebih terbuka dan dapat bekerjasama dalam upaya memajukan pendidikan anaknya;
- f. Pendidik mempunyai kesempatan mengadakan wawancara mengenai berbagai macam keadaan atau kejadian, terutama yang ada kaitannya dengan pendidikan;
- g. Terjalin komunikasi dan saling memberikan informasi tentang keadaan anak dan saling memberi petunjuk antara guru dengan orang tua.

2. Orang Tua Diundang ke Sekolah.

Berbagai kegiatan yang diselenggarakan di sekolah yang memungkinkan kehadiran orang tua, sangat layak dipertimbangkan, misalnya pada acara *class meeting*, yang diisi dengan perlombaan-perlombaan dan demonstrasi kebolehan anak-anak, pengajian, memperingati hari-hari besar agama, re-uni siswa, pameran hasil kerajinan anak-anak, pemutaran film pendidikan, olimpiade sains, pagelaran kesenian, dll. Paling tidak, undangan ini sekali dalam setahun.

3. Case Conference.

Merupakan rapat atau konferensi tentang kasus, biasanya digunakan dalam bimbingan dan penyuluhan. Pesertanya adalah orang tua yang benar-benar mau ikut membicarakan masalah anak didik secara terbuka dan sukarela, guru atau petugas BP, para ahli yang ada sangkut-pautnya dengan bimbingan misalnya kepo-

lisian, kejaksaan (masalah tawuran atau hukum), badan penanggulangan narkoba (bahaya narkoba), dokter ahli kebidanan dan kandungan (masalah pergaulan dan seks bebas), psikolog, dll. Konferensi ini untuk mencari jalan yang paling tepat agar masalah anak dan “kenakalan remaja”, dapat diatasi dengan baik.

4. Badan Pembantu Sekolah.

Adalah organisasi orang tua/wali murid dan guru, yang berfungsi membantu sekolah dalam membicarakan dan mengatasi hal-hal yang penting demi kelancaran penyelenggaraan pendidikan. Biasanya yang dibicarakan adalah berkaitan dengan RAPBS (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah) yang berkaitan dengan penetapan besarnya SPP (Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan) yang dikenakan kepada siswa, termasuk rencana rehabilitasi atau pembangunan gedung, local, dll. Organisasi ini sekarang namanya adalah *Komite Sekolah*, yang sebelumnya adalah POMG (Persatuan Orangtua Murid dan Guru), POM (Persatuan Orangtua Murid), BP-3 (Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan).

5. Surat-menyurat antara Sekolah dan Keluarga.

Pada waktu-waktu tertentu surat-menyurat ini diperlukan bagi perbaikan pendidikan, misalnya surat peringatan dari sekolah kepada orang tua jika anaknya perlu lebih giat belajar, sering membolos, sering membuat keributan, belum membayar SPP, dsb. Bisa juga orang tua berkirim surat kepada sekolah, misalnya memberitahukan anaknya tidak dapat sekolah karena sakit, memantau kemajuan belajar anaknya, memberikan masukan atau usul saran untuk kemajuan sekolah, dll.

6. Daftar Nilai atau Rapor.

Rapor sekarang diberikan setiap semester kepada siswa untuk dipakai sebagai penghubung antara sekolah dengan orang tua/wali siswa. Biasanya di dalamnya selain berisi nilai-nilai hasil capaian belajar siswa, juga ada catatan wali kelas untuk lebih giat belajar bagi mereka yang nilainya kurang atau tidak memuaskan, untuk tetap mempertahankan prestasi yang sudah baik, dsb.

C. PERANAN MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN

Jika keluarga adalah lembaga pendidikan pertama dan utama, sekolah adalah lembaga pendidikan kedua setelah keluarga, maka masyarakat adalah lembaga pendidikan ketiga setelah sekolah. Keberadaan dan kemajuan suatu lembaga pendidikan sangat ditentukan oleh peranserta masyarakat yang ada. Tanpa dukungan dan partisipasi masyarakat, jangan diharapkan pendidikan dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana diharapkan. Sebagai salah satu lingkungan di mana terjadi kegiatan pendidikan, masyarakat mempunyai pengaruh yang amat besar terhadap keberlangsungan aktivitas pendidikan.

Beberapa peran masyarakat terhadap pendidikan (sekolah) :

1. Mendirikan dan membiayai sekolah.
2. Mengawasi pendidikan agar sekolah tetap membantu dan mendukung cita-cita dan kebutuhan masyarakat.
3. Ikut menyediakan tempat pendidikan seperti gedung-gedung sekolah, museum, perpustakaan, panggung kesenian, kebun binatang, dsb.
4. Menyediakan berbagai sumber untuk sekolah. Mereka menjadi narasumber atau responden dalam mengungkap sesuatu masalah pendidikan misalnya dalam kaitan dengan pembuatan makalah, penelitian, dll. seperti petani, peternak, pekebun, pengusaha, pamong desa/kelurahan, RT, RW, tokoh masyarakat, dokter, polisi, dsb.
5. Sebagai sumber pelajaran atau laboratorium tempat belajar selain buku-buku, media cetak dan elektronik. Masyarakat memberi bahan pelajaran yang banyak sekali seperti aspek alami industri, perumahan, transportasi, pertanian, perkebunan, peternakan, pertambangan, dsb.

Masyarakat pun dapat berperan serta dalam pendidikan melalui jalur-jalur :

1. Perguruan swasta.
2. Dunia usaha.
3. Kelompok profesi.
4. Lembaga swasta nasional lainnya.

Perguruan swasta mempunyai tanggung jawab dan peranan yang penting dalam ikutserta melaksanakan pendidikan nasional. Karena itu pertumbuhan dan kemampu-

annya perlu dikembangkan berdasarkan pola pendidikan nasional yang mantap dengan tetap mengindahkan ciri khas perguruan bersangkutan. Yang dimaksud perguruan swasta adalah usaha-usaha dari masyarakat yang secara langsung mengelola dan menyelenggarakan pendidikan formal. Tentu saja dalam pelaksanaannya berkewajiban mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku seperti standardisasi dan akreditasi. Karena itu perguruan swasta harus berbentuk badan hukum, misalnya yayasan.

Dunia usaha sebagai bagian dari masyarakat mempunyai kaitan yang erat dengan unsur-unsur kehidupan masyarakat lainnya, termasuk pendidikan. Hubungan dunia usaha dengan pendidikan dapat dilihat dari dua aspek, yaitu :

1. Dunia usaha sebagai konsumen pendidikan, dalam arti, memanfaatkan dan mengambil dari hasil pendidikan yang berupa lulusan sekolah.
2. Dunia usaha sebagai pelaksana dan pengembang dalam penyelenggaraan sistem pendidikan.

Peranan dunia usaha dalam penyelenggaraan pendidikan nasional dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya :

1. Melaksanakan sistem magang.
2. Membentuk konsorsium pengadaan dana yang dapat dimanfaatkan untuk usaha-usaha pendidikan.
3. Menyediakan fasilitas-fasilitas untuk kepentingan pendidikan.
4. Mengadakan pelatihan-pelatihan (*Prae service/in-service training*), penataran, dsb.
5. Mengadakan program pendidikan kemasyarakatan seperti program wajib pendidikan minimum bagi pegawai/karyawan instansi/perusahaan, dll.
6. Mengadakan kerjasama dengan sekolah-sekolah kejuruan dan lembaga pendidikan lainnya.

Peran dan partisipasi dunia usaha dalam penyelenggaraan pendidikan perlu diatur dan dikelola melalui peraturan perundang-undangan agar lebih efektif dan efisien.

Kelompok profesi di dalam masyarakat yang sedang membangun sangat diperlukan peranannya, yaitu keahlian dan keterampilannya. Peranan dimaksud antara lain :

1. Merencanakan dan menyelenggarakan latihan keterampilan dan keahlian bidang-bidang tertentu.
2. Menjamin dan menguji kualitas keterampilan dan keahlian dimaksud.

3. Menyediakan tenaga-tenaga pendidikan untuk berbagai jenis keahlian dan keterampilan, terutama pendidikan kemasyarakatan dan pendidikan khusus.

Lembaga-lembaga swasta lainnya di dalam masyarakat berkembang dalam menyelenggarakan dan mengelola kegiatan-kegiatan sosial, kebudayaan, keagamaan, penelitian, keterampilan dan keahlian. Peranan yang diharapkan dari lembaga-lembaga ini dalam pendidikan kemasyarakatan adalah melalui kegiatan-kegiatan pendidikan yang mempunyai efek sosial.

Jelaslah kiranya bahwa peran masyarakat sangat besar terhadap pendidikan sekolah. Untuk itu sekolah perlu memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, paling tidak, mempergunakan sumber-sumber pengetahuan yang ada di masyarakat dengan alasan :

1. Dengan melihat apa yang terjadi di masyarakat, anak didik akan memperoleh pengalaman langsung (*first hand experience*) sehingga mereka dapat memiliki pengalaman yang nyata dan mudah diingat.
2. Pendidikan membina anak-anak yang berasal dari masyarakat, dan akan kembali ke masyarakat.
3. Di masyarakat banyak sumber pengetahuan yang mungkin guru sendiri belum mengetahuinya.
4. Kenyataan menunjukkan bahwa masyarakat membutuhkan orang-orang terdidik, dan anak didik pun membutuhkan masyarakat.

D. HUBUNGAN MASYARAKAT DENGAN SEKOLAH

Masyarakat atau disebut dengan istilah lain *community* atau *society*, adalah satu kelompok atau sekumpulan kelompok yang mendiami suatu daerah. Menurut Robert W. Richey (1968:489) dalam Hasbullah (2005:95), istilah masyarakat dapat diartikan sebagai suatu kelompok manusia yang hidup bersama di suatu wilayah, dengan cara berpikir dan bertindak yang (relative) sama yang membuat warga masyarakat itu menyadari diri mereka sebagai suatu kesatuan (kelompok).

Secara kualitatif dan kuantitatif, anggota masyarakat terdiri dari berbagai ragam

pendidikan, profesi, keahlian, suku bangsa, kebudayaan, agama, lapisan sosial, dll. sehingga menjadi masyarakat yang majemuk. Dilihat dari konsep pendidikan, masyarakat adalah sekumpulan orang banyak dengan berbagai ragam kualitas diri mulai dari yang tidak berpendidikan sampai dengan yang berpendidikan tinggi. Sementara itu, dilihat dari lingkungan pendidikan, masyarakat disebut lingkungan pendidikan nonformal yang memberikan pendidikan secara sengaja dan terencana kepada seluruh anggotanya, tetapi tidak sistematis.

Antara masyarakat dengan pendidikan mempunyai keterkaitan dan saling berperan. Setiap orang selalu menyadari akan peranan dan nilai pendidikan. Setiap anggota masyarakat bercita-cita dan aktif berpartisipasi untuk membina dan memajukan pendidikan. Karena itu hubungan masyarakat dengan pendidikan sangat bersifat korelatif, bahkan seperti telur dengan ayam. Masyarakat maju karena pendidikan, dan pendidikan yang maju hanya akan ditemukan dalam masyarakat yang maju pula. Sanafiah Faisal (1988:148-151) mengemukakan hubungan antara sekolah (pendidikan) dengan masyarakat paling tidak, dilihat dari dua segi, yaitu :

1. Sekolah sebagai partner masyarakat di dalam melaksanakan fungsi pendidikan. Dalam konteks ini, berarti sekolah dengan masyarakat adalah sebagai pusat-pusat pendidikan yang potensial dan mempunyai hubungan fungsional.
 - a. Fungsi pendidikan di sekolah sedikit banyak dipengaruhi oleh corak pengalaman seseorang di lingkungan masyarakat. Pengalaman dimaksud bisa dalam pergaulan, jenis bacaan, tontonan, serta aktivitas-aktivitas lainnya yang bisa kondusif/positif, bisa juga tidak kondusif/negatif.
 - b. Fungsi pendidikan di sekolah pun akan dipengaruhi oleh sedikit banyaknya serta fungsional tidaknya pendayagunaan sumber-sumber belajar di masyarakat, seperti adanya perpustakaan umum, museum, kebun binatang, peredaran koran/majalah, radio, tv, internet, dan sumber-sumber belajar lainnya, termasuk guru-guru, sarana dan prasarana.
2. Sekolah sebagai prosedur yang melayani pesan-pesan pendidikan dari masyarakat lingkungannya. Dalam konteks ini, antara masyarakat dengan sekolah memiliki ikatan hubungan rasional berdasarkan kepentingan kedua belah pihak. Hubungan rasional dimaksud adalah :

- a. Sebagai lembaga layanan terhadap kebutuhan pendidikan masyarakatnya, sekolah tentu membawa konsekuensi-konsekuensi konseptual dan teknis sehingga berkesesuaian antara fungsi pendidikan yang dimainkan oleh sekolah dengan apa-apa yang dibutuhkan masyarakatnya. Dalam hal ini tujuan pendidikan, baik di tingkat institusional, kurikuler, maupun instruksional (TIU/TIK), semuanya harus disesuaikan secara rasional dengan persyaratan-persyaratan kemampuan dan kepribadian yang secara ideal maupun praktis diciptakan atau dibutuhkan oleh masyarakat bersangkutan.
- b. Akurasi sasaran atau target pendidikan yang ditangani oleh lembaga atau organisasi persekolahan akan ditentukan pula oleh kejelasan formulasi kontrak antara sekolah selaku pelayan, dengan masyarakat selaku pemesan. Dalam hal ini rumusan-rumusan umum tentang kebutuhan dan cita-cita pendidikan yang dikehendaki masyarakat memerlukan operasionalisasi dan spesifikasi, sehingga memungkinkan pengukuran terhadap terpenuhi tidaknya fungsi layanan sekolah sebagaimana yang dibebankan oleh masyarakat tersebut. Maka diperlukan pendekatan komprehensif di dalam pengembangan program dan kurikulum untuk masing-masing jenis dan jenjang persekolahan yang diperlukan.
- c. Pemenuhan fungsi sekolah sebagai pihak yang dikontrak untuk melayani pesanan-pesanan pendidikan oleh masyarakatnya, sedikit banyak akan dipengaruhi oleh ikatan-ikatan obyektif di antara keduanya. Ikatan obyektif dimaksud bisa berupa perhatian, penghargaan, dan topangan-topangan tertentu seperti dana, fasilitas, dan jaminan-jaminan lainnya yang memberikan arti penting terhadap eksistensi dan produk persekolahan. Hubungan antara sekolah dengan masyarakat yang mengontraknya, jika tidak disertai dengan jaminan dan ikatan-ikatan obyektif sebagaimana layaknya yang terjadi antara pihak yang mengontrak dengan pihak yang dikontrak, sedikit banyak akan berpengaruh pada penunaian tugas dan fungsi lembaga persekolahan. Dengan demikian, maka penggarapan pada sistem yang berfungsi melembagakan kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap keberadaan serta *output* (produk) sekolah, dengan sendirinya menjadi sangat penting dan diperlukan.

BAB V
PENGARUH TIMBAL BALIK
ANTARA KELUARGA, SEKOLAH, DAN MASYARAKAT
DALAM PENDIDIKAN

A. PERGAULAN DALAM KELUARGA, SEKOLAH, DAN MASYARAKAT

1. Pergaulan dalam Keluarga.

Pada umumnya keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak, yang masing-masing saling membutuhkan dan mempengaruhi. Semua meladeni seorang, dan seorang meladeni semua. Anak membutuhkan makanan, minuman, pakaian, bimbingan, dsb. dari orang tua, dan orang tua membutuhkan rasa kebahagiaan dengan kelahiran dan kelucuan anak. Anak yang semakin besar dibutuhkan pikiran dan tenaganya untuk membantu orang tua, lebih-lebih jika orang tua semakin tidak berdaya karena usia atau terganggu kesehatannya.

Peran pertama dan utama orang tua adalah memelihara, mendidik, dan membimbing anak selama belum dewasa dan mampu mandiri. Untuk membawa anak kepada kedewasaan, orang tua harus memberi contoh teladan yang baik, karena anak suka meniru (mengimitasi) kepada orang tua atau orang yang lebih tua daripadanya. Dengan teladan yang baik, anak tidak akan merasa dipaksa dalam menyikapi atau melakukan tugas-tugas kehidupannya. Orang tua dalam memberikan pengaruh (sugesti) kepada anak, hendaklah melalui sistem pergaulan yang baik dan ceria, tidak dengan cara otoriter, sehingga anak dengan senang melaksanakan tugas kewajibannya dalam keluarga. Biasanya anak suka untuk mengidentifikasi diri dengan orang tuanya, seperti anak laki-laki terhadap ayahnya, dan anak perempuan terhadap ibunya. Antara anak dengan orang tua harus ada rasa simpati dan kekaguman.

Hubungan anak-anak dengan orang tua dan anggota keluarga lain saling mempengaruhi dan tidak lepas dari adanya faktor-faktor interaksi. Secara tidak langsung setiap anak berguru kepada orang tua, saudara-saudaranya, dan orang-orang yang ada di keluarga tersebut, sehingga dia menjadi tahu dan merasa wajib

memberi sebagaimana dia merasa perlu pemberian, baik materi maupun nonmateri. Antaranak dalam keluarga belajar tukar-menukar pengalaman, pengetahuan, dll. sehingga semakin banyak hal-hal yang diketahui terutama tentang nilai-nilai dan norma, antara lain hal-hal yang baik-buruk, benar-salah, indah-jelek, hak dan kewa-jiban, saling menyayangi, dsb. dengan adanya hubungan satu sama lainnya. Pergaul-an antara orang tua dengan anak-anaknya dalam usaha pendewasaan, menunjuk-kan bahwa pergaulan dalam keluarga mengandung gejala-gejala pendidikan.

2. Pergaulan dalam Sekolah.

Di sekolah akan terjadi hubungan atau interaksi antara kepala sekolah dengan guru, kepala sekolah dengan petugas tata usaha, guru dengan guru, guru dengan siswa, dan siswa dengan siswa atau antarsiswa. Khusus tentang guru dengan siswa, dengan wibawanya guru akan membawa siswa sebagai anak didik ke arah kedewasaan. Memanfaatkan pergaulan sehari-hari dalam proses pendidikan merupakan cara terbaik dan efektif dalam rangka pembentukan pribadi siswa, dan dengan cara itu pula menghilangkan jurang pemisah (gap) antara guru dengan siswa.

Interaksi antarsiswa juga menunjukkan suasana edukatif. Sesama siswa saling berkawan dan kesetiakawanan, belajar bersama, olah raga bersama, kesenian bersama, saling mengajak dan diajak, saling bercerita, saling mendisiplinkan diri agar tidak menyinggung perasaan teman sepergaulan, dll. dengan koridor aturan-aturan sekolah. Hubungan siswa dengan siswa adakalanya sederajat, dan ada kalanya yang satu lebih tinggi atau lebih rendah tingkat kedewasaannya dari yang lainnya. Dalam kaitan ini, bisa terjadi adanya pergaulan sehari-hari yang berpengaruh positif maupun negatif. Pergaulan yang berpengaruh positif inilah yang mengandung gejala-gejala pendidikan, yang perlu terus diawasi dan diarahkan. Sementara yang berpengaruh negatif harus diupayakan dicegah atau diselesaikan sehingga tidak berkelanjutan.

Aktivitas di sekolah yang mengandung gejala pendidikan antara lain adanya organisasi intrapelajar/siswa (OSIS), pelajaran olah raga, kesenian, latihan baris-berbaris, upacara bendera, kegiatan kepramukaan, prakarya atau pelajaran kete-

rampilan, kerja bakti, dsb. Semua itu mengharuskan para siswa berdisiplin dan meningkatkan “keprofesionalannya”.

3. Pergaulan dalam Masyarakat.

Masyarakat merupakan perwujudan kehidupan bersama manusia, karena di dalamnya berlangsung proses kehidupan sosial, proses antarhubungan, dan antaraksi. Di dalam masyarakat sebagai suatu lembaga kehidupan manusia, berlangsung pula keseluruhan proses perkembangan kehidupan. (Muhammad Noor Syam, 1996:183). Dalam konteks pendidikan, lingkungan masyarakat merupakan lembaga pendidikan selain keluarga dan sekolah. Menurut Djumberansyah Indar (1994:66), pergaulan di masyarakat bagi anak akan membentuk kebiasaan, pengetahuan, minat dan sikap, kesusilaan, kemasyarakatan, dan keagamaan. Di masyarakatlah anak melakukan pergaulan yang berlangsung secara informal baik dari para tokoh masyarakat, penguasa atau pejabat (Camat, Lurah/Kepala Desa, Ketua RW/RT,dll.) dan para pemimpin agama (Kiyai, Ustadz, Pendeta, Pastur, Bhiksu, dll.), dsb.

Mengenai pergaulan ini, dalam ajaran Tonnis, dibedakan antara pergaulan hidup dalam *Gemeinschaft* (persekutuan, paguyuban), dan *gesselschaft* (perbuatan, patembayan). Hubungan paguyuban dibentuk oleh kodrat, seperti orang tua dengan anak, kekerabatan seperti antar keluarga atau warga, dll. yang sama sekali tidak ada motif keuntunganh. Sedangkan hubungan petembayan dibentuk oleh adanya kepentingan tertentu terutama yang berkaitan dengan ekonomi, misalnya koperasi, organisasi dagang (NV, CV, kongsi, dsb.).

Demikianlah, dalam pergaulan sehari-hari seseorang terutama anak-anak dengan tokoh-tokoh agama, terkemuka, masyarakat, pejabat, mengandung gejala-gejala pendidikan karena mengarah pada hal-hal positif, menuju kepada nilai-nilai luhur. Adanya teguran dari orang yang lebih dewasa dalam bidang-bidang tertentu terhadap anak nakal, jorok, melakukan perbuatan yang membahayakan, dll. juga merupakan gejala dan proses pendidikan. Begitu juga berkumpulnya sesama teman untuk bercerita, tukar-menukar pengetahuan dan pengalaman, bermain dengan disiplin mengikuti aturan permainan, dll. tidak terlepas dari kandungan gejala pendidikan.

4. Kewibawaan dalam Pergaulan.

Dalam proses pendidikan, kewibawaan merupakan syarat bagi orang tua dan pendidik dan digunakan untuk membawa anak didik ke kedewasaan. Oleh karena itu kewibawaan termasuk alat pendidikan, karena tanpa kewibawaan tidak mungkin anak didik mau menurut atau mengikuti, dan bahkan malah akan menentang terhadap orang tua dan guru.

Salah seorang tokoh pendidikan, yaitu Langeveld (Sutari Iman Barnadib, 1986: 33), menyatakan bahwa pendidikan yang sungguh-sungguh baru dapat diberikan setelah anak mengenal kewibawaan, yaitu kira-kira berusia tiga tahun. Sebelum usia tiga tahun, biasanya anak merasa diberi semacam paksaan (*dressur*). Akan tetapi sebenarnya paksaan-paksaan yang diberikan kepada anak yang masih sangat kecil itu sebagai pendidikan pendahuluan, agar menjadi kebiasaan yang baik nantinya. Adanya pergaulan menyediakan kemungkinan sebagai lapangan pendidikan, dan di dalam pergaulan ini anak dapat bersikap kritis terhadap perbuatan orang dewasa, dan sebaliknya, orang dewasa dapat mengkritik peniruan anak.

B. PENGARUH SEKOLAH TERHADAP MASYARAKAT

Pendidikan selalu diarahkan untuk pengembangan nilai-nilai kehidupan manusia. Dalam pengembangan nilai ini, tersirat pengertian manfaat yang ingin dicapai oleh manusia dalam kehidupannya. Jadi, apa yang ingin dikembangkan merupakan hal yang dapat dimanfaatkan dari arah pengembangan itu sendiri. Namun, pendidikan tidak dapat lepas dari efek-efek luar yang saling mempengaruhi keberadaannya, terutama bagi masyarakat sekitarnya, yang memiliki hubungan saling ketergantungan (*interdependensi*).

Pengaruh sekolah terhadap masyarakat pada dasarnya bergantung kepada luas tidaknya produk serta kualitas (*out put*) sekolah itu sendiri. Semakin besar *out put* (lulusan) sekolah tersebut disertai kualitas yang mantap, dalam arti mampu mencetak Sumber Daya Manusia (SDM atau *human resources*) yang bermutu, maka tentu saja pengaruhnya sangat positif bagi masyarakat. Sebaliknya, meskipun sekolah mampu

mengeluarkan out put-nya tetapi dengan SDM yang rendah (tidak bermutu), maka menjadi masalah, tidak saja bagi out put yang bersangkutan, tetapi juga berpengaruh bagi masyarakat. SDM yang bermutu merupakan investasi nonmateri/nonfinansial yang sangat penting untuk perkembangan dan kemajuan masyarakat dan bangsa, sebab manusia itu sendiri adalah subyek (pelaku) dalam setiap perkembangan, perubahan, dan kemajuan dalam masyarakat dan negara.

Antara sekolah dengan masyarakat terdapat hubungan yang erat dan saling mempengaruhi satu sama lain. Berikut ini adalah pengaruh yang dimainkan oleh sekolah terhadap masyarakat.

1. Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat.

Tingkat kecerdasan masyarakat sedikit banyak dapat dikembangkan melalui berbagai program pendidikan di sekolah. Berkenaan dengan kenyataan ini, secara historis mengenai persekolahan, selalu menjadi isi dan arah dari program pendidikan di sekolah-sekolah. Membaca, menulis, dan berhitung (calistung) dan pengetahuan umum, merupakan pengetahuan dasar dalam upaya mencerdaskan kehidupan masyarakat dan bangsa. Upaya pencerdasan kehidupan masyarakat dan bangsa ini perlu pengembangan lebih lanjut secara sistematis melalui program pendidikan jalur formal, yaitu sekolah. Peran yang dimainkan oleh lembaga pendidikan persekolahan dalam peningkatan kecerdasan anak didiknya secara langsung dapat dipandang sebagai kontribusi lembaga pendidikan sekolah dalam rangka mencerdaskan kehidupan masyarakat dan bangsa.

Peran sekolah dimaksud sangat menentukan bagi masyarakat, terutama dalam rangka menanggulangi dan memecahkan aneka ragam masalah yang dihadapi masyarakat dan bangsa. Tanpa kecerdasan yang memadai, maka setiap masalah yang dihadapi akan dipandang sulit dan rumit. Akan tetapi bagaimana pun sulit dan rumitnya persoalan, jika dihadapi oleh orang yang tingkat kecerdasannya memadai, atau malah tinggi, maka akan mudah dipecahkan. Realitas membuktikan bahwa tantangan demi tantangan dalam kehidupan masyarakat dan bangsa semakin deras dan berat. Hal ini sebagai akibat perubahan yang pesat yang dipengaruhi oleh perkembangan iptek. Di sinilah urgensi yang semakin tinggi dari upaya mencerdas-

kan kehidupan masyarakat dan bangsa agar tidak terseret atau terbawa arus negatif kemajuan yang menyimpannya. Itulah kehebatan para pendahulu kita dalam menyusun UUD 1945 yang salah satu tugas atau misi negara yang tercantum dalam Pembukaannya adalah *mencerdaskan kehidupan bangsa*, selain melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

2. Membawa Bibit Pembaruan bagi Perkembangan Masyarakat.

Sistem pendidikan yang berjalan saat ini umumnya masih berperan sebagai sarana transfer pengetahuan yang dianggap benar dan berlaku. Hal ini banyak dikecam karena pengetahuan yang dianggap benar tersebut bukan saja akan menjadi usang dengan ditemukannya pengetahuan yang lebih baru, tetapi juga karena hasil pendidikan yang sangat diharapkan dapat dipakai sebagai modal penting dalam menghadapi dan menanggapi modernisasi dan tantangan perkembangan zaman secara kreatif menjadi terhambat.

Semakin pesatnya perkembangan iptek di satu pihak, dan masalah-masalah atau tantangan pada pihak lain yang tidak henti-hentinya, mendorong lahirnya pemikiran-pemikiran dan praktek-praktek baru yang bersifat inovatif. Maksudnya, untuk perbaikan kehidupan masyarakat, paling tidak dilakukan perbaikan dalam sistem pendidikan yang *up to date*, mengikuti perkembangan zaman dengan tetap berpijak pada sendi-sendi moral agama dan Pancasila.

Dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat, sangat diperlukan adanya pengetahuan dan teknologi baru, serta pemikiran-pemikiran inovatif yang bersifat fungsional. Apa yang menjadi program pendidikan di sekolah di samping menjamin upaya peningkatan kecerdasan, juga mengupayakan transformasi pengetahuan, pemikiran, dan praktek-praktek baru, terutama yang dianggap fungsional dan relevan dengan jenis dan tingkatan dari sekolah masing-masing. Materi atau program pendidikan demikian dapat disebut sebagai transformasi bibit-bibit pembaruan yang pada gilirannya akan berfungsi dan menjalar di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

3. Menciptakan Kesiapan Warga Masyarakat Terbekali untuk Kepentingan Kerja.

Anak didik di sekolah pada akhirnya akan kembali dan menjadi warga masyarakat yang memerlukan pekerjaan untuk menopang kehidupannya. Untuk terjun ke dunia kerja, seseorang dituntut siap dengan berbekal sikap, pengetahuan dan keterampilan tertentu yang diperlukan oleh lapangan kerja. Penyiapan ini tidak terlepas dari perhatian dan fungsi lembaga pendidikan sekolah. Hal ini terlihat misalnya dari jalur atau program pendidikan kejuruan dan dari isi kurikulum masing-masing program pendidikan.

Dengan berfungsinya lembaga pendidikan sekolah dalam memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang relevan bagi dunia kerja, maka secara langsung membawa efek terhadap lapangan kerja di masyarakat. Kualitas dan kuantitas sistem lembaga pemberi kerja di masyarakat sedikit banyak dipengaruhi pula oleh out put atau produk sistem pendidikan sekolah tersebut. Maka, wajarlah jika kualifikasi pendidikan seseorang dijadikan salah satu pertimbangan dalam seleksi dan pengadaan pada lembaga-lembaga pemberi kerja.

4. Memunculkan Sikap Positif dan Integrasi Sosial yang Harmonis.

Dalam sistem pendidikan persekolahan sejak tingkat dasar sampai dengan perguruan tinggi, sikap positif dan konstruktif yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, senantiasa menjadi perhatian pemerintah. Hal ini berkaitan dengan falsafah hidup dari suatu bangsa atau masyarakat. Bagi Indonesia tentu saja Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Baik di tingkat pendidikan dasar, menengah, maupun perguruan tinggi, moral dan tata etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hak dan kewajiban sebagai warga negara, selalu terintegrasi dalam kurikulum pendidikannya. Begitu juga persatuan dan kesatuan serta loyalitas warga negara terhadap tujuan dan tugas (*visi, misi* dan *program kerja*) negara/pemerintah sedikit banyak diwarnai oleh pendidikan persekolahan.

Demikianlah, maka sekolah dituntut dapat berperan sejalan dengan keinginan masyarakat. Peran yang dituntut dimaksud antara lain :

a. *Konservatif*.

Sekilas, istilah konservatif berkonotasi negatif, akan tetapi dalam konteks ini konservatif maksudnya menyimpan dan mengawetkan sesuatu upaya tahan lama. Barang-barang (material) dan spiritual seperti ilmu pengetahuan, kebudayaan, agama, dapat dikonservasi atau disimpan lama. Dalam hal ini sekolah berperan untuk menyimpan, mengawetkan, dan memelihara unsur-unsur yang baik dalam kebudayaan suatu bangsa.

b. *Evaluatif dan Inovatif*.

Di samping konservatif, sekolah juga hendaknya mempunyai peranan evaluatif dan inovatif, sehingga anak didik tidak hanya menerima begitu saja kebudayaan generasi lama. Mengingat dunia sudah memasuki era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan iptek, maka diperlukan budaya, pengetahuan, dan keterampilan, nilai-nilai, sikap, serta adat kebiasaan yang disesuaikan dengan zaman modern. Anak didik hendaknya diberi kesempatan untuk menilai secara kritis. Sekolah diharapkan dapat bergerak secepat perubahan yang terjadi di masyarakat agar tidak ketinggalan dan senantiasa menjadi kebutuhan masyarakat. Sementara nilai-nilai, moral, dan norma-norma dari masa lampau tetap diajarkan dan disesuaikan dengan zaman modern (nilai *instrumental* dan *praksis* Pancasila, tanpa meninggalkan *nilai dasarnya*).

Memang realitas menunjukkan kesulitan bagi para guru untuk melepaskan diri dari cara-cara mereka dahulu belajar dan diberi jenis-jenis mata pelajaran yang mereka peroleh sewaktu studi. Jadi, sukar sekali mengeluarkan suatu mata pelajaran dari kurikulum karena sudah bertahun-tahun diajarkan di sekolah, kendati sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Maka inovasi atau pembaruan harus dilakukan mulai dari para guru sendiri.

C. PENGARUH MASYARAKAT TERHADAP SEKOLAH

Masyarakat senantiasa memiliki dinamika untuk selalu tumbuh dan berkembang. Anggota masyarakat pun memiliki identitas sendiri sesuai dengan pengalaman budaya

dan perbendaharaan ilmunya. Masyarakat sebagai suatu totalitas memiliki *physical environment* (lingkungan alamiah, benda-benda, kekayaan material, iklim) dan *social environment* (manusia, kebudayaan, nilai-nilai termasuk agama), juga Sumber Daya Alam (SDA) dan SDM.

Keterkaitan masyarakat dengan pendidikan sangat erat dan saling pengaruh-mempengaruhi. Masyarakat yang baik, maju, dan modern adalah masyarakat yang di dalamnya ditemukan suatu tingkat pendidikan yang baik, maju, dan modern pula, dalam wujud lembaga-lembaganya maupun jumlah dan tingkat orang yang terdidiknya. Dengan perkataan lain, masyarakat maju karena adanya pendidikan yang maju, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Atau pendidikan maju menyebabkan masyarakat pun maju.

Masyarakat dengan segala atribut dan identitasnya yang memiliki dinamika ini, secara langsung akan berpengaruh terhadap pendidikan persekolahan. Pengaruh dimaksud antara lain :

1. Terhadap Orientasi dan Tujuan Pendidikan.

Masyarakat dengan segala dinamikanya senantiasa membawa pengaruh terhadap orientasi dan tujuan pendidikan pada lembaga persekolahan. Hal ini dapat dimengerti mengingat sekolah lembaga yang dilahirkan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Arah program pendidikan persekolahan biasanya tercermin di dalam kurikulum. Akan tetapi dalam kenyataannya bisa terjadi perubahan dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat dari perkembangan iptek, pertumbuhan penduduk, dan perubahan politik negara. Munculnya orientasi dan tujuan baru yang berkembang dalam masyarakat, baik dilihat secara makro maupun mikro, sedikit banyak akan mendapat perhatian lembaga pendidikan sekolah. Sebagai bukti, berbedanya orientasi dan tujuan pendidikan pada masing-masing negara, adalah karena pengaruh identitas masyarakatnya yang berbeda pula.

Demikianlah, maka tidak pernah ada kurikulum pendidikan yang berlaku permanen. Kurikulum akan selalu dinilai, disempurnakan, dan disesuaikan dengan tuntutan perkembangan masyarakat atau kemajuan zaman.

2. Terhadap Proses Pendidikan di Sekolah.

Pengaruh masyarakat di bidang sosial-budaya dan partisipasinya adalah sesuatu yang jelas membawa pengaruh pula terhadap keberlangsungan proses pendidikan sekolah. Realitas sosial-budaya masyarakat seperti feodal, demokratis, mempunyai mentalitas modern atau sebaliknya, semuanya berpengaruh terhadap proses pendidikan yang berlangsung di sekolah. Dalam konteks ini, dapat dikatakan sekolah sebagai “miniatur” dari masyarakat yang lebih luas di lingkungannya berada.

Pengaruh sosial-budaya biasanya tercermin dalam proses belajar-mengajar, baik yang menyangkut pola aktivitas pendidik maupun anak didiknya, misalnya pengembangan Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) sekarang, yang implementasinya banyak dipengaruhi dan diwarnai oleh nilai-nilai sosial budaya masyarakat Indonesia. Tentu harus disadari juga bahwa nilai-nilai sosial-budaya yang sudah “mempribadi” dalam masyarakat, terkadang bisa bersifat positif yang mendukung, tetapi bisa juga berdampak negatif yang menghambat proses pendidikan. Karena itu dalam upaya pembaruan dalam proses pendidikan di sekolah, pengaruh sosial-budaya dari masyarakat itu perlu diperhitungkan dengan seksama.

Penyelenggaraan pendidikan di sekolah melibatkan berbagai komponen, baik unsur manusia maupun bukan manusia (dana, sarpras atau fasilitas, dll.). Jelaslah adanya partisipasi masyarakat akan berpengaruh terhadap proses penyelenggaraan pendidikan sekolah. Berfungsinya proses penyelenggaraan pendidikan dimaksud justru bergantung pada kualitas dan kuantitas komponen-komponen tersebut. Itulah sebabnya dituntut adanya jalinan hubungan yang harmonis antara sekolah dengan masyarakat. Jalinan hubungan ini realisasinya dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk. Dalam kaitan ini Havighurst dan Neugarten (Hasbullah, 2005:113), mengemukakan bahwa sekolah haruslah dapat mengajar anak didik untuk dapat menemukan, mengembangkan, dan menggunakan sumber-sumber yang ada di masyarakat. Berdasarkan pernyataan ini, perubahan-perubahan sosial-budaya telah menghasilkan perubahan sistem pendidikan, dan pada saat yang sama para pendidik juga mesti mengadakan kontrol dan mengarahkan perubahan sosial-budaya.

BAB VI

PENDIDIKAN AGAMA DI INDONESIA

A. PENERAPAN SISTEM NILAI DAN MORAL AGAMA DALAM PROSES PENDIDIKAN

Menurut ajaran Islam, manusia terdiri dari dua unsur, yaitu unsur ardi (bumi) dan unsur samawi (langit). Unsur ardi adalah jasmaniah, dan unsur samawi adalah rohani-ah. Kenyataan ini diakui oleh ahli filsafat sejak zaman Yunani sampai sekarang. Jasmaniah meliputi seluruh jasad manusia, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan (bagian dalam tubuh). Semuanya terdiri dari zat, materi, yang membutuhkan asupan makanan dan minuman termasuk mineral, vitamin, dan zat-zat yang dibutuhkan tubuh. Demikian juga rohani membutuhkan asupan makanan yang berupa santapan rohani, seperti agama, moral, dan budi pekerti, yang dilakukan melalui proses pendidikan, bimbingan, dan penyuluhan, termasuk rekreasi, dan istirahat.

Jasmani memiliki dorongan hawa nafsu, jika tidak dikendalikan dapat membuat kesalahan dan keonaran, atau melanggar norma termasuk norma hukum. Begitu juga rohani, kendati selalu mengajak pada jalan lurus dan benar, tetapi karena pengaruh lingkungan, dapat tergelincir dan melaksanakan perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan ajaran kebenaran dan kebaikan. Karena itu dibutuhkan pendidikan. Demikianlah, manusia perlu dibentengi dengan nilai-nilai luhur agama dan moral, mengingat pengaruhnya yang besar terhadap kehidupan manusia dan masyarakat. Tanpa ajaran agama dan moral, manusia akan terseret pada kelalaian, kealpaan, dan lupa diri. Kelalaian dan kealpaan ini dapat disebabkan karena kesibukan dalam rangka memenuhi tuntutan kebutuhan materi yang tak kunjung terpuaskan. Banyak faktor yang menyebabkan manusia terpeleset ke jurang kehancuran karena kelalaian dan kealpaan ini, terutama karena godaan urusan “duniawiah” dengan berbagai motifnya.

Banyak orang yang melakukan pelanggaran dan kejahatan, dapat ditelusuri dari melalui pendidikan dan lingkungannya. Biasanya, jika pendidikan dan lingkungan baik, orang akan bersikap dan bertindak laku baik pula, karena telah menginternalisasikan nilai-nilai luhur agama dan moral yang diajarkan kepadanya sejak kecil sampai memasuki usia dewasanya. Ajaran agama dan moral akan mempengaruhi dan mewarnai perkembangan jiwa dan kepribadiannya. Kehidupan ini tak ubahnya seperti air

yang keluar dari sumbernya di pegunungan yang bersih dan bening. Namun dalam perjalanannya menuju samudera, bercampur dengan air atau zat-zat lain lain yang telah tercemar polusi, sehingga warna dan baunya [pun berubah, bahkan mengandung racun. Dalam keadaan tenang dan disaring (didestilasi), air tersebut dapat kembali bersih dan bening. Memang menurut teori Freud (ahli psikoanalisis), bahwa tingkah laku manusia dalam kehidupannya dalam pergaulan masyarakat, dapat dicari asal-usulnya dari keadaan pendidikan dan kehidupan di lingkungan keluarga (rumah tangganya). Jika keadaan kehidupan rumah tangganya baik dan diwarnai oleh norma agama dan moral, maka tampilan tingkah lakunya dalam masyarakat akan baik pula. Sebaliknya, jika dia bertingkah laku tidak baik, dapat dipastikan hal tersebut sebagai pencerminan keadaan kehidupan di rumah tangganya juga tidak baik.

Pendidikan moral dalam Islam berjalan sangat sistematis dan kontinyu, yaitu mulai dari lingkungan keluarga sampai ke sekolah dan masyarakat dengan berbagai saluran. Penerapan ajaran Islam ini antara lain melalui rukun iman dan rukun Islam. Pengakuan secara tulus dan sadar akan ke-Esa-an Allah Swt. dan Muhammad sebagai utusan-NYA, yang keluar dari hati sanubari yang bersih tanpa paksaan, atau motivasi ganda selain Allah, maka semua aturan (kewajiban dan larangan-NYA) akan dipatuhi dan dikerjakan tanpa argumentasi untuk menolaknya, dan terus akan dilakukan secara murni dan konsekuen. Akan tetapi, jika pengakuan kurang mantap, tidak keluar dari hati sanubari yang murni, maka banyak orang yang mengabaikan ajaran agama, dengan bertingkah laku tidak baik.

B. SEJARAH PERGURUAN AGAMA ISLAM

Berbicara tentang pendidikan agama Islam, ternyata dalam perjalanan sejarahnya sangat panjang, karena sudah ada semenjak agama Islam itu sendiri masuk dan eksis di bumi nusantara, kendatipun dalam pengertian yang sangat sederhana, yaitu pendidikan atau perguruan yang diselenggarakan di langgar/surau, masjid, pesantren dan madrasah. (Mahmud Yunus, 1985:6). Membicarakan pendidikan atau perguruan agama Islam menjadi sangat penting, tidak saja bagi umat Islam yang memang mayoritas dari penduduk Indonesia, tetapi juga dalam konteks pendidikan nasional.

Perguruan agama Islam inilah sebenarnya yang menjadi cikal bakal lahirnya pendidikan nasional. Memang, sebelum pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan sistem pendidikan Barat yang modern, pendidikan pesantren merupakan satu-satunya lembaga pendidikan “formal” di Indonesia. Karena itulah pesantren ini merupakan “Bapak” pendidikan di Indonesia. (Hasbullah, 1995:2).

Sejarah perguruan Islam yang akan dipaparkan dalam tulisan ini dimulai sejak abad ke-19, sebab di abad 19 itu merupakan babakan baru tentang pendidikan Islam dengan pertumbuhan dan perkembangan yang cukup pesat dan pengelolaannya sudah terorganisasi rapi. Keadaan ini terjadi karena :

1. Sudah mulai masuknya pemikiran-pemikiran pembaruan di Timur Tengah.
2. Mendapat saingan dari pendidikan modern oleh pemerintah kolonial Belanda.

Perjalanan historis perguruan-perguruan agama Islam dimaksud secara ringkas sebagai berikut.

1. Perkembangan Agama Islam dan Kelahiran Lembaga-lembaga Pendidikan Islam.

Pada abad ke-19 ini sebenarnya masa menghebatnya usaha-usaha pemerintah kolonial Belanda menekan umat Islam Indonesia dengan berbagai cara, dari mempersulit perizinan sampai pelarangan berdakwah atau penyelenggaraan pengajaran agama Islam. Bahkan banyak kiayi atau ulama yang diberikan semacam surat keputusan (besluit) pengangkatannya dengan penekanan tidak boleh menyampaikan dakwah terutama yang berkaitan dengan “jihad” karena kekhawatiran “berontak” atau makar kepada pemerintah. Akan tetapi, ternyata bagi para kiyai dan ulama serta umat Islam pada umumnya hal ini tidak mematikan semangat berdakwah, malahan lebih termotivasi untuk mengembangkan perjuangannya. Hal ini semakin terasa perubahannya tatkala banyak umat Islam yang berangkat haji ke tanah suci Makkah, yang kembalinya membawa paham dan pemikiran yang berbau pembaruan.

Dampak dari pemikiran pembaruan seperti didengungkan oleh Syeh Djamiluddin Al-Afghani, Rasyid Ridlo, Muhammad Abduh, Ibnu Taimiyah, dll. sangat dirasakan dalam dunia pendidikan di tanah air, misalnya :

- a. Perubahan sistem pengajaran dari perseorangan menjadi sistem klasikal;

- b. Pemberian pengetahuan umum di samping pengetahuan agama Islam dan bahasa Arab.

Di antara ulama yang berjasa dalam upaya pengembangan pendidikan Islam, terutama dari model lama di pesantren tradisional yang hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama ke sistem madrasah antara lain :

- a. *Syeh Abdullah Ahmad*, pendiri Madrasah Adabiyah di Padang Sumbar pada tahun 1909. Madrasan ini adalah yang pertama di Indonesia, yang pada mulanya bercorak agama semata, kemudian pada tahun 1915 ketika menjadi HIS (Holland Inland School) memasukkan pelajaran pengetahuan umum dalam kurikulumnya.
- b. *Syeh M. Thaib Umar*, pendiri Madrasah School di Batusangkar Sumut tahun 1910. Di madrasah ini para siswanya tidak lagi duduk bersila secara berhalaqoh, melainkan duduk berjajar, menggunakan meja, kursi, dan papan tulis, artinya sudah memperkenalkan sistem belajar modern. Pelajaran umum yang diberikan antara lain berhitung dan aljabar. Sayang sekali, karena bisa jadi terlalu dianggap modern, tahun 1914 madrasah ini tutup.
- c. *Rahmah el-Yunusiah*, yang mendirikan Madrasah Diniyah Putri di Padang Panjang tahun 1923. Madrasah ini untuk menghasilkan calon ibu rumah tangga yang berpendidikan, sehingga diharapkan dapat menangani tugas-tugas pendidikan baik di rumah, sekolah, maupun masyarakat.
- d. *K.H. Abdul Wahab Hasbullah* dan *K.H. Mas Mansur*, yang mendirikan Madrasah Taswirul Afkar tahun 1914. Selain pelajaran agama, di madrasah ini diberikan juga pelajaran umum.
- e. *K.H. Hasyim Asy'arie*, yang mendirikan Madrasah Salafiah di Tebuireng Jombang, Jatim tahun 1916.
- f. *K.H. Ahmad Dahlan*, yang mendirikan Muhammadiyah tanggal 18 November 1912 yang membawahkan berbagai lembaga pendidikan dengan sistem modern, memadukan pelajaran agama dan pengetahuan umum.
- g. Dan lain-lain.

Di samping para tokoh tersebut di atas yang mendirikan perguruan Islam yang bersifat perorangan, banyak juga organisasi Islam yang lahir dan bergerak di bidang pendidikan dan sosial kemasyarakatan, misalnya :

a. *Muhammadiyah*.

Didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada 18 November 1912M/8 Dzulhijjah 1330 H. Tujuan Muhammadiyah adalah untuk memperluas dan mempertinggi pendidikan agama Islam secara modern, serta memperteguh keyakinan tentang agama Islam sehingga terwujudlah masyarakat Islam yang sebenarnya. (Djumhur dan Danasaputra, 1979:164). Di samping sekolah-sekolah umum, madrasah yang ada di bawah Muhammadiyah a.l. Madrasah Ibtidaiyah setingkat SD, Madrasah Tsanawiyah setingkat SLTP, Madrasan Muallimin setingkat SGB, Madrasan Muballighin/Muballighat setingkat SGA, dan Madrasah Diniyah yang khusus mengajarkan agama.

b. *Jami'at Khair*.

Didirikan pada 17 Juli 1905 di Jakarta oleh Sayid Muhammad Al-Fachir bin Abdurrahman Al-Masyhur, Sayid Idrus bin Ahmad bin Syihab, dan Sayid Syehan bin Syihab. Selain mendirikan sekolah-sekolah, Jami'at Khair ini juga mengirimkan para siswa ke luar negeri, dan mendatangkan guru-guru dari luar negeri seperti Al-Hasyimi dari Tunisia, Syekh Ahmad Surkati dari Sudan, Syekh Muhammad Thaib dari Maroko, dan Syekh Muhammas Abdul Hamid dari Makkah. (IAIN Syahida, 1992:480). Yang perlu dicatat di sini, Jami'at Khair adalah organisasi pertama yang menerapkan sistem modern karena memiliki AD/ART, daftar anggota, notulen rapat-rapat, mendirikan sekolah-sekolah dengan kurikulum jelas, dan menyediakan buku-buku sumber, kelas-kelas, bangku, meja, papan tulis atau peralatan modern untuk ukuran waktu itu.

c. *Al-Irsyad*.

Didirikan di Jakarta pada tahun 1913 oleh Ahmad Surkati dkk. dan mendapat pengakuan dari pemerintah kolonial Belanda pada 11 Agustus 1915. Tujuannya untuk memajukan pelajaran agama Islam yang murni di Indonesia, khususnya orang-orang Arab (namun lebih liberal daripada Jami'at Khair). Di samping sekolah-sekolah umum, Al-Irsyad juga memiliki madrasah-masdrasah a.l. Awa-liyah (3 tahun), Ibtidaiyah (4 tahun), Tajhiziah (2 tahun), Mu'allimin (4 tahun), dan Takhassus (2 tahun).

d. *Perhimpunan Umat Islam (PUI).*

Merupakan fusi Perikatan Umat Islam yang didirikan di Majalengka Jabar oleh K.H. Halim pada tahun 1917 dan Al-Ittihad Al-Islamiyah yang didirikan di Sukabumi Jabar oleh K.H. Ahmad Sanusi pada tahun 1931. PUI mendirikan beberapa lembaga pendidikan, yaitu Madrasan Diniyah (6 tahun), Madrasah Tsanawiyah (4 tahun), dan Madrasah Aliyah (4 tahun).

e. *Persatuan Islam (Persis).*

Merupakan organisasi sosial, pendidikan, dan keagamaan, yang didirikan di Bandung pada 17 September 1923 oleh K.H. Muhammad Zamzam dan K.H. Muhammad Yunus, dua orang saudagar asal Palembang yang telah lama menetap di Bandung. Tujuan utamanya hendak memurnikan ajaran Islam sesuai Al-Qur'an dan As-Sunnah dan menghilangkan penyakit TBC (Tahayul, Bid'ah, dan Churofat) di masyarakat Islam. Persis sangat pesat perkembangannya tatkala K.H. Ahmad Hasan bergabung ke dalamnya, bahkan beliau merupakan guru utama Persis. Selain menulis berbagai kajian agama, beliau adalah seorang ahli debat yang ulung, sehingga banyak mematahkan argumen pihak-pihak yang menentang ajaran Islam yang berdasarkan Qur'an dan Sunnah. Persis memiliki lembaga pendidikan di antaranya TK-HIS, MULO, Sekolah Guru, dan beberapa pesantren.

f. *Nahdlatul Ulama (NU).*

Didirikan di Surabaya pada 31 Januari 1926 oleh K.H. Hasyim Asy'arie dan K.H. Wahab Hasbullah. NU banyak mendirikan madrasah di samping pesantren, misalnya Awaliyah (2 tahun), Ibtidaiyah (3 tahun), Tsanawiyah (3 tahun), Mu'allimin Wustha (2 tahun), dan Mu'allimin 'Ulya (3 tahun). Ciri khas NU adalah mempertahankan paham ahli sunnah wal-jamaah (aswaja) yang telah hidup lama di Indonesia.

g. *Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti).*

Didirikan di Candung, Bukittinggi, pada 5 Mei 1930 oleh Syekh Sulaeman Arrasuli, Syekh Muhammad Abbas Al-Kadi, Syekh Muhammad Jamil Jaho, dan Syekh Abdul Wahid Tabek. Tujuannya untuk mengembangkan pendidikan dan pengajaran dengan mendirikan madrasah-madrasah, serta memajukan amal-amal

sosial dan dakwah dengan membangun masjid-masjid dan surau/langgar-langgar. Nama-nama madrasahny a.l. Madrasah Tarbiyah Islamiyah, Madrasah Awaliyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Kuliah Syari'ah.

h. *Persyarikatan Ulama.*

Didirikan pada tahun 1917 oleh K.H. Abdul Halim di Majalengka, Jabar, sebagai perwujudan dari kebangkitan gerakan-gerakan pembaruan di Indonesia. Awalnya usaha pendidikan dengan menyelenggarakan pelajaran agama sekali dalam seminggu untuk orang-orang dewasa, kemudian berdiri lembaga pendidikan yang bersifat modern dengan nama Jam'iyat l'anat al-Musta'alimin, kemudian bergabung ke Persyarikatan Ulama.

i. *Jam'iyatul Washliyah atau Al-Washliyah.*

Didirikan di Medan, Sumut, pada 30 November 1930 atas inisiatif sekelompok siswa Maktab Islamiyah Tapanuli yang tergabung dalam kelompok diskusi "Debating Club" Medan. Kelompok ini dalam setiap pertemuannya di samping mendiskusikan pelajaran-pelajaran sekolah, juga membahas masalah sosial kemasyarakatan terutama tentang persatuan umat Islam. Peserta diskusi a.l. Ismail Banda, Abdurrahman Syihab, M. Arsyad Thalib Lubis, Adnan Noer, dll. Ismail Banda kemudian jadi Ketua Al-Washliyah. Madrasah yang didirikannya a.l. Madrasah Ibtidaiyah (6 tahun), Madrasah Tsanawiyah (3 tahun), Madrasah Qismul 'Aly (3 tahun), Madrasah Mu'allimin (3 Tahun), PGA (4 tahun), SD (6 tahun), SMP (3tahun), SMA (3 tahun).

2. Proses Penyatuan Sistem Penyelenggaraan, dan Lahirnya Madrasah Negeri.

Setelah Indonesia merdeka dan menjadi NKRI, upaya-upaya perbaikan dan peningkatan madrasah selalu dilakukan dalam berbagai aspeknya. Dimulai dengan memberikan bantuan terhadap lembaga madrasah sebagaimana dianjurkan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP) tanggal 27 Desember 1945, yang menyebutkan bahwa madrasah dan pesantren yang pada hakikatnya adalah satu alat dan sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat jelata yang sudah berurat berakar dalam masyarakat Indonesia umumnya, hendaklah pula mendapat perhatian dan bantuan nyata berupa tuntunan dan bantuan material dari pemerintah. (An-

ton Timur Djaelani, 1980).

Agar madrasah mendapat bantuan material dan bimbingan dari pemerintah sesuai dengan saran BP-KNIP, maka Kementerian Agama mengeluarkan Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1952. Menurut Permenag ini disebutkan bahwa yang dinamakan madrasah ialah tempat pendidikan yang telah diatur sebagai sekolah dan memuat pendidikan umum dan ilmu pengetahuan agama Islam menjadi pokok pengajarannya. Jenjang pendidikan dalam madrasah dimaksud tersusun dalam:

- a. Madrasah Ibtidaiyah 6 tahun;
- b. Madrasah Tsanawiyah 3 tahun;
- c. Madrasah Aliyah 3 tahun.

Untuk memperoleh bantuan pemerintah, baik berupa dana, alat-alat, dan tenaga, madrasah bersangkutan harus memenuhi beberapa syarat, di antaranya telah berdiri minimal satu tahun, memiliki organisasi yang baik dan teratur, pendiriannya dihayati oleh penduduk, selain pengajaran agama, juga memberikan pengajaran umum sekurang-kurangnya 30 % dari jumlah jam pelajaran seluruhnya dalam seminggu. Madrasah yang menerima bantuan ini wajib melaporkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan bantuan yang diterimanya, serta harus bersedia menerima inspeksi dari Kemenag cq. Pendidikan Agama Islam, agar kualitas madrasah dapat ditingkatkan. Dan pada gilirannya akan dilakukan pembinaan dan bimbingan sehingga kurikulum, sarana dan prasarana, tenaga kependidikan termasuk guru-gurunya bisa dibantu pengadaannya termasuk peningkatan kualitasnya.

Usaha penegerian madrasah (yang asalnya swasta/masyarakat), dimulai dengan adanya Penetapan Menteri Agama No. 1 Tahun 1959 tentang Pengasuhan dan Pemeliharaan Sekolah Rakyat Islam di Provinsi Aceh, yang kemudian dengan Keputusan Menteri Agama No. 104 Tahun 1962 menjadi Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN). Pada tahun 1967 terbuka kesempatan menegerikan madrasah untuk semua tingkatan, yaitu selain MIN, juga Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN), dan Madrasah Aliyah Agama Islam Negeri (MAAIN). Pada tahun 1970 dengan Keputusan Menteri Agama No. 123 Tahun 1970, sudah tidak ada lagi penegerian madrasah-madrasah swasta, mengingat keterbatasan dana dan fasilitas pemerintah.

3. Lahirnya SKB Tiga Menteri, SKB Dua Menteri, dan Penetapan Kurikulum 1984.

Upaya untuk meningkatkan kualitas dan penyelenggaraan madrasah senantiasa dilakukan setelah penegerian madrasah-madrasah swasta. Maka pada tahun 1975 dikeluarkanlah Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, yaitu Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta Menteri Dalam Negeri tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah, yang dilatarbelakangi bahwa siswa madrasah sebagaimana halnya tiap-tiap warga negara Indonesia berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, dan pengajaran yang sama, sehingga lulusan madrasah, yang menghendaki melanjutkan atau pindah ke sekolah-sekolah umum dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi dapat dilayani.

Menurut SKB Tiga Menteri itu, yang dimaksud dengan madrasah ialah lembaga pendidikan yang menjadikan mata pelajaran dasar yang diberikan sekurang-kurangnya 30 % di samping mata pelajaran umum, yang mencakup Madrasah Ibtidaiyah setingkat SD, Madrasah Tsanawiyah setingkat SMP, dan Madrasah Aliyah setingkat SMA. Dengan SKB ini ditetapkan juga hal-hal berikut :

- a. Ijazah madrasah mempunyai nilai yang sama dengan nilai ijazah sekolah umum yang setingkat;
- b. Lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum setingkat lebih atas;
- c. Siswa madrasah dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat. (Muwardi Sutedjo, 1992:15).

Untuk merealisasikan SKB ini, pada tahun 1976 Depag mengeluarkan kurikulum standar untuk dijadikan acuan oleh madrasah, baik MI, MTs, maupun MA. Kurikulum dimaksud dilengkapi dengan beberapa hal, yaitu :

- a. Pedoman dan aturan penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran pada madrasah, sesuai dengan aturan yang berlaku pada sekolah-sekolah umum;
- b. Deskripsi berbagai kegiatan dan metode penyampaian program untuk setiap bidang studi, baik agama maupun pengetahuan umum.

Demikianlah, dengan pemberlakuan kurikulum standar tersebut, terjadilah keseragaman madrasah dalam bidang studi agama, baik kualitas maupun kuantitasnya, di samping itu adanya pengakuan persamaan yang sepenuhnya antara

madrasah dengan sekolah-sekolah umum yang setaraf. Madrasah akan mampu berperan sebagai lembaga pendidikan yang memenuhi dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan mampu berpacu dengan sekolah-sekolah umum dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional.

Pada tahun 1984 dikeluarkan lagi SKB Dua Menteri, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Menteri Agama No. 299/U/1984 dan No. 45/1984 tentang Pengaturan Pembakuan Kurikulum Sekolah Umum dan Kurikulum Madrasah. SKB ini dijiwai oleh Tap MPR No. II/TAP/MPR/1983 mengenai perlunya penyesuaian sistem pendidikan, sejalan dengan daya kebutuhan pembangunan di segala bidang, antara lain dilakukan melalui perbaikan kurikulum sebagai salah satu di antara berbagai upaya perbaikan penyelenggaraan pendidikan di sekolah umum dan madrasah. Adapun esensi dari pembakuan kurikulum sekolah umum dan madrasah ini adalah :

- a. Kurikulum sekolah umum dan kurikulum madrasah terdiri dari program inti dan program khusus;
- b. Program inti dimaksudkan dalam upaya memenuhi tujuan pendidikan sekolah umum dan madrasah yang secara kualitatif adalah sama;
- c. Program khusus (pilihan) diadakan untuk memberikan bekal kemampuan siswa yang melanjutkan ke perguruan tinggi bagi sekolah atau madrasah tingkat menengah atas;
- d. Pengaturan pelaksanaan kurikulum sekolah umum dan madrasah mengenai sistem kredit, bimbingan karier, ketuntasan belajar dan sistem penilaian adalah sama;
- e. Hal-hal yang berhubungan dengan tenaga guru dan sarana pendidikan dalam rangka keberhasilan pelaksanaan kurikulum akan diatur bersama oleh kedua departemen yang bersangkutan. (*Ibid*, hal. 16).

Sebagai tindak lanjut dari SKB Dua Menteri tersebut, lahirlah kurikulum 1984 untuk madrasah yang tertuang dalam Keputusan Menteri Agama No. 99 Tahun 1984 untuk MI, No. 100 Tahun 1984 untuk MTs, dan No. 101 Tahun 1984 untuk MA. Dengan demikian, kurikulum 1984 tersebut esensinya mengacu pada SKB Tiga Menteri dan SKB Dua Menteri, baik dalam susunan program, tujuan, maupun bahan

kajian dan pelajarannya. Rumusan Kurikulum 1984 memuat hal-hal yang cukup strategis sebagai berikut :

- a. Program kegiatan kurikulum madrasah (MI, MTs, MA) tahun 1984 dilakukan melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler, baik dalam program inti maupun program pilihan;
- b. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan memperhatikan keserasian antara cara seseorang belajar dan apa yang dipejarinya;
- c. Penilaian dilakukan secara berkesinambungan dan menyeluruh untuk keperluan peningkatan proses dan hasil belajar serta pengolahan program. (*Ibid*, hal. 17).

4. Madrasah Aliyah Program Khusus.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 73 Tahun 1987, lahirlah Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK) yang dilatarbelakangi oleh kebutuhan tenaga ahli di bidang agama Islam sesuai dengan tuntutan pembangunan nasional untuk meningkatkan kualitas pendidikan pada madrasah.

Ciri khas dari MAPK ini adalah komposisi kurikulum pendidikan agamanya berbeda sekali dengan MA biasa. Jika MA biasa mata pelajaran umum berkisar antara 75 % dan agama 25 %, maka pada MAPK mata pelajaran umum hanya sekitar 35 %, yaitu 100 bebas kredit, dan mata pelajaran agama mencapai 65 % atau 186 beban kredit.

Memang madrasah melaksanakan kurikulum SKB Tiga Menteri tahun 1975 diteruskan SKB Dua Menteri tahun 1984, yang secara formal sebenarnya sudah menjadi sekolah umum yang menjadikan pendidikan agama sebagai ciri kelebihannya. Hal ini menjadi dilemma bagi madrasah, karena di satu pihak materi pengetahuan umum secara kuantitas dan kualitas mengalami peningkatan, tetapi di pihak lain penguasaan siswa terhadap pengetahuan agama terutama bahasa Arab menjadi serba tanggung. Oleh karena itu, jika mengharapkan lulusannya menjadi figur ulama atau kiyai, sangat riskan atau malah tidak mungkin. Ementara itu pesentren sendiri tampaknya hanya bergelut dengan ilmu-ilmu agama, dan sedikit sekali memberikan kesempatan mempelajari materi pelajaran umum sehingga pengembangan “wawasan” anak didiknya kurang. Inilah salah satu alasan didirikan-

nya MAPK.

Dari hasil studi kelayakan, untuk tahap pertama, pada tahun 1987 ditunjuk lima MAN sebagai penyelenggara MAPK, yaitu :

- a. MAN Darussalam, Ciamis, Jabar;
- b. MAN Makassar, Sulsel;
- c. MAN I Yogyakarta;
- d. MAN Kotabaru, Padang, Sumbar;
- e. MAN Jember, Jatim.

Tahap kedua tahun 1990 ditambah lima MAN lagi di NTB, Lampung, Kalsel, Aceh, dan Solo. Acuan pengaturan lebih lanjut penyelenggaraan MAPK ini adalah Keputusan Dirjen Bimbaga Islam No. 47/E/1987 tanggal 23 Juli 1987.

Calon siswa yang masuk MAPK ini diseleksi secara ketat dan harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu :

- a. Memiliki Ijazah/STTB MTsN;
- b. Menduduki peringkat 1 s/d 10 DANEM (Daftar Nilai Ebtanas Murni) MTsN pada tingkat Panitia Penyelenggara EBTAN dengan nilai Bahasa Arab minimal 7;
- c. Usia maksimal 18 tahun;
- d. Bersedia tinggal di asrama;
- e. Berbadan sehat;
- f. Mendapat persetujuan orang tua;
- g. Berkelakuan baik. (*Ibid*, hal. 56).

Setelah berjalan beberapa tahun, memang terlihat hasilnya baik, para lulusan MAPK ini menonjol dalam ilmu-ilmu keagamaan dan terutama bahasa Arab dibandingkan dengan MA biasa. Kemudian dengan diberlakukannya kurikulum 1994, MAPK namanya diubah menjadi Madrasah Aiyah Keagamaan (MAK), dan MA biasa menjadi Madrasah Aliyah Umumj (MAU) sebagaimana halnya SMU di lingkungan Depdikbud. Akan tetapi keadaan sekarang sudah berubah lagi menjadi MAN, dan di lingkungan Kemendikbud pun kembali SMK dan SMA.

5. Perintisan Wajib Belajar Sembilan Tahun di Madrasah.

Dengan lahirnya Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasi-

onal (Sisdiknas), yang diikuti beberapa Peraturan Pemerintah sebagai kerangka acuan penyelenggaraannya terutama PP No. 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, maka jenjang pendidikan dasar yang merupakan program wajib belajar adalah sembilan tahun, yang meliputi SD dan SMP, maka di lingkungan pendidikan agama pun, meliputi MI 3 tahun dan MTs 3 tahun. Jelaslah bahwa MI dan MTs merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem pendidikan dasar di Indonesia. Dengan demikian eksistensi MI dan MTs sebagai lembaga pendidikan bersama-sama dengan SD dan SMP telah mengukuhkan legalitas peranan MI dan MTs khususnya dalam pelayanan pendidikan dasar. Ini berarti, bahwa kehadirannya telah menjadi kesatuan sistem dalam Sisdiknas.

6. Kelahiran Kurikulum 1994.

Upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan mutu madrasah tidak pernah berhenti, seiring dengan perkembangan zaman yang ditandai kemajuan iptek. Dengan berlakunya UU No. 2 Tahun 1989 dan berbagai aturan pelaksanaannya, maka kurikulum pun disusun untuk tingkat MI, MTs, dan MA. Madrasah-madrasah dimaksud kecuali MAPK, merupakan lembaga pendidikan umum yang berciri khas agama Islam setingkat SD, SMP, dan SMA, sehingga kurikulumnya pun menyesuaikan diri dengan lembaga pendidikan umum yang diselenggarakan oleh Depdikbud.

Status keberadaan madrasah seperti itu tampaknya mempunyai konsekuensi tersendiri. Di satu pihak memikul tanggung jawab sebagai lembaga pendidikan umum yang sama dengan sekolah-sekolah umum, sedangkan pada pihak lain madrasah memiliki juga tanggung jawab sebagai lembaga pendidikan Islam. Kondisi demikian dapat dilihat lebih jelas dalam perbandingan antara mata pelajaran agama dengan mata pelajaran umum pada Kurikulum 1994. Dengan kenyataan seperti itu, maka tanggung jawab madrasah terasa jauh lebih berat dan besar jika dibandingkan dengan sekolah-sekolah umum yang sederajat.

Mengacu pada UU No. 2 Tahun 1989, maka Menteri Agama pun mengeluarkan ketentuan-ketentuan mengenai kurikulum madrasah yang berlaku secara nasional, yaitu Keputusan No. 371 Tahun 1993 tentang Kurikulum MI, No. 372 Tahun 1993 tentang Kurikulum MTs, dan No. 373 Tahun 1993 tentang Kurikulum MA, yang

tergabung dalam Kurikulum 1994 karena dilaksanakan mulai tahun 1994. Di antara isi pokok ketentuan-ketentuan tersebut ialah mengenai program pengajaran, bahwa setiap madrasah pada masing-masing tingkat wajib melaksanakan kurikulum mata pelajaran yang disusun secara nasional.

C. PENDIDIKAN AGAMA DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

Sebagaimana dimaklumi, secara historis pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan sistem pendidikannya di Indonesia dengan pola Barat yang bersifat sekuler, yang tidak memperhatikan nilai-nilai agama, dan berjalan sendiri. Sementara pendidikan agama yang diwakili pesantren-pesantren, tidak memperhatikan pengetahuan umum, juga berjalan sendiri. Dengan demikian terjadi dualisme dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Hal demikian berjalan sampai Indonesia merdeka dan menjadi NKRI. Itulah yang melatarbelakangi pemikiran para tokoh pembaruan Islam yang berprakarsa memadukan pendidikan agama dan pendidikan umum, dan memakai sistem klasikal (sebagaimana dikemukakan dalam sejarah perguruan Islam terdahulu).

Keadaan tersebut di atas tentu saja sangat merugikan bagi bangsa Indonesia, terutama umat Islam. Pendidikan pesantren melahirkan out put (lulusan) yang mempunyai pengetahuan agama cukup mendalam, namun miskin pengetahuan umumnya, a.l. buta huruf latin. Sebaliknya, sekolah-sekolah Belanda melahirkan out put yang berpengetahuan umum luas, namun miskin pengetahuan dan nilai-nilai agama. Kenyataan ini diperparah oleh sikap tokoh-tokoh agama dan ulama yang sangat non-kooperatif terhadap yang berbau kolonial, bahkan ada yang mengatakan apa-apa yang datang dari produk kolonial tersebut haram dan kafir. Akibatnya, umat Islam tercecceh di bidang pendidikan, dan kerugian yang dirasakan adalah setelah Indonesia merdeka, karena orang-orang yang duduk di tampuk pemerintahan adalah orang-orang lulusan lembaga pendidikan umum (sekolah) yang notabene sekuler, bukan lulusan pendidikan pesantren. Padahal dalam perjuangan merebut kemerdekaan orang-orang pesantrenlah yang paling gigih dan dominan. Bahkan dalam sejarah disebutkan bahwa pesantren justru merupakan basis perjuangan menentang penjajah. Memperkuat kenyataan ini,

Ahmad Mansur Suryanegara (2009:x) menyatakan bahwa dakwah wirausahawan Islam dan ulama diawali dari pasar, dengan masjid dan pesantrennya. Tidak hanya melahirkan mayoritas bangsa Indonesia memeluk Islam sebagai agamanya, melainkan juga membangkitkan kesadaran politik umat, membangun sekitar 40 kekuasaan politik Islam atau kesultanan. Kelanjutannya tidaklah heran jika karena pengaruh perjuangan ulama, lahirlah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Demikianlah, pada awal pemerintahan NKRI setelah kemerdekaan, sistem pendidikan di Indonesia masih dualistis, yaitu :

1. Sistem pendidikan dan pengajaran modern pada sekolah-sekolah umum warisan kolonial Belanda yang bercorak sekuler.
2. Sistem pendidikan Islam yang tumbuh dan berkembang di kalangan umat Islam sendiri, yang berlangsung di surau, langgar atau masjid, pesantren, dan madrasah yang bersifat tradisional dan bercorak keagamaan semata.

Indonesia yang penduduknya mayoritas beragama Islam telah bersepakat dan bertekad membentuk satu negara, yaitu NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, bukan berdasarkan Islam. Akan tetapi Pancasila dan UUD 1945 menjamin kemerdekaan bagi umat Islam untuk melaksanakan dan mengembangkan pendidikan Islam. Dalam Pasal 31 Ayat (3) UUD 1945 (setelah amandemen ke empat kali), dinyatakan bahwa *"Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang"*. Yang dimaksud dengan "satu sistem pendidikan nasional" adalah satu sistem pendidikan dan pengajaran yang bisa memelihara pendidikan kecerdasan akal budi secara merata kepada seluruh rakyat, yang bersendi agama dan kebudayaan bangsa, untuk mewujudkan keselamatan dan kebahagiaan masyarakat bangsa Indonesia seluruhnya.

Sebagai pelaksanaan dari UUD 1945 di bidang penyelenggaraan pendidikan, maka dibuatlah Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu UU No. 2 Tahun 1989 dan kemudian diganti dengan UU No. 20 Tahun 2003 dengan judul yang sama. Upaya ini merupakan puncak dari usaha mengintegrasikan pendidikan Islam ke dalam sisdiknas. Ini berarti UU No. 20 Tahun 2003 merupakan wadah formal terintegrasinya pendidikan Islam ke dalam sisdiknas. Dengan pendidikan Islam memperoleh peluang

serta kesempatan untuk terus dikembangkan. Hal ini dapat dilihat dari Pasal-pasal dalam UU No. 20 Tahun 2003, yaitu :

1. Dalam Pasal 1 Ayat (2), disebutkan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan Islam, baik sebagai system maupun kelembagaannya, merupakan warisan budaya bangsa, yang berurat berakar pada masyarakat bangsa Indonesia. Jelaslah bahwa pendidikan Islam merupakan bagian terpadu dari sisdiknas.
2. Dalam Pasal 3 diungkapkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nilai-nilai dan aspek-aspek tujuan pendidikan nasional dimaksud sepenuhnya adalah nilai-nilai dasar ajaran agama Islam, atau tidak bertentangan dengan tujuan pendidikan Islam. Oleh karenanya, pendidikan Islam akan mempunyai peran yang menentukan untuk keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan nasional.
3. Dalam Pasal 15 disebutkan bahwa jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Yang dimaksud pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama yang bersangkutan. Setiap muslim/muslimah berkepentingan dengan pengetahuan ajaran agamanya terutama yang berhubungan dengan nilai-nilai keagamaan, moral, dan sosial budayanya. Dengan demikian, pendidikan Islam dengan kelembagaannya tidak dapat dipisahkan dari system pendidikan nasional.
4. Dalam Pasal 37 Ayat (1a) dan (2) dinyatakan bahwa isi kurikulum setiap jenis dan jalur serta jenjang pendidikan (dari dasar s/d perguruan tinggi) wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa. Jadi, pendidikan keagamaan termasuk Islam, merupakan bagian dari dasar dan inti kurikulum pendidikan nasional. Dengan demikian, pendidikan agama Islam terpadu dalam sistem pendidikan nasional.

5. Dalam Pasal 55 Ayat (1) disebutkan bahwa masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat. Ini berarti, satuan-satuan pendidikan Islam baik formal maupun nonformal seperti madrasah, pesantren, madrasah diniyah, majelis taklim, dsb. akan tetap tumbuh dan berkembang secara terarah dan terpadu dalam sistem pendidikan nasional.

Demikianlah sebatas Pasal-pasal yang termuat dalam UU No. 20 Tahun 2003 yang menempatkan posisi pendidikan Islam dalam kerangka sistem pendidikan nasional. UU ini menggantikan UU No. 2 Tahun 1989 yang dalam pelaksanaannya sering menghadapi kendala, karena pendidikan Islam masih dianggap sebagai pendidikan yang terpisah dari sistem pendidikan nasional.

Jika dianalisis lebih lanjut tentang perbandingan antara pendidikan nasional dengan pendidikan Islam, maka akan jelas terlihat bahwa pada dasarnya pendidikan Islam merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional dan selalu berjalan searah.

1. Pada alinea IV Pembukaan UUD 1945 terdapat kalimat “...*memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa...*” dst. merupakan cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus tugas negara dan tujuan pendidikan nasional. Hal ini dilihat dari konsep pendidikan Islam selaras dengan tujuannya, sehingga wajar jika pendidikan Islam dan pendidikan nasional dikembangkan secara terpadu, karena berorientasi pada tujuan dan wadah yang sama.
2. Karakteristik pendidikan nasional seperti dirumuskan sebagai pendidikan kecerdasan akal budi yang bersendikan agama dan kebudayaan bangsa, dengan tujuan untuk mewujudkan keselamatan dan kebahagiaan masyarakat, maka dapat ditinjau dari aspek operasional pendidikan Islam sebagai berikut :
 - a. Bahwa pendidikan kecerdasan akal budi merupakan usaha untuk menumbuhkan-kembangkan potensi fitrah dalam operasionalisasi konsep pendidikan Islam, karena akal budi merupakan salah satu unsur penting dari fitrah manusia;
 - b. Umat Islam adalah mayoritas bagi bangsa Indonesia, karenanya agama dan kebudayaan yang dijadikan sendi pendidikan nasional. Ini berarti agama dan kebuda-

yaan Islam yang dominan, dan sudah menyatu dengan agama dan kebudayaan Indonesia.

- c. Tujuan pendidikan nasional yang dirumuskan dalam UU No. 20 Tahun 2003 merupakan tujuan umum yang universal, termasuk tujuan pendidikan Islam.
3. Tak dapat dipungkiri bahwa unsur-unsur budaya Islam telah menjadi bagian terpadu dari warisan budaya bangsa, sehingga pendidikan nasional untuk memajukan kebudayaan nasional, berarti juga memajukan unsur-unsur budaya Islam. Begitu juga pendidikan di pesantren dan madrasah merupakan bagian dari warisan budaya bangsa yang dibina dan dikembangkan dalam rangka pembinaan pendidikan nasional.
4. Sistem pada sekolah-sekolah umum (modern) yang juga merupakan bagian warisan budaya bangsa, yang kemudian menjadi inti atau unsur utama dalam sistem pendidikan nasional, jika ditinjau dari aspek filosofis pendidikan Islam, merupakan aktualisasi potensi fitrah manusia yang universal. Karenanya penerimaan unsur-unsur budaya modern (Barat) ke dalam sistem lingkungan budaya Islam sepanjang sesuai dengan nilai dasar Islam dan Pancasila, tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Demikianlah, maka keterpaduan antara sistem pendidikan Islam dengan sistem pendidikan nasional merupakan hal yang wajar, bahkan pendidikan Islam merupakan bagian atau sub sistem daripada pendidikan nasional.

Adapun secara eksplisit fungsi pendidikan agama telah dituangkan dalam Penjelasan Pasal 15 UU No. 20 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa pendidikan keagamaan merupakan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama, dan atau menjadi ahli ilmu agama. Dalam upaya membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa, pendidikan agama memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting. Untuk itulah pendidikan agama wajib diberikan pada semua satuan, jenjang, dan jenis pendidikan, baik melalui jalur sekolah maupun jalur luar sekolah. Pendidikan agama sebagai institusi yang selama ini dikenal dengan nama pondok pesantren dan madrasah, telah berakar, tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam.

Gambaran tentang fungsi dan peranan pondok pesantren dan madrasah dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Pondok pesantren dan madrasah telah menunjukkan kemampuannya untuk tumbuh dan berkembang dalam menghadapi berbagai tantangan zaman, baik di perkotaan yang modern dan sangat maju, maupun di perdesaan yang masih bersifat tradisional.
2. Pondok pesantren dan madrasah sebagian besar adalah perguruan swasta yang berkemampuan tinggi untuk berswakarsa dan berswakarya dalam menyelenggarakan pendidikan. Atau dengan perkataan lain telah menunjukkan kemampuannya untuk mandiri dengan memobilisasi sumber daya yang tersedia di masyarakat pendukungnya.
3. Pondok pesantren dan madrasah yang memiliki ciri khas sebagai pusat pendidikan, pengembangan dan penyebaran agama Islam, telah membuktikan diri dapat menghasilkan lulusannya yang berkualitas dan potensial untuk pendidik, khususnya di bidang pendidikan agama Islam.
4. Pondok pesantren dan madrasah memiliki potensi yang cukup besar bersama-sama satuan pendidikan lainnya dalam sistem pendidikan nasional untuk menuntaskan Wajib Dikdas Sembilan Tahun. Dalam hal ini MI dan MTs merupakan lembaga pendidikan dasar. Dengan kenyataan ini, maka tugas dan fungsi MI dan MTs menjadi ganda, yaitu :
 - a. Sebagai sekolah pendidikan Islam;
 - b. Sebagai sekolah pendidikan tingkat dasar.

Dengan kondisi begitu, maka orang tidak bisa lagi menomorduakan lembaga-lembaga pendidikan agama. Jika lembaga pendidikan agama mampu memacu diri dengan berupaya maksimal meningkatkan kualitas dalam berbagai aspeknya, pasti akan menjadi alternatif pertama pilihan masyarakat untuk memasukkan anak-anaknya. Dikaitkan dengan era globalisasi yang melanda dunia, sehingga nilai-nilai etik dan moral atau karakter bangsa (demoralisasi) yang sudah mulai mengendur seperti sekarang, dengan pendidikan agama akan terbendung.

D. IMPLEMENTASI NILAI-NILAI AGAMA DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

Bahwa dalam kurikulum pendidikan, pendidikan agama merupakan bagian terpadu (integral) dari kurikulum sistem pendidikan nasional, dan melekat pada setiap mata pelajaran sebagai bagian dari pendidikan nilai, moral, dan etika dalam rangka pembentukan karakter bangsa. Dalam pelaksanaannya, pendidikan agama dalam sistem pendidikan nasional, baik yang berada pada jalur sekolah maupun luar sekolah, paling tidak tampil dalam beberapa bentuk atau kategori yang secara substansial memiliki perbedaan, baik dalam sifat maupun implikasinya.

1. Keberadaan Mata Pelajaran Agama.

Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama yang bersangkutan, dan diselenggarakan pada semua jenjang pendidikan. Artinya, pendidikan agama merupakan salah satu bahan kajian dalam kurikulum semua jenis dan jenjang pendidikan di Indonesia. Pada pendidikan dasar, pendidikan agama merupakan pendidikan wajib bersama 12 bahan kajian yang lainnya. Pada pendidikan menengah dan perguruan tinggi, pendidikan agama juga merupakan pendidikan wajib bersama pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan.

Persoalan atau tantangan yang dihadapi, adalah bagaimana agar pendidikan agama dimaksud, tidak saja sebagai suatu mata pelajaran di sekolah yang diharapkan nilai para siswanya baik, tetapi benar-benar dapat mengarahkan para siswa dimaksud menjadi manusia yang berakhlak mulia (*akhlaqul-karimah*), atau memiliki kualitas keberagamaan yang kuat. Artinya, nilai keberagamaannya tidak terbatas pada aspek kognitif belaka, tetapi juga pada aspek afektif, dan psikomotorik. Dalam pelaksanaan amaliahnya pun tidak hanya sekedar bagus pada aspek *ritualitas*, tetapi juga bagus pada aspek *spiritualitas*. Jadi, yang dipentingkan bukan sekedar IQ (*Intelligence Quotient*), tetapi juga EQ (*Emotional Quotient*), dan SQ (*Spiritual Quotient*). Hal ini sangat penting mengingat saat sekarang ini sudah muncul gejala terjadinya pergeseran nilai-nilai yang ada sebagai akibat pengaruh kemajuan iptek.

2. Lembaga Penyelenggara Pendidikan Agama.

Lembaga-lembaga yang menyelenggarakan pendidikan agama sekarang ini paling tidak ada tiga, yaitu :

- a. Pesantren;
- b. Madrasah-madrasah keagamaan atau diniyah;
- c. Madrasah-madrasah pendidikan umum berciri khas keagamaan, yaitu MI, MTs, dan Aliyah.

Dalam sistem pendidikan nasional, pesantren yang mempunyai akar kuat dalam masyarakat Islam, merupakan bagian dari jalur pendidikan luar sekolah. Di pesantren pelajaran agama secara intensif dipelajari, dikaji, dan didalami. Kendati format pendidikan pesantren sekarang ini beragam, misalnya ada yang masih tradisional, modern, dan bahkan ada yang sampai mengarah pada pengembangan iptek, tetapi pada dasarnya semuanya mempunyai kesamaan, yaitu agama merupakan bidang kajian utama dalam keseluruhan proses pendidikannya. Memang pendidikan di pesantren mempunyai kekhasan dalam proses pendidikannya, seperti ada sorogan, halaqaoh, wetonan, dll. kendati sudah memakai sistem klasikal, di samping gaya hidup para santrinya yang *spartan*, yang melatih kemandirian.

Sistem yang lebih terstruktur dari apa yang terjadi di pesantren, adalah madrasah diniyah, yang terdiri atas diniyah awaliyah, dan diniyah wustho. Bahan yang dipelajari di madrasah diniyah adalah khusus keagamaan, namun berbeda dengan di pondok pesantren pada umumnya, lebih terstruktur dan berjenjang.

3. Melekatnya Nilai-nilai Agama pada Setiap Mata Pelajaran.

Pengembangan nilai-nilai keagamaan dalam setiap peserta didik dapat dilakukan secara korelatif pada setiap mata pelajaran. Nilai-nilai agama hendaknya melekat (inheren) pada setiap mata pelajaran, sehingga dapat diambil hikmahnya. Sebagai contoh, adalah pendidikan MIPA. Melalui pendidikan ini para siswa mempelajari substansi ke-MIPA-an yang terdiri atas dalil-dalil, teori-teori, generalisasi-generalisasi, prinsip-prinsip, dan konsep-konsep MIPA. Dengan penguasaan pelajaran ini, mereka diharapkan dapat menerapkan MIPA untuk tujuan pemecahan masalah dan pengembangan iptek. Di dalamnya juga terkandung dimensi nilai, misalnya siswa

dapat belajar untuk lebih mencintai lingkungan, sadar akan pentingnya MIPA bagi kehidupan manusia dan lingkungan, dan sadar pula akan implikasi dari penerapan MIPA terhadap kehidupan jika disalahgunakan untuk tujuan-tujuan destruktif.

Melalui mata pelajaran MIPA para siswa juga dapat lebih memahami betapa agung dan perkasanya Allah Swt. yang telah menciptakan alam beserta isinya dalam keadaan tertib, teratur, sesuai dengan hukum-hukum alam, yang pada hakekatnya adalah hukum Allah (*sunatulloh*). Para siswa juga akan menyadari bahwa apa yang terjadi di alam semesta ini pada dasarnya berasal dari Yang Maha Kuasa (Allah Swt.). Demikianlah, maka pelajaran MIPA dapat menjadi wahana untuk penanaman nilai-nilai agama. Tentu saja dalam hal ini dituntut keterampilan dan kesungguhan para gurunya dalam hal keimanan dan ketakwaan yang kokoh, wawasan pengetahuan, penguasaan metode pembelajaran, dll. disertai kemauan untuk sekaligus “berdakwah” mengembangkan nilai-nilai agama, yaitu keimanan, ketakwaan, dan beramal shaleh kepada para siswa.

4. Penanaman Nilai-nilai Agama dalam Keluarga.

Keluarga merupakan bagian dari pendidikan luar sekolah sebagai wahana pendidikan agama yang paling ampuh. Keluarga merupakan tempat pendidikan pertama dan utama bagi setiap orang, dengan orang tua sebagai pelaku utama yang memegang kunci keberhasilannya. Dalam hal ini secara tegas bagaimana Islam mengungkapkan peranan orang tua untuk mendidik anak-anak, seperti dinyatakan dalam Al-Qur'an Surat At-Tahrim/66:6 : “*Yaa ayyuhalladzina aamanuu, quu anfusakum waahliikum naaro*” (Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka).

Pendidikan dalam keluarga sangat berperan dalam mengembangkan watak, kepribadian, nilai-nilai agama dan moral, nilai-nilai kebudayaan, serta keterampilan-keterampilan sederhana. Adapun pendidikan sekolah merupakan upaya perluasan dari pendidikan dalam keluarga yang membekali siswa dengan wawasan, pengetahuan, sikap perilaku, dan keterampilan-keterampilan lanjutan. Pendidikan dalam konteks ini mempunyai arti sebagai proses sosialisasi dan enkulturasi secara berkelanjutan dengan tujuan mengantarkan anak-anak agar menjadi manusia-

manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, tangguh, mandiri, inovatif, kreatif, beretos kerja, setia kawan, peduli lingkungan, dsb. sesuai dengan tujuan pendidikan nasional pada umumnya.

Yang harus menjadi perhatian adalah, walaupun pendidikan sekolah sudah melembaga dan semakin kuat, tetapi tidak berarti peranan pendidikan dalam keluarga diabaikan. Justru di tengah-tengah semakin masifnya perubahan sosial pada era globalisasi dan informasi ini, peranan pendidikan keluarga sebagai wahana pembinaan keyakinan agama, watak, dan kepribadian harus semakin diperkuat. Dengan demikian, salah kaprah jika ada orang tua yang berpendapat jika anak-anaknya sudah memasuki pendidikan di sekolah, tanggung jawab sepenuhnya diserahkan kepada sekolah. Kita harus memaklumi bahwa waktu dan kesempatan justru lebih banyak dijalani oleh anak-anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Di beberapa negara maju, sekarang ini bahkan masyarakatnya mencaangkan kembali peranan keluarga (orang tua) sebagai basis pendidikan anak dengan semboyan "*back to family*" sebagai solusi praktis terhadap berbagai persoalan kemasyarakatan yang terjadi, yang tidak mudah diatasi jika hanya diserahkan sepenuhnya pada lembaga pendidikan di luar keluarga.

BAB VII

INOVASI PENDIDIKAN

A. PENGERTIAN INOVASI PENDIDIKAN

Istilah inovasi berasal berasal dari bahasa Latin yang kata kerjanya *innovo* yang artinya memperbaiki dan mengubah, kemudian menjadi *innovation* dalam bahasa Inggris. Inovasi dalam bahasa Indonesia menurut KUBI (Depdikbud, 1990:333), diartikan pema-sukan atau pengenalan hal-hal yang baru; penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya (gagasan, metode, atau alat). Menurut Fuad Ihsan (2005:191) inovasi berarti suatu perubahan yang baru yang menuju ke arah perbaikan; yang lain atau berbeda dari yang ada sebelumnya, yang dilakukan dengan sengaja dan berencana (tidak secara kebetulan).

Terdapat perbedaan dan persamaan dalam istilah perubahan dan pembaruan. Perbedaannya, jika pada pembaruan ada unsur kesengajaan, sementara pada perubahan belum tentu. Persamaannya, perubahan dan pembaruan, sama-sama memiliki unsur yang baru atau lain dari yang sebelumnya. Kata “baru” dapat juga diartikan apa saja yang baru dipahami, diterima, atau dilaksanakan oleh si penerima inovasi, kendati bagi orang lain bukan baru. Namun setiap yang baru itu belum tentu baik untuk setiap situasi dan kondisi setempat. Cara penggunaan potensi yang lama dalam rangka meningkatkan efisiensi suatu usaha, juga dinamakan inovasi. Contoh, jika kurangan gedung dan guru, pemecahannya tidak selalu dengan menambahnya, tetapi cara penggunaannya yang diperbarui. Radio yang selama ini dipergunakan untuk menghibur pada pendengar,,, sekarang dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu meningkatkan efisiensi dan media pengajaran, sehingga dengan biaya yang relative murah dapat dicapai jumlah peserta didik yang lebih banyak.

Pengertian inovasi dalam pendidikan adalah suatu perubahan yang baru dan bersifat kualitatif, berbeda dari hal yang ada sebelumnya, serta sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan dalam rangka pencapaian tujuan tertentu dalam pendidikan. (B. Suryobroto, 1990:127). Maksud kata “kualitatif” adalah bahwa inovasi tersebut memungkinkan adanya re-organisasi atau pengaturan kembali unsur-unsur dalam pendidikan. Jadi, bukan semata-mata penambahan atau penjumlahan dari un-

sur-unsur komponen sebelumnya. Menurut Ibrahim (1988) dalam Fuad Ihsan (2005:192), inovasi pendidikan adalah inovasi dalam bidang pendidikan, atau inovasi untuk memecahkan masalah pendidikan. Inovasi pendidikan adalah suatu ide, barang, metode, yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi hasil seseorang atau kelompok orang (masyarakat), baik berupa hasil *inversi* (penemuan baru) atau *discovery* (baru ditemukan orang), yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau untuk memecahkan masalah pendidikan.

Dalam konteks ini, pengertian inovasi disamakan dengan pembaruan meskipun pada esensinya antara inovasi dengan pembaruan mempunyai pengertian yang sedikit berbeda. Biasanya pada inovasi, perubahan-perubahan yang terjadi hanya menyangkut aspek-aspek tertentu, dalam arti lebih sempit dan terbatas, sedangkan dalam pembaruan, perubahan-perubahan biasanya terjadi menyangkut berbagai aspek, bahkan tidak menutup kemungkinan terjadi secara keseluruhan, artinya dalam ruang lingkup yang lebih luas. (Hasbullah, 2005:190).

B. TUJUAN INOVASI PENDIDIKAN

Menurut Santoso (1974) dalam Fuad Ihsan (2005:192), tujuan utama inovasi adalah meningkatkan sumber-sumber tenaga, dana, dan sarana, termasuk struktur dan prosedur organisasi. Sementara tujuan inovasi pendidikan adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, relevansi, dan kualitas sarana serta jumlah peserta didik sebanyak-banyaknya, dengan hasil sebesar-besarnya (menurut kriteria kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan pembangunan), dengan menggunakan sumber, tenaga, dana, alat, dan waktu dalam jumlah yang sekecil-kecilnya. (*Ibid*, hal. 193).

Arah tujuan inovasi pendidikan di Indonesia tahap demi tahap, adalah :

1. Mengejar ketinggalan yang dihasilkan oleh kemajuan-kemajuan iptek sehingga makin lama pendidikan makin berjalan sejajar dengan kemajuan iptek tersebut.
2. Mengupayakan terselenggaranya pendidikan sekolah maupun luar sekolah bagi setiap warga negara. Misalnya meningkatkan daya tampung usia sekolah SD, SLTP, SLTA, dan PT.
3. Mengusahakan peningkatan mutu yang dirasakan makin menurun dewasa ini, de-

ngan cara penyampaian yang baru, yang diharapkan peserta didik menjadi manusia yang aktif, kreatif, dan terampil memecahkan masalahnya sendiri.

C. MASALAH-MASALAH YANG MENUNTUT INOVASI PENDIDIKAN

Banyak hal yang menuntut diadakannya inovasi pendidikan di Indonesia, DI antaranya adalah :

1. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Tidak dapat dipungkiri kemajuan iptek mempengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, politik, kebudayaan bangsa, termasuk pendidikan. Harus diakui bahwa sistem pendidikan yang kita laksanakan selama ini masih belum mampu mengikuti dan mengendalikan kemajuan iptek dimaksud, sehingga karenanya dunia pendidikan Indonesia dapat menghasilkan tenaga-tenaga pembangunan yang terampil, kreatif, dan aktif, sesuai dengan tuntutan dan keinginan masyarakat luas. Itulah sebabnya berkembangnya ilmu pengetahuan modern menghendaki dasar-dasar pendidikan yang kokoh dan penguasaan kemampuan yang terus-menerus.

2. Pertumbuhan Penduduk.

Laju pertumbuhan penduduk yang cukup pesat tentu menuntut adanya perubahan, sekaligus bertambahnya keinginan masyarakat untuk mendapat pendidikan yang secara kumulatif menuntut tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai.

3. Meningkatnya Animo Masyarakat untuk Memperoleh Pendidikan yang Baik.

Munculnya gerakan inovasi pendidikan berkaitan erat dengan dengan berbagai tantangan dan persoalan yang dihadapi oleh dunia pendidikan dewasa ini, yang salah satu penyebabnya adalah kemajuan iptek. Kemajuan iptek yang terjadi senantiasa mempengaruhi aspirasi masyarakat. Mereka mendambakan pendidikan yang lebih baik, padahal kesempatan untuk itu sangat terbatas, sehingga terjadi kompetisi atau persaingan yang sangat ketat. Berkenaan dengan itu sekarang bermunculan sekolah-sekolah favorit, plus, bahkan unggulan.

4. Menurunnya Kualitas Pendidikan.

Kualitas pendidikan yang dirasakan makin menurun, yang belum mampu mengikuti perkembangan iptek, menuntut adanya sejumlah perubahan dengan inovasi. Jika tidak, akan ketinggalan zaman. Di antara masalah menurunnya kualitas pendidikan dimaksud a.l. disebabkan karena :

- a. Kurang meratanya pelayanan pendidikan;
- b. Kurang serasnya kegiatan belajar dengan tujuan;
- c. Belum efisien dan ekonomisnya pendidikan;
- d. Belum efisien dan ekonomisnya sistem penyajian;
- e. Kurang lancar dan kurang sempurnanya sistem informasi kebijakan;
- f. Kurang dihargainya unsur kebudayaan nasional;
- g. Kurang diperhatikannya pendidikan karakter melalui mata pelajaran/kuliah pendidikan agama, moral Pancasila, dan pendidikan kewarganegaraan, dsb. (belum kokohnya kesadaran, identitas, dan kebanggaan nasional);
- h. Belum tumbuhnya masyarakat gemar belajar;
- i. Belum tersebarnya paket pendidikan yang memikat, mudah dicerna, dan mudah diperoleh;
- j. Belum meluaskannya kesempatan kerja (pembuatan dan pemanfaatan teknologi komunikasi, software dan hardwarenya).

5. Kurangnya Relevansi antara Pendidikan dengan Kebutuhan Masyarakat.

Di era globalisasi sekarang, masyarakat menuntut adanya lembaga pendidikan yang lulusannya benar-benar siap pakai yang diperlukan dalam proses pembangunan. Di antaranya kesesuaian atau relevansi materi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat yang sedang membangun. Untuk mengatasi hal ini sebenarnya pemerintah telah mengupayakan beberapa kali perubahan kurikulum. Dengan kurikulum baru inilah peserta didik dibina keperibadiannya melalui pengetahuan, keterampilan, dan sikap serta perilaku yang sesuai dengan tuntutan masa kini dan masa datang, dengan tetap berpegang pada nilai-nilai dan moral agama dan Pancasila.

6. Pengembangan Alat Organisasi yang Efektif.

Pengembangan organisasi terutama di lingkungan pemerintahan harus memperhatikan keadaan atau suasana perkembangan dunia yang makin maju. Untuk mengantisipasi, maka diperlukan manajemen organisasi yang handal, yang miskin struktur kaya fungsi, serta bersifat akordeon yang luwes disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi, sehingga efektif dan efisien.

D. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INOVASI PENDIDIKAN

Inovasi pendidikan merupakan perubahan pendidikan yang didasarkan atas usaha-usaha sadar, terencana, dan berpola dalam pendidikan dengan tujuan untuk mengarahkan sesuai dengan kebutuhan yang dihadapi dan tuntutan zamannya. Gagasan baru sebagai hasil pemikiran kembali dalam dunia pendidikan, harus mampu memecahkan permasalahan yang tidak terpecahkan oleh cara-cara tradisional yang bersifat komersial. Inovasi pendidikan juga merupakan usaha aktif untuk mempersiapkan diri menghadapi masa datang yang lebih memberikan harapan dan cita-cita yang diinginkan.

Di bawah ini dikemukakan beberapa faktor yang cukup berperan dalam mempengaruhi inovasi pendidikan.

1. Visi Pendidikan.

Usaha dan tujuan pendidikan harus dilandasi oleh pandangan hidup orang tua, lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan, masyarakat dan bangsanya. Manusia Indonesia yang lengkap dan utuh harus dipersiapkan sejak anak-anak dengan upaya pendidikan. Sejak kelahirannya sebenarnya manusia telah memiliki potensi dasar yang universal berupa :

- a. Kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk (*moral identity*);
- b. Kemampuan dan kebebasan untuk mengembangkan diri sendiri sesuai dengan pembawaan dan cita-citanya (*individual identity*);
- c. Kemampuan untuk berhubungan dan kerjasama dengan orang lain (*social liden-*

tity);

- d. Adanya ciri khas yang mampu membedakan dirinya dengan orang lain (*individual difference*). (Tim Dosen IKIP Malang, 1988:192).

Berkaitan dengan potensi dasar manusia tersebut di atas, maka setelah menyatu sebagai masyarakat dan bangsa, hendaknya terakumulasi pada pandangan hidup atau visi bangsa, kemudian dijadikan norma pendidikan secara keseluruhan. Hal ini tidak terlepas pula kaitannya dengan kehidupan yang selalu mengalami perubahan, tujuan pembangunan bangsa yang mengalami pergeseran dan peningkatan, serta perubahan sesuai dengan waktu, keadaan, dan kondisinya.

Pandangan dan harapan orang tua terhadap pendidikan sekarang dapat berbeda dengan pandangan orang terhadap pendidikan masa lampau dan akan datang, sesuai dengan falsafah manusia dan kemanusiaan pada zamannya masing-masing. Karenanya visi pendidikan perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman dan memprediksi masa depan yang penuh dengan tantangan. Intinya untuk mempersiapkan pembentukan manusia seutuhnya, dengan mengembangkan sifat-sifat positif (baik), dan menghindari sifat-sifat negatif (buruk).

2. Pertambahan Penduduk.

Pertambahan penduduk yang cepat sangat menentukan dan berpengaruh besar terhadap penyelenggaraan pendidikan, sehingga menuntut adanya pembaruan di bidang pendidikan. Dengan pertambahan penduduk yang cepat akan bertambah pula anak-anak usia sekolah. Maka diperlukan penyediaan gedung dan ruang kelas, yang tentu saja perlu pengadaan tanah dan akses jalan, selain sarana lainnya. Belum lagi perlunya penambahan tenaga kependidikan (guru, tata usaha, dll.), buku-buku termasuk modul, serta fasilitas-fasilitas lainnya.

Pertambahan penduduk berarti juga penambahan tenaga usia kerja. Maka pendidikan pun dituntut dapat mengembangkan kemampuannya menyiapkan tenaga terampil yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja, di samping untuk keperluan kehidupan lulusannya secara mandiri dan bertanggung jawab. Itulah sebabnya perlu dikembangkan sekolah-sekolah kejuruan dan sekolah-sekolah model yang di dalamnya diberikan keterampilan-keterampilan yang mengarah pada

pengembangan profesionalisme.

Pertambahan penduduk yang cepat menimbulkan akibat yang luas terhadap berbagai segi kehidupan. Banyak masalah pendidikan yang berkaitan erat dengan meledaknya jumlah anak usia sekolah, di antaranya :

a. *Kekurangan Kesempatan Belajar.*

Hal ini merupakan masalah yang perlu mendapatkan prioritas penggarapan, dengan cara menciptakan sistem pendidikan yang dapat menampung sebanyak-banyaknya anak-anak usia sekolah.

b. *Kualitas Pendidikan.*

Kurangnya dana, kurangnya tenaga guru, dan kurangnya fasilitas pendidikan akan berpengaruh terhadap kemerosotan kualitas pendidikan itu sendiri. Upaya untuk mengatasinya dilakukan melalui penambahan dan peningkatan kualitas guru lewat pelatihan-pelatihan, menambah fasilitas, penambahan dana, mencari sistem atau metode mengajar yang tepat, serta sistem evaluasi yang baik sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan secara bertahap.

c. *Relevansi dengan Kebutuhan Masyarakat dan Dunia Kerja.*

Dalam situasi dan kondisi sekarang, sangat dibutuhkan output pendidikan yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan kesiapan kerja. Untuk itu maka digulirkan konsep link and match, yang salah satu tujuannya adalah untuk mengatasi persoalan relevansi dimaksud.

d. *Masalah Efisiensi dan Efektivitas.*

Pendidikan diupayakan agar memperoleh hasil dengan biaya, tenaga, dan waktu yang sedikit. Ini berarti, harus dicari sistem mendidik, mengajar, dan melatih yang efisien dan efektif, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pendidikan.

3. Perkembangan Ilmu Pengetahuan.

Kemajuan zaman sekarang ini justru ditandai dengan perkembangan iptek. Perkembangan iptek berlangsung secara akumulatif dan semakin cepat jalannya. Dunia pendidikan perlu menanggapi dengan memasukkan penemuan dan teori baru ke dalam kurikulum sekolah. Hal ini menyebabkan adanya kurikulum yang sangat sarat (penuh) dengan masalah-masalah baru. Akan tetapi sebenarnya perkembangan

iptek yang cepat ini tidak harus diikuti dengan penambahan kurikulum sekolah di luar kemampuan, meskipun kondisi anak didik perlu diperhatikan. Sebab, anak didik pun tidak mungkin mampu mengikuti dan menguasai seluruh penemuan baru dalam dunia iptek.

4. Tuntutan Adanya Proses Pendidikan yang Relevan.

Salah satu tuntutan diadakannya inovasi dalam pendidikan adalah adanya relevansi antara dunia pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Berkaitan dengan hal ini, pendidikan bisa diperoleh dari sekolah maupun luar sekolah. Cukup banyak contoh pendidikan yang sangat berarti justru tidak diperoleh di sekolah, terutama yang bersifat pengembangan profesi dan keterampilan, seperti pengembangan karier, profesi tertentu, dsb.

Persoalan pendidikan yang kini dihadapi sangat kompleks. Adanya proses pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja yang dihadapi sangat diperlukan mengingat keterbatasan dana pendidikan. Hal ini penting karena sistem sekolah dengan segala kekurangannya ternyata meliputi hampir 80 % dana pendidikan dan yang lainnya, seperti gedung dan ruang kelas, buku-buku, alat-alat pelajaran, dan fasilitas lain yang terpaksa dibebankan kepada orang tua siswa.

E. PEMECAHAN MASALAH INOVASI PENDIDIKAN DAN CARA PENCAPAIANNYA

Kehidupan manusia itu dinamis, selalu mengalami perubahan, dan kebutuhannya semakin meningkat sesuai dengan perkembangannya. Perubahan dimaksud menimbulkan permasalahan yang merupakan ciri dari dinamika kehidupan itu. Peranan pendidikan dan tingkat perkembangan manusia merupakan faktor yang dominan terhadap kemampuannya untuk menanggapi masalah kehidupannya sehari-hari. Tingkat kemampuan suatu bangsa juga dapat ditinjau dari tingkat pendidikan masyarakatnya. Semakin baik tingkat pendidikan masyarakat, maka semakin maju pula bangsanya. Sebaliknya, semakin terpuruk dan rendah tingkat pendidikan masyarakat, jangan diharap bangsanya akan maju. Oleh sebab itu tidak mengherankan jika negara-

negara maju sangat memperhatikan upaya pendidikan yang sesuai dengan kemajuan yang dicapai. Sementara di negara-negara sedang berkembang, pendidikan mulai lebih diperhatikan setelah dalam waktu yang cukup lama kurang terurus, sehingga masalah-masalah yang dihadapi makin berlipat ganda dengan kompleksitas yang rumit.

Seberapa besar keterikatan masalah pendidikan dengan masalah-masalah sosial lain dalam masyarakat, secara sederhana dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis, yaitu :

1. Masalah pemerataan.
2. Masalah mutu.
3. Masalah efektivitas dan relevansinya.
4. Masalah efisiensi.

Pemecahan permasalahan pendidikan yang kompleks itu dengan cara-cara pendekatan konvensional sudah dianggap tidak efektif. Maka inovasi atau pembaruan pendidikan sebagai perspektif baru dalam dunia pendidikan mulai dirintis sebagai alternatif untuk memecahkan permasalahan pendidikan yang belum dapat diatasi dengan cara konvensional secara tuntas. Jadi, inovasi pendidikan dilakukan untuk memecahkan permasalahan pendidikan dan menyongsong arah perkembangan dunia pendidikan yang lebih memberikan harapan kemajuan lebih pesat.

Dalam sejarahnya, kehidupan manusia menurut Hasbullah (2005:202), dapat dibedakan menjadi tiga tahapan, yaitu :

1. Periode manusia masih menggantungkan diri pada alam sekitarnya dengan usaha penyesuaian secara mencoba-coba.
2. Periode manusia telah menemukan alat dan teknik baru yang menyebabkan keterikatan manusia terhadap alam berkurang, namun timbul ketergantungan baru terhadap birokrasi dan spesialisasi.
3. Periode manusia telah mampu mencapai kerjasama berdasar perencanaan menuju perubahan sosial yang didambakan.

Dalam kaitan itu, kemampuan manusia tidak saja untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya dengan mengubah dirinya (*autoplastic*), tetapi juga mampu mengubah lingkungannya demi kepentingan dirinya (*alloplastic*). Dengan kreativitas dan usaha

yang tidak henti-hentinya, akhirnya manusia menemukan sesuatu dengan cara baru yang mengantarkan pada kehidupan yang lebih baik seperti sekarang ini. Pembaruan pendidikan dilakukan dalam upaya "*problem solving*" yang dihadapi dunia pendidikan yang selalu dinamis dan berkembang. Adapun sifat pendekatan yang diperlukan untuk pemecahan masalah pendidikan yang kompleks itu harus berorientasi pada hal-hal yang efektif tetapi efisien, serta peka terhadap timbulnya masalah-masalah baru.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, ada beberapa cara yang dapat ditempuh dalam upaya pencapaian tujuan pendidikan, sebagai berikut :

1. Cara Pemerataan dan Peningkatan Kualitas.

- a. Meningkatkan kemampuan tenaga pengajar lewat penataran, pelatihan, dll.
- b. Memperkaya pengalaman dan memperlancar proses belajar anak didik;
- c. Memantapkan nilai, sikap, keterampilan, kesadaran lingkungan pada anak didik.

2. Cara Memperluas Pelayanan Pendidikan (kuantitas).

- a. Memberikan pelatihan keterampilan bagi mereka yang tidak pernah sekolah;
- b. Penyebaran pesan-pesan yang merangsang kegiatan belajar dan partisipasi untuk ikut membangun;
- c. Penyebaran informasi untuk menumbuhkan kesadaran lingkungan;
- d. Usaha memberikan pengalaman pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi yang berkembang dan realistis.

3. Cara Meningkatkan Keserasian Pendidikan dengan Pembangunan.

- a. Menanamkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang fungsional untuk kehidupan di masyarakat;
- b. Membentuk kemampuan untuk memahami dan memecahkan masalah yang aktual dalam masyarakat;
- c. Menunjukkan jalan untuk mengembangkan keterampilan hidup di masyarakat.

4. Cara Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Sistem Penyajian.

- a. Memberi kebebasan belajar sesuai dengan minat, kemampuan, dan kebutuhan ke arah perkembangan yang optimal;
- b. Memberikan pengalaman yang bulat agar anak didik dapat berdiri sendiri dan

menerima tanggung jawab;

c. Mengintegrasikan berbagai pengalaman dan kegiatan pendidikan.

5. Cara Melancarkan Sistem Informasi Kebijakan.

a. Mengusahakan tersedianya saluran komunikasi dua arah (timbang balik) yang cepat, kontinyu, dan dapat diandalkan;

b. Mengusahakan adanya komunikasi terbuka demi kontrol dan partisipasi sosial;

c. Mengusahakan adanya komunikasi langsung dan merata.

(Hasbullah, 2005:203-205).

F. BEBERAPA CONTOH PELAKSANAAN INOVASI PENDIDIKAN

1. Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP).

PPSP mulai ada sejak tahun 1971 di bawah pimpinan sebuah Tim beranggotakan 11 orang, yang diketuai oleh Dirjen Pendidikan Depdikbud. Sebagai landasan tolak saat itu adalah "*Basic Memorandum Menteri Pendidikan dan Kebudayaan*" yang berisi-gagasan-gagasan baru tentang struktur dan metodologi pendidikan. Tahun 1973 PPSP tanggung jawab pengelolaannya dipindahkan dari Ditjen Pendidikan ke Badan Pengembangan Pendidikan.

Semula proyek itu dimaksudkan untuk mencoba bentuk sistem persekolahan komprehensif dengan nama "*Sekolah Pembangunan*" yang kerangkanya secara umum digariskan dalam SK Menteri P dan K No. 0172 Tahun 1971. Beberapa pokok pikiran tentang sekolah pembangunan yang menyangkut relevansi sekolah dengan kebutuhan masyarakat, adalah :

a. Adanya intergrasi antara sekolah dan masyarakat, serta pembangunan;

b. Sekolah menghasilkan tenaga terdidik sehingga dapat merupakan tenaga kerja produktif;

c. Sekolah menghasilkan manusia terdidik dengan pengertian kesadaran ekologi, baik lingkungan social, fisik, maupun biologis;

d. Sekolah menyelenggarakan pendidikan yang menyenangkan, merangsang sesuai dengan tuntutan zaman untuk pendidikan watak, pengetahuan, kecerdasan, ke-

terampilan, kemampuan berkomunikasi, dan kesadaran ekologi;

- e. Sekolah menciptakan keseimbangan fisik, emosional, intelektual, cultural, dan spiritual, serta keseluruhan pembangunan masyarakat;
- f. Sekolah memberi sumbangan bagi ketahanan nasional dan ikutserta dalam pembangunan masyarakat. (Zahara Idris, 1981:41).

Terdapat delapan PPSP yang disertai tugas percobaan, yaitu SD dan SMP/A Percobaan pada IKIP di Padang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Malang, dan Ujungpandang (Makassar). Melalui delapan PPSP ini disusun suatu sistem pendidikan dasar dan menengah yang :

- a. Efektif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat dan individu yang diwujudkan melalui program-program pendidikan yang sesuai;
- b. Merupakan dasar bagi pendidikan seumur hidup;
- c. Efisiensi dan realistis sesuai dengan tingkat kemampuan pembiayaan oleh keluarga masyarakat dan pemerintah.

Sasaran pembaruan sistem pendidikan melalui PPSP ini meliputi beberapa komponen dan elemen, yang salah satu di antara elemen instrumentalnya adalah kurikulum yang sangat menentukan keberhasilan sistem pendidikan tersebut. Kurikulum itu sendiri meliputi beberapa sub elemen yang saling berkaitan, di antaranya :

- a. Tujuan yang ingin dicapai;
- b. Materi yang diberikan;
- c. Garis-garis besar program pengajaran;
- d. Sistem penyampaian atau strategi pengajaran.

Dengan telah diberlakukannya kurikulum bagi sekolah-sekolah di seluruh Indonesia tahun 1975, maka PPSP pun memakai acuan kurikulum 1975.

2. Pengajaran dengan Sistem Modul.

Modul merupakan program pengajaran mengenai satu satuan bahasan yang sengaja disusun secara sistematis, operasional, dan terarah untuk digunakan oleh anak didik. Modul disertai pedoman penggunaannya untuk para guru. Sistem pengajaran dengan modul bertujuan terutama untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi

belajar-mengajar di sekolah, terutama yang berkaitan dengan penggunaan waktu, dana, fasilitas, dan tenaga secara tepat dalam mencapai tujuan secara optimal. Sistem modul sekarang ini dianggap lebih efektif, seperti dalam pengajaran jarak jauh, perkuliahan tutorial, sekolah-sekolah untuk pimpinan instansi tertentu, dsb. yang pemakaiannya sangat meluas. Dalam konteks peranan guru dan siswa dalam sistem pengajaran dengan modul ini, dapat digambarkan sebagai berikut :

a. *Bagian-bagian Modul :*

Tercakup dalam set program, yaitu pedoman cara penggunaan oleh guru, dan program yang disusun untuk siswa, yaitu :

- 1) LKS (Lembaran Kegiatan Siswa), yang berisi rumusan tujuan instruksional yang ingin dicapai, garis-garis besar materi yang akan dipelajari, alat-alat yang digunakan, uraian dan petunjuk tentang kegiatan-kegiatan belajar yang ditempuh siswa, termasuk tugas-tugas yang harus diselesaikan;
- 2) LK (Lembaran Kerja), yang berisi kolom-kolom yang digunakan siswa untuk mencatat jawaban atau hasil-hasil yang diperoleh dalam melaksanakan tugas-tugas yang tercantum dalam LKS.
- 3) KLK (Kunci Lembaran Kerja), yang berisi keterangan tentang jawaban atau hasil penyelesaian tugas yang benar. Jadi, merupakan kunci jawaban;
- 4) LT (Lembaran Tes), yang berisi soal-soal atau pertanyaan-pertanyaan, juga mungkin tugas-tugas yang dimaksud untuk menilai tingkat penguasaan siswa terhadap tujuan-tujuan yang ingin dicapai;
- 5) LJ (Lembar Jawaban), yang berisi kolom-kolom tempat mengerjakan atau menjawab soal-soal yang terdapat pada lembaran tes;
- 6) KJ (Kunci Jawaban), yang berisi keterangan atau jawaban-jawaban yang benar.

Sementara itu, pedoman yang disusun untuk para pengajar yang disebut "*Pedoman Guru*" berisi penjelasan mengenai topik yang dibahas (tujuan dan materi), jenis-jenis kegiatan belajar, dan alat-alat yang digunakan, serta petunjuk tentang cara menggunakan alat pelajaran dan evaluasi.

b. *Siswa dan Peranannya dalam Pengajaran Sistem Modu :*

Melalui sistem modul, pada dasarnya para siswa mendapat kesempatan lebih ba-

nyak untuk belajar sendiri, membaca uraian, dan petunjuk di dalam LKS, menjawab pertanyaan-pertanyaan, atau melaksanakan tugas-tugas yang harus diselesaikan, dan mengecek apakah penyelesaian setiap tugas benar atau tidak. Oleh sebab itu, dalam batas-batas tertentu, siswa dapat maju sesuai dengan irama kecepatan dan potensi yang dimilikinya. Bagi siswa yang telah menyelesaikan suatu modul lebih dahulu dari teman-temannya dan hasilnya baik, disediakan program pengajaran yang dapat dipelajarinya untuk memperluas pengetahuan yang telah diperolehnya. Sementara bagi siswa yang belum selesai, dapat terus mempelajari modul yang sedang dihadapinya tanpa terganggu oleh teman-temannya yang lebih dulu selesai.

c. *Peranan Guru dalam Pengajaran Sistem Modul :*

Dalam sistem ini tugas guru bukanlah untuk menyampaikan pelajaran kepada para siswa sebagaimana halnya dalam sistem biasa. Tugas utama guru dalam sistem modul adalah mengorganisasi dan mengatur proses belajar, antara lain :

- 1) Menyiapkan situasi belajar yang sesuai;
- 2) Membantu para siswa yang mengalami kesulitan di dalam memahami isi modul atau melaksanakan tugas;
- 3) Melaksanakan penilaian terhadap setiap siswa.

3. Proyek Pamong.

Pamong di sini merupakan singkatan dari pendidikan anak oleh masyarakat, orang tua, dan guru. Proyek ini merupakan program bersama antara Pemerintah Indonesia dengan ENNOTECH (Educational Innovation and Technology), SEAMEO (South East Asian Minister of Educational Organization). Di kalangan SEAMEO proyek ini dikenal dengan istilah IMPACT (Instructional Management by Parent Community and Teachers).

Proyek Pamong dilatarbelakangi karena hampir separo dari jumlah anak-anak di Asia Tenggara tidak dapat menyelesaikan pendidikannya di SD. Langkah untuk mengatasi persoalan tersebut mungkin dengan cara memperbanyak gedung sekolah, yang berarti memperluas cara mengajar tradisional. Jika langkah ini yang diambil, tentu akan memerlukan dana yang tidak sedikit dan tidak akan mampu di-

tanggung oleh negara-negara di Asteng. Untuk itu diajukan beberapa solusi sebagai pemecahannya.

a. *Melipatkan Dua atau Tiga Penggunaan Gedung Sekolah.*

Maksudnya adalah menggunakan gedung sekola yang ada untuk dua atau tiga gelombang belajar, yang berarti jumlah anak yang tertampung menjadi dua atau tiga kali lebih banyak. Namun alternatif ini ternyata belum mengurangi dana, sebab hanya berkurang dari segi tempat belajar saja, sementara aspek-aspek lainnya tidak demikian.

b. *Melipatkan Besarnya Kelas.*

Maksudnya memperbanyak jumlah siswa dalam suatu ruang kelas termasuk gurunya. Namun sebenarnya persoalan lain menghadang, yaitu dikhawatirkan terjadi penurunan kualitas.

c. *Mengurangi Waktu Belajar Siswa.*

Maksudnya waktu pertemuan (tatap muka) antara gusu dengan siswa berkurang. Dengan mengurangi waktu pertemuan, maka waktu yang dimiliki guru dapat digunakan oleh siswa lain untuk belajar di bawah bimbingan guru dimaksud. Berarti materi dan prosedur pengajaran harus diubah.

d. *Siswa Belajar Setengah Waktu Sekolah.*

Hal ini dapat dilakukan dengan bergiliran hari masuknya, bergiliran minggu masuknya, atau bahkan bergiliran bulanan. Belajar di luar sekolah dilakukan dengan menggunakan metode “bukan guru”, misalnya belajar dari sumber pelajaran atau bacxaan, sumber-sumber masyarakat, belajar bersama, metode tutorial dari siswa yang lebih senior, dsb.

e. *Meningkatkan Perbandingan Guru Siswa.*

Lebih kurang 90 % dari dana pendidikan dasar digunakan untuk biaya guru SD. Jika biaya ini dapat dihemat, biaya pendidikan para siswa dapat dikurangi, biaya per kepala akan dapat ditekan. Kendati demikian, agar dapat diperoleh hasil pendidikan yang efektif, metode dan bahannya haruslah inovatif.

Dari beberapa alternatif tersebut di atas, yang dilaksanakan oleh Indonesia dan Filipina adalah alternatif ke lima. Adapun tujuan proyek Pamong adalah :

a. Membantu anak-anak yang tidak dapat sepen uhnya mengikuti pendidikan seko-

lah atau siswa drop out (do);

- b. Membantu anak-anak yang tidak mau terlibat oleh tempat dan waktu dalam belajar, sehingga belajar dapat dilakukan sambil bekerja misalnya menggembalakan ternak, waktu istirahat, dsb.
- c. Mengurangi penggunaan tenaga guru sehingga ratio guru terhadap siswa dapat menjadi 1 : 200 padahal pada SD biasa 1 : 40 atau maksimal 1 : 50.
- d. Menampung sebanyak-banyaknya siswa karena ditingkatkannya pemerataan kesempatan belajar dan biaya yang rendah.

Dengan kata lain proyek Pamong ini bertujuan untuk menjajagi dan menemukan alternatif sistem penyampaian pendidikan dasar yang efektif, ekonomis, dan merata, yang sesuai dengan kondisi kebanyakan daerah di Indonesia dan Filipina yang kemudian dapat dimanfaatkan pula oleh negara-negara Asteng pada umumnya. Proyek ini pun berkewajiban untuk menguji efektivitas dan ekonomis tidaknya pelaksanaan konsep pengelolaan berbagai pengalaman belajar yang diperoleh terutama sumber-sumber bukan guru. Sumber-sumber bukan guru ini di antaranya adalah anggota masyarakat yang memiliki kecakapan khusus, siswa yang lebih tinggi tingkat kemajuan belajarnya, siaran pendidikan, kelompok belajar, atau kegiatan mengajar yang tidak memerlukan gedung sekolah.

Berdasarkan Initial Planning Document dari proyek IMPACT, unsur-unsur pokok dari sistem penyampaian pendidikan proyek Pamong adalah sebagai berikut :

a. *Modul.*

Modul umumnya dapat dipelajari secara perorangan menurut kecepatan tiap siswa. Terdapat beberapa modul yang berbentuk pengajaran yang harus dipelajari secara kelompok di bawah bimbingan anggota masyarakat yang telah direkrut untuk kepentingan itu. Modul itu dapat berbentuk buku pelajaran, rekaman, rincian tugas, dsb.

b. *Learning Centre (Pusat Pendidikan).*

Merupakan suatu tempat yang mempunyai potensi menyediakan bahan pelajaran yang bermutu dengan biaya rendah, di samping dapat digunakan oleh para siswa untuk mengisi waktu dengan berbagai pengetahuan di bawah bimbingann seorang pengawas pengajaran.

c. *Bimbingan oleh para Siswa Senior.*

Pada waktu para siswa mempelajari modul baik secara perorangan maupun kelompok, dibantu oleh siswa yang lebih senior sebagai tutor yang bertempat tinggal serumah atau berdekatan. Didahului oleh pelatihan tentang materi modul maupun cara mengerjakan administrasinya, tutor dimaksud diharapkan bantuannya dalam member tes, remediasi, dan bimbingan belajar, serta mencatat data siswa yang dibimbing, terutama yang berkaitan dengan belajarnya.

d. *Pengawasan oleh Orang Tua.*

Para orang tua dilatih untuk mengawasi kegiatan belajar anak-anak mereka sendiri dan diharapkan bertanggung jawab atas kemajuan belajar mereka.

e. *Self base Instruction.*

Pendidikan dasar tidak dengan jenjang kelas, kemajuan ditunjukkan oleh banyaknya atau penguasaannya terhadap modul-modul yang dipelajari. Dengan sistem ini akan bebas mempelajari modul di mana saja, tidak terikat oleh waktu dan kelas.

f. *Anggota Masyarakat.*

Dengan keterampilan (skill) tertentu, anggota masyarakat didaftar dan diberi sekedar latihan bagaimana mengajar kepada siswa. Sementara itu anggota masyarakat lainnya yang telah lulus SD akan dilatih oleh Pengawas Pengajaran untuk mengajar membaca dan menulis permulaan, mengajar berhitung dasar, dsb.

Pelaksana percobaan proyek pamong ini di Indonesia dipercayakan kepada Universitas Sebelas Maret (UNSTRAT) Surakarta yang tahap penajagannya dimulai pada tahun 1974. Kemudian tahun 1976 SD Pamong mulai dieksperimentasikan di SD Alastuwo dan SD Kebakkramat Sragen, Surakarta.

Secara garis besar, pelaksanaan SD Pamong ini dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. Gurunya disebut pembina pendidikan;
- b. Sistem penyampaian pengajaran dengan pelajaran berprogram memakai modul;
- c. Seorang guru dibantu oleh tutor. Dalam hal ini dikenal dua macam tutor :

- 1) *Tutor Kakak*, yang bertugas membantu belajar teman-teman siswa yang ada

di bawahnya, misalnya kelas 1 dan 2 tutornya diambil dari kelas 5 dan 6 yang dipandang mampu.

2) *Tutor Sebaya*, yang bertugas membantu belajar kepada teman-teman sekelasnya. Ini berlaku untuk kelas 3, 4, 5, dan 6.

d. Di samping mengelola dua SD tersebut di atas, Proyek Pamong Surakarta ini juga mengelola anak-anak putus sekolah, terutama dengan memanfaatkan bantuan masyarakat, orang tua, dan pemerintah setempat. Para guru dan tutornya diupayakan dari warga masyarakat itu sendiri.

4. SMP Terbuka.

Merupakan SMP yang kegiatan belajarnya sebagian besar diselenggarakan di luar gedung sekolah dengan cara penyampaian pelajaran melalui berbagai media dan interaksi yang terbatas antara guru dan murid. Lahirnya SMP Terbuka dilatarbelakangi oleh pemikiran untuk menampung anak-anak lulusan SD yang tidak tertampung di SMP biasa, yang pada mulanya ada beberapa alternatif yang coba diidentifikasi, yaitu :

- a. Penambahan daya tampung SLTP, yang dilakukan baik dengan penambahan sekolah baru, ruang kelas baru, juga dengan efisiensi internal;
- b. Peningkatan daya tampung sekolah-sekolah swasta;
- c. Pengembangan sekolah terbuka dengan media korespondensi, modul, siaran radio/televisi, dsb.
- d. Pembukaan kursus-kursus keterampilan praktis di luar sekolah sebagai jalan penyaluran ke masyarakat. (Wasty Soemanto - F.X. Soeyanto, 1983:132).

Yang dipilih adalah alternatif c, yaitu SMP Terbuka, dengan alasan sekolah ini dapat mencapai daya tampung lebih besar dan biayanya tidak terlalu mahal. Sekolah terbuka ini adalah suatu subsistem pendidikan formal yang tujuannya didasarkan pada SMP formal yang dapat diselenggarakan di luar gedung sekolah atau diorganisasi secara nonformal dengan menggunakan kurikulum yang berlaku untuk SMP. Penyajian belajarnya 10% melalui tutorial, dan 90% melalui multimedia.

Berkaitan dengan penyelenggaraan SMP Terbuka, berikut adalah penjelasan lebih lanjut.

a. *Tujuan dan Karakteristik SMP Terbuka.*

Secara umum, tujuan SMP Terbuka sama dengan tujuan pendidikan SMP biasa, yaitu agar lulusannya :

- 1) Menjadi warga negara yang baik, manusia seutuhnya, yang sehat dan kuat lahir batin;
- 2) Menguasai hasil pendidikan umum yang merupakan kelanjutan dari pendidikan SD;
- 3) Memiliki bekal untuk melanjutkan pelajarannya ke SLTA dan untuk terjun ke masyarakat;
- 4) Meningkatkan disiplin siswa;
- 5) Menilai kemajuan siswa, dan memantapkan hasil pelajaran dengan media. (Zahara Idris, 1981:52).

Namun demikian, SMP Terbuka memiliki beberapa kekhasan, yaitu :

- 1) Merupakan pendidikan formal (jalur persekolahan), tetapi sebagian besar berlangsung di luar gedung sekolah;
- 2) Kurikulum ekuivalen dengan kurikulum SMP biasa;
- 3) Kegiatan belajar lebih banyak diadakan dengan studi individual, kelompok kecil, di bawah bimbingan anggota kelompok setempat;
- 4) Guru utama (*mediated master teachers*) yang mengajar dari jarak jauh melalui media modul, radio atau televisi;
- 5) Interaksi tatap muka langsung (*face to face interaction*) untuk tutorial *immediate feedback* dan *reinforcement* yang terbatas;
- 6) Siswa dapat menyelesaikan program studi dalam jangka waktu minimal sama dengan SMP biasa, dan mengikuti ebta (evaluasi belajar tahap akhir atau UAS) menurut kemampuan dan waktu yang ada padanya sesuai dengan prestasi dan boboit pelajaran;
- 7) Prioritas diberitak kepada lulusan SD dalam tiga tahun terakhir atau usia 15 tahun, tanpa menutup kemungkinan kelompok usia lain;
- 8) Tempat pendidikan berlangsung di tempat kediaman siswa dengan diusahakan pembentukan kelompok belajar setempat;
- 9) Kegiatan belajar diawasi deng dimonitor oleh guru pembimbing yang ditunjuk

dari guru SD atau Pamong PLS pada PLKM/PKB setempat;

- 10) Sekolah ini berusaha menumbuhkan partisipasi masyarakat secara lebih besar dan terarah.

b. *Cara Belajar di SMP Terbuka.*

Terdapat beberapa cara belajar di SMP Terbuka, di antaranya melalui tatap muka, melalui media (cetak, elektronik, kaset, slide, gambar-gambar, dll.).

1) Tatap Muka :

Tatap muka dengan guru Pembina dilaksanakan selama enam jam dalam seminggu di gedung SMP Induk. Selama tatap muka, yang diutamakan adalah :

- Membahas masalah-masalah yang tak terpecahkan dalam belajar sendiri atau kelompok;
- Belajar yang memerlukan peralatan tertentu yang hanya ada di SMP Induk;
- Meningkatkan kedisiplinan siswa;
- Menilai kemajuan siswa;
- Memantapkan hasil pelajaran dengan media.

2) Melalui Radio/TV :

Melaui siaran radio dan tayangan tv di kawasan lokasi SMP Terbuka, disiarkan bahan-bahan pelajaran setiap harinya secara teratur. Siswa mendapat jadwal siaran yang menerangkan acara dan waktu siaran/tayangan.

3) Melalui Media Cetak :

Ada tiga macam yang digunakan, yaitu modul, brosur, dan buku pedoman.

4) Melalui Kaset, Slide, Model dan Gambar-gambar :

Media yang digunakan di bawah bimbingan guru pembimbing, dan media dimaksud berperan sebagai :

- Pengganti pengalaman langsung;
- Penguat bagian-bagian pelajaran yang dipandang perlu;
- Pendorong minat belajar;
- Sebagai bahan pengayaan.

c. *Tenaga Pengajar.*

Tenaga pengajar di SMP Terbuka dibedakan menjadi dua macam, yaitu guru pembina dan guru pembimbing.

1) Guru Pembina :

Adalah guru bidang studi yang bertugas dan bertanggung jawab penuh atas perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan belajar, dan menilai prestasi siswa. Guru Pembina ini adalah guru bidang studi pada SMP Induk yang juga diberi tugas di SMP Terbuka. Tugas guru Pembina adalah :

- Merencanakan kegiatan belajar, baik yang bersifat tatap muka maupun kegiatan dalam pusat kegiatan belajar kelompok;
- Memberikan petunjuk, bimbingan, dan supervise kepada guru pembimbing;
- Memberikan bimbingan perorangan kepada siswa;
- Mengatur penyampaian bahan-bahan ajar;
- Mengatur penggunaan fasilitas pelajaran yang diperlukan untuk pelajaran secara tatap muka;
- Melaksanakan kegiatan belajar tatap muka.

2) Guru Pembimbing :

Adalah guru yang bertugas membantu guru pembina dalam melaksanakan kegiatan belajar pada siswa di kelompok belajar setempat, dan membantu pelaksanaan penilaian prestasi siswa. Guru pembimbing diambil dari anggota masyarakat setempat yang memenuhi persyaratan untuk menjalankan tugas pembimbingan. Secara rinci tugas guru pembimbing itu adalah :

- Membantu memecahkan dan menampung serta menyalurkan persoalan yang dihadapi siswa secara perseorangan maupun kelompok, baik yang bersifat edukatif maupun administratif;
- Membagikan bahan-bahan pelajaran kepada siswa;
- Membimbing siswa agar belajar dengan teratur menurut jadwal yang telah ditetapkan;
- Mencatat dan mengawasi pelaksanaan belajar siswa baik secara berkelompok atau pun perorangan;
- Mencatat dan melaporkan hasil kegiatan belajar siswa kepada guru pembina;
- Menjadi penghubung antara SMP Terbuka dengan masyarakat;
- Mengatur penggunaan fasilitas desa untuk kepentingan kegiatan belajar;

- Merencanakan kegiatan bersama dengan guru pembina.

Penyelenggaraan SMP Terbuka hendaknya merupakan dan dirasakan sebagai tugas bersama antara masyarakat, orang tua, dan pemerintah. Agar penyelenggaraan SMP Terbuka berhasil dengan baik, diperlukan partisipasi masyarakat, a.l. berupa :

- 1) Menyekolahkan anak-anaknya di SMP Terbuka;
- 2) Menyediakan tempat untuk kegiatan belajar;
- 3) Mengawasi siswa agar dapat belajar sendiri atau kelompok;
- 4) Menyediakan peralatan untuk praktek, dll.

d. *Perkembangan SMP Terbuka.*

Pelaksanaan SMP Terbuka melalui masa perintisan dan penyebaran.

1) Masa Perintisan :

Masa ini pun dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu :

- Pada tahun ajaran 1979/1980 dimulai untuk kelas 1 saja dengan target 1000 orang siswa, pada 5 kecamatan di 5 provinsi, yaitu Kalianda (Lampung), Plumbon (Jabar), Adiwarna (Jateng), Kalisat (Jatim), dan Terara (NTB);
- Pada tahun ajaran 1980/1981, siswa kelas 1 telah naik ke kelas 2, kemudian menerima lagi 1000 orang siswa kelas 1. Tahap ini dinamakan tahap pematapan dan pengembangan untuk kelas 1.
- Pada tahun ajaran 1981/1982, siswa kelas 1 dan 2 naik kelas, dan menerima lagi 1000 orang siswa. Tahap ini dinamakan pemantapan dan pengembangan untuk kelas 1 dan 2.

2) Tahap Penyebaran :

Masa ini dilaksanakan secara bertahap setelah diadakan evaluasi terhadap SMP Terbuka dan disesuaikan dengan :

- Pertumbuhan kebutuhan program SMP Terbuka bagi anak usia sekolah di tingkat SMP;
- Kondisi pembiayaan dan kondisi persiapan tenaga yang akan melaksanakan SMP Terbuka.

Demikianlah tahapan demi tahapan dalam upaya pengembangan SMP Terbuka dilaksanakan dengan baik, dan dalam kenyataannya terus berkembang

seiring dengan perkembangan dunia pendidikan pada umumnya. Lebih-lebih lagi, lulusan SMP Terbuka mempunyai hak dan kesempatan yang sama dengan lulusan SMP biasa.

5. Kuliah Kerja Nyata (KKN).

Kuliah Kerja Nyata (KKN) sudah mulai dirintis sejak tahun 1971 yang baru melibatkan 40 mahasiswa dari tiga Universitas, yang pada tahun-tahun berikutnya terus bertambah, setelah sebelumnya dilaksanakan program-program yang memberikan kesempatan tenaga-tenaga muda berpendidikan untuk membantu proses pembangunan, yaitu :

1. Pengerahan tenaga mahasiswa (PTM) 1951-1962;
2. Program Bimbingan Masaal (Blmas) 1963;
3. Badan Urusan Tenaga Sukarela Indonesia (BUTSI) 1969.

Program ini berlanjut pada Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) I, namun pola dasarnya muncul dari Keputusan Presiden (Keppres) No. 11 Tahun 1974 tentang Repelita II yang dalam Bab XXII Bagian III yang pengertiannya adalah, “KKN sebagai intrakurikuler dilaksanakan dengan penempatan mahasiswa dari suatu tingkat studi tertentu dalam kesatuan-kesatuan antardisiplin ilmu penge-tahuan (interdisipliner) di daerah-daerah yang meliputi sejumlah desa untuk waktu tertentu (misalnya enam bulan). Para mahasiswa disiapkan terlebih dahulu dalam berbagai bidang keterampilan, sehingga di samping keahliannya dalam jurusannya masing-masing, mereka dapat kemampuan untuk memecahkan problem yang dicapai desa secara menyeluruh, di bawah koordinasi dari para dosen pembimbing. Para mahasiswa peserta KKN ini dapat membantu para pemuda potensi desa di dalam pengembangan desa menuju kepada swadaya masyarakat desa. Dengan demikian, proyek KKN dapat menjadi sarana pendidikan nonformal yang efektif dan efisien. Proyek-proyek perintis KKN, yang dimulai pada Repelita I, akan diluaskan dan dikembangkan dalam Repelita II menuju kepada pelaksanaan KKN secara penuh di semua Universitas Negeri maupun Swasta”.

Dengan demikian, KKN dapat diartikan sebagai salah satu bentuk pengintegrasian antara pengabdian pada masyarakat dengan pendidikan dan penelitian, yang

terutama oleh mahasiswa dengan bimbingan perguruan tinggi dan pemerintah daerah, dilaksanakan secara interdisipliner dan intrakurikuler. Atau lebih konkritnya, KKN adalah kegiatan perkuliahan dalam bentuk pengabdian masyarakat yang berkaitan dengan program pendidikan perguruan tinggi secara keseluruhan. (Hasbullah, 2005:226). KKN juga dimaksudkan untuk memberikan pengalaman praktis kepada mahasiswa tentang program pembangunan daerah pedesaan sebagai unsure pendidikan dan penyediaan sumber daya yang terdiri dari tenaga-tenaga muda berpendidikan untuk keperluan pendidikan dan pembangunan di daerah pedesaan.

Demikianlah, KKN merupakan perwujudan dari “Tri Dharma Perguruan Tinggi” di bidang pengabdian pada masyarakat. Berkenaan dengan hal itu, maka jika dianalisis secara lebih komprehensif, paling tidak KKN memiliki empat komponen penting sebagai berikut :

a. *Sebagai Kegiatan Penalaran.*

KKN merupakan meditasi bagi mahasiswa untuk memperkenalkan secara langsung (*direct introduction*) dengan masyarakat beserta berbagai macam problematikanya, dengan memanfaatkan disiplin ilmunya secara indisipliner;

b. *Sebagai Aktivitas Penelitian.*

KKN mengantarkan mahasiswa untuk menganalisis dan memformulasikan problematika yang kompleks itu dan menganalisis sumber daya yang ada dalam masyarakat beserta kelemahan-kelemahan yang mungkin ada, yang disertai mekanisme *problem solving*-nya. Wujud konkritnya berupa agenda program kegiatan;

c. *Mengandung Unsur Pengembangan.*

Dalam KKN, mahasiswa akan diproporsikan ke dalam suatu tatanan sistem kemasyarakatan dengan harapan akan mampu mengembangkan segala daya yang telah ada dan akan dimilikinya;

d. *Pengabdian pada Masyarakat.*

Dengan KKN, mahasiswa akan mengimplementasikan segala sesuatu yang telah diperolehnya, baik berupa ilmu, teknologi, maupun seni, untuk turut memberikan kontribusi positif dalam penemuan solusi problematika yang ada dalam

masyarakat, dengan cara penanganan yang praktis pragmatis. Bagaimana pun KKN merupakan komplementer bagi pembekalan mahasiswa ketika mereka nanti kembali ke masyarakat.

Sasaran pelaksanaan KKN tidak hanya melingkupi masyarakat yang akan ditempati mahasiswa, tetapi juga ditujukan kepada mahasiswa itu sendiri dan almamaternya.

a. *Bagi Mahasiswa.*

- 1) Memperdalam pengertian dan penghayatan tentang :
 - Cara berpikir dan bekerja interdisipliner pada pembangunan;
 - Kegunaan hasil pendidikan dalam pembangunan;
 - Kesulitan yang dihadapi masyarakat desa pada pembangunan;
 - Konteks keseluruhan dari masalah pembangunan.
- 2) Mendewasakan alam pikiran mahasiswa;
- 3) Memberikan pengalaman keterampilan untuk melaksanakan program pengembangan dan pembangunan desa;
- 4) Memberikan kesempatan menjadi seorang inovator, motivator, katalisator, dan problem solver;
- 5) Membina sikap tanggung jawab terhadap masyarakat desa.

b. *Bagi Masyarakat.*

- 1) Memperoleh bantuan tenaga dan pikiran untuk merencanakan dan melaksanakan proyek pembangunan;
- 2) Cara berpikir dan bertindak sesuai dengan program pembangunan lebih meningkat;
- 3) Terjadi prose pembaruan-pembaruan;
- 4) Terbentuknya kader-kader pembangunan.

c. *Bagi Almamater.*

- 1) Memperoleh umpan balik sebagai hasil integrasi mahasiswa agar kurikulum PT sesuai dengan tuntutan pembangunan;
- 2) Staf pengajar memperoleh berbagai kasus yang dapat digunakan sebagai contoh dalam proses pendidikan;
- 3) Mempererat dan meningkatkan kerjasama antar PT sebagai pusat ilmu-ilmu

dan teknologi dengan masyarakat sebagai penerima serta instansi lain terkait;

- 4) Memanfaatkan dan meningkatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni PT dalam pemecahan berbagai masalah pembangunan sehingga terjadi keserasian antara pendidikan di PT dengan kebutuhan pembangunan.

Dalam konteks inovasi pendidikan, ada beberapa hal yang bercirikan inovatif dari pelaksanaan KKN, di antaranya :

- a. Menjadikan mahasiswa menyadari arti pentingnya peranan desa dalam pembangunan nasional, sehingga mereka bersedia bekerja di desa untuk membangun desa setamatnya mereka kuliah;
- b. Menyadarkan desa akan potensinya, sehingga dapat mengembangkan sumber lapangan kerja yang baru, serta melibatkan mahasiswa dalam pendidikan non-formal yang memberikan keterampilan khusus sehingga menjadikan masyarakat desa *economic oriented*.
- c. Memberi umpan balik kepada PT untuk menjadikan kurikulumnya lebih serasi dengan kebutuhan masyarakat yang sedang membangun, dengan memberikan keseimbangan yang tepat antara perkembangan intelektual dan keterampilan yang praktis.

6. Radio Pendidikan.

Siaran radio pendidikan muncul bertitik tolak dari pemikiran bahwa tugas guru tidaklah ringan, dan dia pun harus belajar terus-menerus agar dapat mengikuti perkembangan profesinya. Siaran radio pendidikan ini awalnya dikhususkan untuk para guru SD. Ada beberapa tujuan dalam penyelenggaraan radio pendidikan ini, yaitu :

- a. Menunjang penataran tatap muka yang diselenggarakan oleh Proyek Pembinaan SD;
- b. Memperkaya sumber belajar maupun bahan-bahan penataran yang ada, menjaga kesinambungan pembinaan kemampuan, serta memantapkan penataran yang telah diikuti oleh para guru di lapangan;
- c. Meningkatkan penyebaran penataran guru secara lebih merata cepat ke daerah-daerah yang sukar dijangkau secara fisik;

- d. Mendorong tercapainya prinsip belajar seumur hidup bagi guru;
- e. Menjalin terpeliharanya kontak antarsesama guru, dan antara guru dengan sumber belajar, antara lain para pengasuh siaran radio pendidikan.

Siaran radio pendidikan berisikan bahan-bahan untuk melaksanakan kurikulum bidang studi Bahasa Indonesia, PMP, IPA, IPS, Matematika, dan Ilmu Keguruan (Pendidikan Umum). Selain itu, disiarkan juga program kebijakan setempat yang berisikan jawaban atas masalah-masalah yang ditanyakan oleh para guru peserta siaran radio pendidikan. Pelaksanaan siaran radio pendidikan secara bersama diikuti oleh para guru dalam kelompok-kelompok belajar yang terbentuk di masing-masing sekolah tempat mereka mengajar. Kelompok ini dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris yang bertugas mengorganisasikan anggota-anggotanya dalam mengikuti siaran radio pendidikan secara efektif. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi tentang bahan atau informasi yang diperoleh, termasuk langkah-langkah penerapannya dalam tugas pengajaran sehari-hari. Setiap kelompok belajar memperoleh bahan penyertaan yang berisi pokok bahasan, bahan persiapan, dan petunjuk lain yang diperlukan dalam mengikuti program siaran. Agar program siaran dapat diikuti dengan baik dan lancar, kepada mereka diberikan jadwal siaran yang rinci.

Proses penyelenggaraan siaran, dimulai dengan langkah persiapan, berupa penyusunan Pola Dasar Kegiatan Belajar Mengajar (PDKBM) yang berisi tujuan instruksional umum, pokok bahasan, sub pokok bahasan, topik, tujuan instruksional khusus, dan materi (bahan ajar) secara ringkas. Penyusunan PDKBM ini dilakukan bersama berdasarkan kurikulum SD dan kurikulum Penataran Proyek Pembinaan SD oleh Tim Pengembangan Kurikulum yang terdiri dari para pakar bidang studi dan para pengembang instruksional. Berpedoman pada PDKBM ini disusunlah naskah siaran dan bahan penyerta oleh para penulis yang terdiri dari para dosen FKIP dan guru-guru SD yang telah ditetapkan/ditunjuk.

Para pendengar siaran dari berbagai kalangan, terutama kalangan pendidikan atau pengamat pendidikan, diharapkan memberikan masukan, saran, umpan balik kepada penyelenggara siaran radio pendidikan, dengan menulis surat, e-mail, telepon, dll. termasuk yang berupa pertanyaan-pertanyaan.

7. Televisi Pendidikan.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dampaknya luas sekali dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Karenanya, mau tidak mau orang harus berupaya menyesuaikan diri, minimal barangkali dapat memanfaatkan produk dari kemajuan iptek dimaksud, tidak terkecuali di sektor pendidikan. Itulah sebabnya di tengah maraknya perkembangan pertelevisian di Indonesia, dunia pendidikan pun berkehendak memanfaatkan televisi sebagai media dalam pelaksanaan pendidikan. Maka diadakanlah Televisi Pendidikan.

Program siaran TP dibedakan menjadi menjadi dua, yaitu TV Pendidikan untuk Anak-anak, dan TV Pendidikan untuk Umum.

a. TV Pendidikan untuk Anak-anak.

- 1) Menghasilkan sejumlah program pembinaan watak yang isi maupun format penyajiannya sudah teruji dan memenuhi standar teknis siaran TVRI;
- 2) Mencari suatu model proses produksi program TP untuk anak-anak dengan kriteria tidak terlalu ideal dan secara sistematis disesuaikan dengan kondisi Indonesia. Sasarannya adalah anak usia 10-15 tahun, terutama mereka yang berada di lingkungan kondisi sosial ekonomi lemah.

b. TV Pendidikan untuk Umum.

Hal ini untuk memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat akan paket-paket pendidikan yang tidak mungkin diperoleh melalui jalur pendidikan sekolah atau pun luar sekolah. Tujuan TP ini adalah untuk mengembangkan program-program pendidikan luar sekolah dengan cara menyebarluaskan pesan-pesan yang tematis agar masyarakat memiliki pengetahuan dan sikap yang tepat, khususnya tentang pendidikan kesejahteraan keluarga, pendidikan mata pencaharian, dan pendidikan alam dan lingkungan hidup.

Siaran-siaran pendidikan melalui televisi ini sekarang tidak saja lewat TVRI, tetapi juga melalui televisi-televisi swasta, seperti TPI (sekarang MNCTV), RCTI, SCTV, ANteve, dll. namun porsi nya kecil.

8. Sekolah Unggulan.

Pembentukan sekolah-sekolah unggulan pada dasarnya sebagai upaya peningkatan

dan pengembangan kualitas sumber daya manusia, terutama dalam menyongsong pembangunan jangka panjang (PJP) II di era pemerintahan Orde Baru, dan diresmikannya Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajardikdas) Sembilan Tahun. Dan dalam UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sisdiknas Pasal 8 Ayat (2) disebutkan bahwa warga negara yang mempunyai kemampuan dan kecerdasan luar biasa berhak memperoleh perhatian khusus.

Salah satu tujuan sekolah unggulan adalah menjaring dan sekaligus mengembangkan kader bangsa yang baik, dalam arti, memiliki kelebihan dalam berbagai aspek dibandingkan dengan kader-kader bangsa pada umumnya, sehingga mampu mengantisipasi dan menjawab berbagai tantangan zaman. Dalam penyelenggaraannya dilibatkan juga peran swasta dan pemerintah daerah.

Berkenaan dengan sekolah unggulan ini, beberapa hal yang perlu dikemukakan adalah :

a. *Tinjauan Historis Kelahirannya.*

Pada masa sebelum Orde Baru, program semacam sekolah unggulan ini belum ada, kendati sudah ada pemikiran ke arah itu. Maksudnya, belum ada sekolah yang secara terbuka dinyatakan bertujuan mendidik anak berbakat (berkemampuan intelektual di atas rata-rata) saja. Hal ini didasarkan pada kenyataan terjadinya kejenuhan bagi anak berbakat jika belajar sekelas bersama anak-anak yang kemampuan intelektualnya ada di bawahnya. Maka diperlukan jalan keluarnya yaitu dengan membentuk sekolah-sekolah unggulan.

Sebenarnya sebelum lahir sekolah-sekolah unggulan, sudah ada upaya yang dilakukan yang dapat dikatakan mirip dengan sekolah unggulan seperti :

- 1) Loncat kelas, atau disebut juga *akselerasi* (percepatan), untuk memberikan perhatian khusus kepada anak-anak berbakat, yaitu dengan memberi kesempatan untuk tidak mengikuti masa belajar seperti yang dialami siswa-siswa umumnya. Jadi anak berbakat ini diberi kesempatan naik kelas sebelum waktunya. Program ini memang berhasil, tetapi mengandung kelemahan, yaitu salah-salah bisa berakibat fatal bagi anak, karena tidak menguasai tahapan-tahapan materi pelajaran yang seharusnya dipahami terlebih dulu sebelum materi di kelasnya yang baru. Hal ini secara psikologis dapat menim-

bulkan kebingungan, kegugupan, atau kepanikan meskipun sulit terbaca oleh orang awam.

2) *Sekolah Favorit.*

Penyelenggaraannya sangat tersamar dan sudah berjalan lama khususnya di kota-kota besar. Ukuran sekolah favorit ini adalah para lulusannya yang mampu melewati Ujian Masuk/Selaksi Perguruan Tinggi (UMPTN/SMPTN) atau lulus PMDK yang mencapai prosentase yang tinggi, sehingga dianggap oleh masyarakat sekolah yang baik mutunya, dan menjadi tumpuan orang tua untuk berebut menyekolahkan anaknya ke sekolah dimaksud. Dalam hal ini, pihak sekolah akan berusaha terus menjaga reputasinya, dan semakin selektif dalam menerima siswa baru, dan pada sisi lain, orang tua pun tidak berpikir panjang tentang berapa uang yang harus dikeluarkan untuk mendapat kursi bagi anaknya. Salah satu upaya mempertahankan dan meningkatkan kualitas pendidikan itu di antaranya akan dibutuhkan biaya yang lebih besar baik untuk prasarana dan sarana sekolah (gedung, ruang kelas, meubelair), fasilitas-fasilitas belajar (alat-alat peraga, laboratorium, perpustakaan, studi lapang, dll.), tambahan insentif bagi guru, dll. dan ini barang tentu akan ditanggung pula oleh orang tua siswa. Akibatnya, terjadi kesenjangan antara sekolah favorit dan sekolah yang tidak favorit, terutama yang diselenggarakan oleh pemerintah, sehingga mengundang banyak kritik dari berbagai pihak.

Jika ditelusuri lebih jauh, ada beberapa hal yang menjadikan suatu sekolah menjadi favorit, yaitu :

- Terseleksinya siswa-siswa secara ketat, sehingga yang dapat diterima benar-benar anak pilihan yang secara akademik mempunyai prestasi terbaik;
- Manajemen pesekolahannya baik, yang bisa dilakukan dengan pembinaan dan disiplin belajar mengajar yang benar-benar terkontrol, administrasi sekolah yang baik dan tertib, orang tua (POMG/BP-3/Komite) berperan aktif membantu, tingkat kesejahteraan kepala sekolah, guru dan karyawan baik;
- Peran guru yang dikendalikan secara baik, sebagai pengaruh dari manajemen sekolah yang baik;
- Fasilitas-fasilitas yang diperlukan memadai.

3) *SMA Taruna Nusantara.*

Salah satu sekolah yang benar-benar disiapkan untuk mendidik anak-anak unggulan adalah SMA Taruna Nusantara di Magelang yang didirikan oleh Lembaga Perguruan Taman Taruna Nusantara, yaitu lembaga hasil kerjasama Yayasan Keuangan Jenderal Sudirman milik ABRI dan Perguruan Taman Siswa. SMA Taruna Nusantara ini selain mendidik anak-anak yang sangat selektif, juga memiliki kenusantaraan, yaitu selain siswanya mewakili seluruh wilayah nusantara, juga dalam sistem pendidikannya ditempa dengan tiga wawasan, yaitu :

- Wawasan keuangan Jenderal Sudirman;
- Wawasan kebangsaan;
- Wawasan kebudayaan Indonesia.

Lembaga pendidikan yang memilih siswanya melalui seleksi sangat ketat dengan menelusuri prestasi belajarnya sejak SMP ini, juga membina kehidupan di asrama dengan suasana paedagogis yang mampu menunjang tercapainya tujuan pendidikan nasional secara maksimal.

4) *Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional dan Sekolah Bertaraf Internasional.*

Untuk persiapan memasuki era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), maka pendidikan harus mampu berperan dan bersaing di dunia internasional dengan mencetak sumber daya manusia yang berkualitas. Salah satu upaya ke arah itu maka Depdiknas (Kemendikbud) mencanangkan berdirinya RSBI menuju SBI. Dalam penyelenggaraannya ternyata ada yang berhasil tetapi banyak juga yang tidak terlalu memuaskan. Tetapi dampak yang sangat menonjol dan dirasakan berat oleh masyarakat adalah biayanya yang tinggi dibanding dengan sekolah-sekolah biasa. Maka dengan gencarnya protes masyarakat yang kemudian diajukan uji materil UU No. 20 Tahun 2003 terhadap UUD 1945 (atas keberadaan RSBI dan SBI ini), akhirnya Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan RSBI dan SBI bertentangan dengan UUD 1945, dan karenanya RSBI dan SBI harus dibubarkan.

b. *Dimensi-dimensi Keunggulan.*

Banyak pandangan dan ragam pendapat tentang keunggulan dalam pendidikan

dengan segala kriterianya. Ada yang melihat keunggulan itu dari aspek masukan (*input*)nya, proses belajar-mengajarnya, layanan pendidikannya, bahkan dari aspek pembiayaannya. Namun pada umumnya yang diterima secara logis keunggulan itu dilihat dari aspek *output* atau keluaran pendidikannya (lulusan). Indikator keunggulan itu sebenarnya harus mengacu pada tujuan pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Karakteristik ideal keluaran pendidikan jumlahnya cukup banyak, namun dalam konteks sekolah unggulan, ada penekanan-penekanan tertentu yang sifatnya khusus, misalnya pada pembinaan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan YME yang parallel dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepemimpinan, disiplin, semangat kebersamaan, penguasaan bahasa asing (terutama Inggris dan Arab), dsb.

Dalam upaya mencapai keunggulan dimaksud, maka input berupa siswa, proses pendidikan, guru dan tenaga kependidikan, layanan pendidikan, manajemen, serta prasarana dan sarana penunjangnya diarahkan untuk mewujudkan tercapainya tujuan nasional pendidikan. Dimensi-dimensi keunggulan dalam suatu sekolah, paling tidak meliputi hal-hal sebagai berikut :

- 1) Para calon siswa yang akan memasuki sekolah bersangkutan diseleksi secara ketat dengan menggunakan kriteria tertentu dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan. Kriteria umum yang dipakai adalah prestasi belajar superior dan skor psikotes. Dihindari adanya titipan-titipan dari mana, siapa, dan cara apa pun;
- 2) Prasarana dan sarana diarahkan untuk menunjang secara maksimal pemenuhan kebutuhan belajar siswa dalam menyalurkan bakat dan minatnya, baik dalam kegiatan kurikuler maupun ekstra kurikuler;
- 3) Lingkungan belajar (fisik maupun sosial psikologis) yang kondusif untuk berkembangnya potensi keunggulan menjadi keunggulan efektif;
- 4) Karena para siswanya mempunyai tingkat intelektual yang tinggi (di atas rata-rata) atau superior, maka guru-guru dan tenaga kependidikannya pun juga harus unggul, baik dalam penguasaan materi pelajaran, metode mengajar, maupun komitmen terhadap pelaksanaan tugas. Dalam hal ini perlu diperhati-

kan adanya insentif (uang) maupun fasilitas-fasilitas lainnya (a.l. perumahan, kendaraan, dll.);

- 5) Pengayaan kurikulum, dalam arti, walapun sudah ada kurikulum nasional yang standar, namun perlu modifikasi dan improvisasi secara maksimal, sesuai dengan tuntutan belajar siswa yang memiliki kecepatan belajar serta motivasi belajar yang tinggi dibanding dengan siswa seusianya;
- 6) Rentang waktu belajar di sekolah itu lebih panjang (lama) dibandingkan dengan sekolah-sekolah umumnya, sehingga perlu penyediaan sarpras penunjangnya;
- 7) Proses belajar-mengajar yang berkualitas serta hasilnya selalu dapat dipertanggungjawabkan kepada siswa, lembaga, dan masyarakat;
- 8) Nilai plus dari sekolah unggulan justru terletak pada perlakuan tambahan di luar kurikulum nasional, yaitu modifikasi kurikulum, program pengayaan dan perluasan, improvisasi, pembinaan disiplin dan kreativitas, sistem asrama (boarding school), dan kegiatan ekstra kurikuler lainnya. Biasanya setiap sekolah unggulan memiliki karakteristik keunggulannya masing-masing.

c. *Mempersiapkan Pendidik.*

Dalam penyelenggaraan sekolah unggulan, bukan hanya siswa, sarpras, administrasi, kurikulum, lingkungan, dan aspek-aspek pendukung lainnya yang dituntut dirancang dengan baik dan seksama, tetapi juga dalam mempersiapkan guru dan tenaga kependidikannya. Sekolah unggul yang ingin mencetak manusia unggul haruslah dilakukan oleh pendidik yang unggul pula. Ironis sekali jika seseorang yang bertindak sebagai pendidik di sekolah unggul hanya mempunyai kemampuan pas-pasan, atau sama dengan pendidikan di sekolah umum kebanyakan.

Memang sejauh ini lembaga-lembaga pendidikan atau perguruan tinggi yang bergelut dalam dunia pendidikan/keguruan seperti UN (dh. IKIP), FKIP di Universitas, atau Fakultas Tarbiyah UIN, belum atau tidak mempersiapkan guru atau tenaga kependidikan unggulan. Maka sebaiknya untuk rekrutmennya dilakukan dengan cara seleksi ketat dilihat dari berbagai aspek yang menyangkut kapabilitas, kapasitas, moralitas, dll. sesuai dengan kriteria unggul atau terbaik. Akan tetapi ini dilakukan kepada mereka yang baru lulus, yang diharapkan hasilnya

maksimal. Sementara jika dilakukan kepada mereka yang sudah berpengalaman dan jelas berkualitas, maka sekolah tempat di mana mereka mengajar akan dirugikan, karena mereka adalah aset yang sangat berharga. Artinya, sebaiknya tidak merekrut dari guru di sekolah lain yang yang belum kategori unggul.

Berkenaan dengan hal tersebut, sebaiknya pemerintah secara bertahap melalui berbagai upaya (memonitor keunggulan tatkala calon masih mahasiswa, diklat khusus, dll.), mempersiapkan secara khusus para calon guru/pendidik unggul bagi sekolah-sekolah unggul. Hal ini dipandang sangat penting dan serius, mengingat berkaitan langsung dengan dimensi mutu mendidik dan mengajar, yang berujung pada pencapaian tujuan pendidikan nasional.

BAB VIII

DEMOKRASI PENDIDIKAN

A. PENGERTIAN DAN PERLUNYA DEMOKRASI PENDIDIKAN

Secara etimologis, istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *demos* yang berarti rakyat, dan *cratos* atau *cratein*, yang berarti kekuasaan atau pemerintahan. Jadi, demokrasi adalah kekuasaan atau pemerintahan rakyat. Atau menurut Abraham Lincoln (AS, 1863), demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (*government of the people, by the people, and for the people*). Sedangkan menurut KUBI, demokrasi diartikan sebagai, “pemerintahan rakyat; (bentuk) pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantaraan wakil-wakilnya”. (W.J.S. Poerwadarminta, 2007:278).

Demokrasi oleh karenanya merupakan pelaksanaan dan prinsip kesamaan sosial dan tidak adanya perbedaan yang mencolok, yang juga menjadi cara hidup, suatu *way of life* yang menekankan nilai individu dan inteligensia serta manusia percaya bahwa dalam berbuat bersama manusia menunjukkan adanya hubungan sosial yang mencerminkan saling hormat-menghormati, kerjasama, toleransi, dan *fair play*.

Di dunia pendidikan, pendidikan yang demokratis adalah pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anak didik untuk mendapatkan pendidikan di sekolah sesuai dengan kemampuannya (St. Vembrianto, 1981:8). Demokratis di sini mencakup arti secara horizontal maupun vertikal. Demokrasi secara horizontal maksudnya bahwa setiap anak, tidak ada kecualinya, mendapatkan kesempatan yang sama untuk menikmati pendidikan sekolah. Di Indonesia hal ini sesuai dengan Pasal 31 Ayat (1) UUD 1945, yaitu, “*Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pendidikan*”. Sedangkan demokrasi secara vertikal maksudnya bahwa setiap anak (warga negara) mendapat kesempatan yang sama untuk mencapai tingkat pendidikan sekolah yang setinggi-tingginya, sesuai dengan kemampuannya (Hasbullah, 2005:243). Maka dalam pendidikan, demokrasi ditunjukkan dengan pemusatan perhatian serta usaha pada si anak didik dalam keadaan sewajarnya (inteligensia, kesehatan, keadaan sosial, dsb.). Di kalangan

Taman Siswa dianut sikap *tut wuri handayani*, suatu sikap demokratis yang mengakui hak si anak untuk tumbuh dan berkembang menurut kodratnya. (Soegarda Poerbakawatja, 1982:69). Dengan demikian, tampaknya demokrasi pendidikan merupakan pandangan hidup yang mengutarakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama di dalam berlangsungnya proses pendidikan antara pendidik dengan anak/peserta didik, serta juga dengan pengelola pendidikan, yang berlangsung dalam pergaulan, baik secara perseorangan maupun kolektif. Namun, pendidikan tidak hanya berlangsung secara tatap muka, tetapi lebih jauh dari itu, bisa juga terjadi melalui penggunaan media (cetak, elektronik, dll.).

Demokrasi pendidikan dalam pengertian yang lebih luas memberikan manfaat dalam praktek kehidupan, paling tidak mengandung hal-hal sebagai berikut :

1. Rasa Hormat terhadap Harkat dan Martabat Manusia.

Demokrasi dianggap sebagai pilar pertama untuk menjamin persaudaraan hak manusia dengan tidak memandang perbedaan jenis kelamin, usia, suku, bangsa, warna kulit, agama, budaya, dll. Dalam pendidikan, nilai-nilai inilah yang ditanamkan dengan memandang adanya perbedaan-perbedaan itu sebagai keragaman yang perlu dihormati dan dihargai, baik di antara peserta didik maupun dengan gurunya, atau antar pemangku kepentingan (*stackholders*) yang terkait dalam proses pendidikan.

2. Setiap Manusia Memiliki Perubahan ke Arah Pikiran yang Sehat.

Prinsip inilah yang melahirkan pandangan bahwa manusia itu harus dididik. Dengan pendidikanlah manusia akan berubah dan berkembang ke arah yang lebih baik, sehat, dan sempurna. Oleh karenanya, sekolah sebagai lembaga pendidikan diharapkan dapat mengembangkan kemampuan anak/peserta didik untuk berpikir dan memecahkan masalah atau persoalan-persoalan sendiri secara teratur, sistematis, dan komprehensif serta kritis, sehingga akan memiliki wawasan, kemampuan, dan kesempatan yang luas. Dalam hal ini diperlukan sikap yang demokratis, sehingga tidak terjadi pemaksaan kehendak kepada orang lain, dan dari sinilah diharapkan akan lahir warga negara yang demokratis.

3. Rela Berbakti untuk Kepentingan Kesejahteraan Bersama.

Pengertian demokrasi tidak dibatasi oleh kepentingan individu-individu lain, artinya seseorang bebas bersikap dan berbuat, akan tetapi dengan tetap menghormati kebebasan orang lain. Atau sama halnya memiliki hak asasi manusia tetapi juga menghargai hak asasi manusia lain. Inilah yang disebut toleransi. Dengan demikian, tidak ada seseorang yang karena kebebasannya berbuat sesuka hatinya sehingga merusak atau mengganggu kebebasan orang lain atau malah kebebasannya sendiri. Dalam hal ini, maka norma, aturan, atau tata nilai yang ada di masyarakatlah (adat-istiadat, kesusilaan, kesopanan, agama, hukum) yang membatasi dan mengendalikan kebebasan itu. Warga negara yang demokratis akan dapat menerima pembatasan kebebasan itu dengan rela hati. Jadi, setiap orang akan menyadari hak dan kewajibannya masing-masing dalam kehidupan sehari-hari baik sebagai individu, sebagai anggota keluarga, sebagai anggota masyarakat, dan sebagai warga negara.

Kesejahteraan atau kebahagiaan lahir batin akan dicapai oleh masyarakat atau setiap warga negara jika dapat menyumbangkan dan mengembangkan tenaga dan pikirannya untuk kemajuan dan kepentingan bersama. Kebersamaan dan kerjasama inilah yang merupakan pilar demokrasi. Caranya dapat dilakukan melalui dialog dan musyawarah mufakat sebagai pendekatan sosial dalam setiap pengambilan keputusan untuk mencapai kesejahteraan dimaksud. Berkenaan dengan inilah, maka bagi setiap warga negara dibutuhkan :

- a. Pengetahuan yang cukup tentang masalah-masalah kewarganegaraan (civics), katanegaraan, kemasyarakatan, urusan-urusan pemerintahan yang penting;
- b. Keinsyafan dan kesanggupan menjalankan tugasnya, dengan mendahulukan kepentingan negara dan masyarakat daripada kepentingan diri sendiri atau kelompoknya;
- c. Keinsyafan dan kesanggupan memberantas kecurangan-kecurangan dan perbuatan-perbuatan yang menghalangi kemajuan dan kemakmuran rakyat dan pemerintah. (Ngalim Purwanto, 1994:44).

B. PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI DALAM PENDIDIKAN

Dalam setiap pelaksanaan pendidikan, terdapat beberapa masalah yang terkait, antara lain :

1. Hak asasi setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan.
2. Kesempatan yang sama bagi warga negara untuk memperoleh pendidikan.
3. Hak dan kesempatan atas dasar kemampuan mereka. (M. Djumberansyah Indar, 1994:118).

Dari kenyataan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa ide dan nilai demokrasi pendidikan sangat banyak dipengaruhi oleh alam pikiran, sifat, dan jenis masyarakat di mana mereka berada. Pengembangan demokrasi pendidikan pun karenanya akan banyak dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan dan penghidupan masyarakatnya. Misalnya, masyarakat agraris di perkampungan akan berbeda dengan masyarakat modern di perkotaan, dsb. Dikaitkan dengan prinsip-prinsip demokrasi, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan, di antaranya :

1. Keadilan dalam pemerataan kesempatan belajar bagi semua warga negara dengan cara adanya pembuktiaan kesetiaan dan konsisten pada sistem politik yang berlaku.
2. Dalam upaya pembentukan karakter bangsa sebagai bangsa yang baik.
3. Memiliki suatu ikatan yang erat dengan cita-cita nasional. (*Ibid.*: 119).

Cita-cita demokrasi pendidikan di Indonesia yang akan dikembangkan tidak meninggalkan ciri-ciri dan sifat kondisi masyarakat yang ada, namun melalui proses horizontal dan vertikal yang komunikatif, dihubungkan dengan nilai-nilai demokrasi Pancasila, sehingga demokrasi pendidikan Indonesia berbeda dengan demokrasi pendidikan di negara-negara lain. Demikianlah dalam berbagai bidang pun mengikuti demokrasi Pancasila sehingga dikenal pula ekonomi Pancasila, politik Pancasila, dll.

Jika demokrasi pendidikan yang akan dikembangkan berorientasi pada cita-cita dan nilai-nilai demokrasi Pancasila, berarti harus mengikuti prinsip-prinsip :

1. Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sesuai dengan nilai-nilai luhurnya.
2. Wajib menghormati dan melindungi hak asasi manusia yang bermartabat dan

berbudi pekerti yang luhur.

3. Mengusahakan pemenuhan hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran nasional dengan memanfaatkan kemampuan pribadinya, dalam rangka mengembangkan kreasinya ke arah perkembangan dan kemajuan iptek tanpa merugikan pihak lain. (Ibid,:120).

Dalam demokrasi pendidikan, anak/peserta didik tidak saja dipersiapkan sekedar cerdas dan terampil, tetapi juga mampu menghargai dan menghormati orang lain, di samping iman dan takwa (imtak). Kemampuan demikian memerlukan pengayaan pengalaman menghadapi dan menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan yang hanya mungkin diperoleh dan berkembang dalam model pendidikan yang terbuka, demokratis, dan dialogis.

C. PELAKSANAAN DEMOKRASI PENDIDIKAN DI INDONESIA

Demokrasi pendidikan merupakan proses memberikan jaminan dan kepastian adanya persamaan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan di dalam masyarakat tertentu. (Zainuddin, 1994:25). Pelaksanaan demokrasi pendidikan di Indonesia pada dasarnya telah dikembangkan sedemikian rupa dengan menganut dan mengembangkan asas demokrasi Pancasila. Pelaksanaan dimaksud telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu :

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 :

- a. Ayat (1) : Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan;
- b. Ayat (2) : Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
- c. Ayat (3) : Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
- d. Ayat (4) : Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari

anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

- e. Ayat (5) : Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Demikianlah, di Indonesia semua warga negara diberi kesempatan yang sama untuk menikmati pendidikan yang penyelenggaraannya diatur oleh suatu Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (sekarang UU No. 20 Tahun 2003).

2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 :

Dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional ini (sebagai pengganti UU No. 2 Tahun 1989), demokrasi pendidikan cukup banyak dibicarakan terutama yang berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara, serta penyelenggaraan pendidikan, misalnya :

- a. Pasal 4 Ayat (1) : Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai cultural, dan kemajemukan bangsa;
- b. Pasal 5 :
 - Ayat (1) : Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu;
 - Ayat (2) : Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus;
 - Ayat (3) : Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus;
 - Ayat (4) : Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus;
 - Ayat (5) : Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.
- c. Pasal 6 :
 - Ayat (1) : Setiap warga negara yang berusia tujuh tahun sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar;

- Ayat (2) : Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan.

d. Pasal 7 :

- Ayat (1) : Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya;
- Ayat (2) : Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.

e. Pasal 8 : Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan;

f. Pasal 9 : Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

g. Pasal 10 : Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

h. Pasal 11 :

- Ayat (1) : Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi;
- Ayat (2) : Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

Uraian lebih lanjut pelaksanaan demokrasi pendidikan ini dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai peraturan yang berada di bawah UU, misalnya PP, Perpres, Keppres, Permen, Kepmen, bahkan Perda, dsb.

D. DASAR-DASAR DEMOKRASI PENDIDIKAN MENURUT ISLAM

Prinsipnya Islam memberikan kebebasan kepada setiap individu (anak/peserta didik) untuk mengembangkan nilai-nilai fitrah yang ada dalam dirinya untuk menyelaraskan dengan perkembangan zaman. Bahkan Islam memberikan petunjuk

kepada para pendidik, sekaligus menghendaki agar mereka tidak mengekang kebebasan individu anak/peserta didik dalam mengembangkan potensinya itu yang telah dibawa sejak lahir.

Anak didik dipandang sebagai obyek yang akan dibawa kepada pencapaian tujuan pendidikan, oleh karena dalam proses pendidikan yang terlibat langsung adalah anak didik itu sendiri. Jadi, secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan pendidikan akan tercapai jika pendidik memberikan porsi yang seimbang dalam pengembangan potensi-potensi yang ada dalam diri si anak didik dimaksud, artinya, sampai sejauh mana para pendidik menyampaikan pesan-pesan yang terkandung dalam hakikat pendidikan itu sendiri.

Sebagai acuan pemahaman demokrasi pendidikan dalam Islam, tercermin dari kewajiban semua manusia untuk menuntut ilmu, dan selalu bertanya kepada ahli ilmu.

1. Terdapat hadits Nabi Muhammad Saw. yang artinya :

- a. *"Tolabul ilmi fariidlotun 'alaa kulli muslimin wa muslimat"* (Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan);
- b. *"Utlubul ilma minal mahdi ilallahdi"* (Mencari ilmu dari mulai dalam buaian sampai ke liang lahad).
- c. Carilah ilmu walaupun sampai negeri Cina.

Dari hadits-hadits tersebut di atas, tercermin bahwa di dalam Islam terdapat demokrasi pendidikan, yang tidak membedakan antara muslim dengan muslimah (laki-laki dengan perempuan) dalam hal hak dan kewajiban menuntut ilmu. Oleh karenanya pendidikan harus disebarluaskan ke segenap lapisan masyarakat secara adil dan merata sesuai dengan disparitas yang ada atau sesuai dengan kondisi jumlah penduduk yang harus dilayani. Dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan ini, tentu diperlukan sarana penunjang, tersedianya guru dan tenaga kependidikan yang mampu dan terampil untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan, sehingga berhasil mencetak sumber daya manusia dan warga negara yang berkualitas baik dalam aspek kognitif, afektif, maupun psikomotoriknya. Manusia demikian, yang dibarengi dengan imtak, maka menjadi manusia yang paripurna. Inilah yang disebutkan dalam salah satu ayat Al-Qur'an,

bahwa manusia yang beriman dan bertakwa akan meningkat derajatnya jika dia berilmu pengetahuan.

2. Di dalam Al-Qur'an (Surat An-Nahl/16:43) terdapat Ayat, *"Wamaa arsalnaa min qoblika illaa rijaalan nuuhii ilaihim, fas'aluu ahladzdzikri inkuntum laa ta'lamuun"*. (Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang laki-laki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kamu kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kami tidak mengetahui).

Ayat ini mengisyaratkan bahwa jika pendidik dan anak/peserta didik dalam proses belajar mengajar dan dalam pemahaman ilmu-ilmu tersebut menghadapi hal-hal yang kurang dipahami, maka perlu bertanya kepada ahli dalam bidang ilmu bersangkutan. Jadi, memang seharusnya umat Islam memiliki ahli-ahli dalam bidang-bidang ilmu pengetahuan tertentu. Dengan demikian umat Islam perlu terus memacu dirinya agar tidak ketinggalan zaman di bidang penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam kaitan dengan demokrasi pendidikan, ada beberapa pedoman tata karma dalam pelaksanaan unsur demokrasi dimaksud baik bagi anak/peserta didik maupun pendidik :

- a. Saling harga-menghargai merupakan wujud dari perasaan bahwa manusia adalah makhluk yang dimuliakan Allah Swt. Hal ini terlukis dalam QS, Surat Al-Isra/17:70 : *"Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan"*.
- b. Penyampaian pengajaran harus dengan bahasa dan praktek yang berdasar kebaikan dan kebiaksanaan. Ini tercantum dalam QS, An-Nahl/16:125 : *"Suruhlah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik"*.
- c. Perlakuan yang adil terhadap anak didik, tidak pilih kasih. Ini tercantum dalam QS, Al-Maidah/5:8 : *"Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencian terhadap sesuatu kaum,*

mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

- d. Terjalannya rasa kasihan sayang antara pendidik dengan anak didik. Dalam hal ini ada hadits Rosululloh Saw. yang artinya, *“Belum dikatakan beriman di antara kamu sehingga kamu menyayangi saudaranya seperti kamu menyayangi dirimu sendiri”.*
- e. Tertanamnya pada jiwa pendidik dan anak didik akan kebutuhan taufiq dan hidayah Allah Swt. Hal ini tergambarkan pada QS, Surat Alfaatihah/1: 1-7.

Dari uraian-uraian tersebut di atas, jelaslah kiranya bahwa Islam memberikan dasar demokrasi dalam penyelenggaraan pendidikan, dan dengan demokrasi dalam pendidikan akan melahirkan kemajuan-kemajuan yang sangat berarti bagi umat manusia.

E. TOKOH-TOKOH PENDIDIKAN INDONESIA

Untuk tidak dilupakan tokoh-tokoh dan pahlawan pendidikan Indonesia :

1. Raden Ajeng Kartini (1879-1904).
2. Raden Dewi Sartika (1884-1947).
3. Rohana Kudus (1884-1969).
4. Raden Mas Suwardi Suryaningrat alias Ki Hajar Dewantara(1889-1959).
5. Mohammad Syafe’i (1899-1969).
6. K.H. Ahmad Dahlan (1869-1923).
7. K.H. Hasyim Asy’ari (1871-1947).

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Barnadib, Imam Sutari. 1986. ***Pengantar Ilmu Pendidikan Sistematis***. Yogyakarta : FIP-IKIP.
- Djaelani, Anton Timur. 1980. ***Peningkatan Mutu Pendidikan dan Pembinaan Perguruan Agama***. Jakarta : Dermaga.
- Djumhur dan Danasaputra. 1979. ***Sejarah Pendidikan***. Bandung : CV. Ilmu.
- Faisal, Sanafiah (Tim Dosen FIP-IKIP Malang). 1988. ***Pengantar Dasar-dasar Kependidikan***. Surabaya : Usaha Nasional.
- Faturrahman. et.al. 2012. ***Pengantar Pendidikan***. Cetakan Pertama. Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher.
- Guruge, Ananda W.P. 1970. ***Toward Better Educational Management***. International Education Year.
- Hasbullah. 1995. ***Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia***. Jakarta : Rajawali Pres.
- , 2006. ***Dasar-dasar Ilmu Pendidikan***. Edisi Revisi. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Havighurst and Neugarten. 1964. ***Society and Education***. USA : Allyn and Bacon.
- Idris, Zahara. 1987. ***Dasar-dasar Kependidikan I***. Padang : Angkasa Raya.
- Idris, Zahara & Lisma Jamal, H. 1992. ***Pengantar Pendidikan 1-2***. Jakrta : PT. Gramedia.
- Ihsan, Fuad. 2005. ***Dasar-dasar Kependidikan***. Cetakan Keempat. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Indar, M. Djumberansyah. 1994. ***Filsafat Pendidikan***. Surabaya : Karya Abditama.
- Noor Syam, Muhammad. 1996. ***Filsafat Pendidikan dan Dasar Filsafat Pendidikan Pancasila***. Surabaya : Usaha Nasional.
- Pidarta, Made. 1997. ***Landasan Kependidikan : Stimulus Ilmu Pendidikan Bercorak Indonesia***. Cetakan Pertama. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Poerbakawatja, Soegarda. 1982. ***Ensiklopedi Pendidikan***. Jakarta : Gunung Agung.

- Poerwadarmionta, W.J.S. 2007. ***Kamus Umum Bahasa Indonesia***. Edisi Ketiga. Jakarta : Balai Pustaka.
- Purwanto, Ngalim. 1994. ***Ilmu Pendidikan Teoretis dan Praktis***. Bandung : Remaja Rosda Karya.
- Richey, Robert W. 1968. ***Planning for Teaching an Introduction to Education***. New York : McGraw Hill Book Coy.
- Soewarno. 1985. ***Pengantar Umum Pendidikan***. Jakarta : Aksara Baru.
- Suryanegara, Ahmad Mansur. 2009. ***Api Sejarah***. Cetakan II. Bandung : Salamadani Pustaka Semesta.
- Suryobroto, B. 1990. ***Beberapa Aspek Dasar-dasar Kependidikan***. Jakarta : Rineka Cipta.
- Sutedjo, Muwardi. 1992. ***Kapita Selektta Pendidikan Agama Islam***. Jakarta : Ditjen Binbaga Islam dan UT.
- Tanlain, Wens, dkk. 1989. ***Dasar-dasar Ilmu Pendidikan***. Jakarta : Gramedia.
- Tim Dosen IKIP Malang. 1988. ***Pengantar Dasar-dasar Kependidikan***. Surabaya : Usaha Nasional.
- Tim IAIN Syarif Hidayatullah. 1992. ***Ensiklopedi Islam Indonesia***. Jakarta : Djambatan.
- Tirtarahardja, Umar. Dan La Sulo, S.L. 2005. ***Pengantar Pendidikan***. Edisi Revisi. Cetakan Kedua. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Vembrianto, St. 1981. ***Kapita Selektta Pendidikan***. Yogyakarta : Yayasan Pendidikan "Paramita".
- Yunus, Mahmud. 1985. ***Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia***. Jakarta : Hidakarya Agung.
- Zainuddin. 1994. Dalam Fakta : ***Jurnal Pendidikan Islam***. Edisi 8. Lampung : IAIN Raden Intan.